



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



Laporan Tahunan 2021



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan kegiatan ini menyajikan informasi mengenai pencapaian target-target kegiatan yang dilaksanakan Kemenko Marves pada tahun 2021. Laporan ini juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik dalam penggunaan anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Kegiatan yang disajikan dalam laporan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja dalam menjalankan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terhadap kebijakan dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi 7 (tujuh) K/L yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan demikian maka perencanaan program dan kegiatan yang efektif terus diupayakan sehingga menghasilkan kinerja yang terus meningkat guna mewujudkan visi Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong,

Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan kontribusi guna tersusunnya laporan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai koordinasi yang dilakukan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama pemangku kepentingan untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Jakarta, Maret 2022
Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

IKHTISAR EKSEKUTIF

Arah kebijakan Kemenko Marves dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan Kemenko Marves untuk jangka waktu lima tahun (2020-2024) akan diimplementasikan melalui aktualisasi 5 kebijakan pokok di bidang Kemaritiman dan peningkatan dukungan kesekretariatan, yakni:

- Pembangunan Kedaulatan Maritim;
- Pembangunan berbasis Negara Kepulauan;
- Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan;
- Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman;
- Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pada Tahun 2021, 5 kebijakan pokok tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kemenko Marves. Beberapa hasil pelaksanaan kegiatan sebagai upaya penanganan isu yang menjadi tugas masing-masing unit kerja sebagaimana berikut:

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Hasil kegiatan terkait Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain: 1) Telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025; 2) Telah dilaksanakan tindak lanjut pembahasan teknis *Application Programming Interface* (API) dalam rangka pertukaran data dan informasi; 3) Telah dilakukan penyempurnaan Rancangan dokumen submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di luar 200 NM segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara; 4) Telah dilaksanakan koordinasi reviu pelaksanaan rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); serta 5) Telah dilaksanakan koordinasi peningkatan kondisi keselamatan pelayaran di Kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Hasil kegiatan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim antara lain: 1) telah dikeluarkan rekomendasi kebijakan akselerasi produksi tambak udang dalam rangka terwujudnya pengelolaan kawasan budidaya perikanan yang berkelanjutan; 2) Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) merupakan salah satu IKU Menko Marves, progres pelaksanaan IKLI sampai dengan tahun 2021 adalah tersusunnya Buku Pedoman Pengukuran IKLI, Nilai IKLI 2020 dengan agregat sebesar 75,79% serta telah dilaksanakan Rapat Finalisasi perhitungan IKLI 2021 dengan nilai agregat sebesar 76,76; 3) Pengembangan industri perikanan nasional dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional; 4) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pengelolaan terpadu sumber daya pesisir dan pengembangan taman terumbu karang Indonesia atau Indonesia *Coral Reef Garden* (ICRG); dan 5) Pengelolaan kawasan budidaya perikanan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi antara lain: 1) Pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat sudah mencapai 100% dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tanggal 10 September 2021; 2) Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Nasional; 3) Koordinasi Kebijakan Program Tol Laut; 4) Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi; 5) Koordinasi Kebijakan Pengembangan 9 Kawasan Industri (KI Batang); 6) Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan; 7) Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan melakukan pemantauan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada proyek prioritas.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan antara lain: 1) Pemanfaatan sampah menjadi sumber energi baru di 10 lokasi dengan mendorong percepatan pembangunan 10 TPST/TPS RDF yang berada di Cicukang Bandung, Wargamekar Bandung, Purwakarta, Kabupaten Karawang, Ex-TPA Cicabe Bandung, Ex-TPA Babakan Bandung, Hegarmanah, Tuban Jawa Timur, dan Kebon Kongok NTB; 2) Pengelolaan ekosistem mangrove sudah mencapai 100% karena telah tercapainya 36.406 Ha rehabilitasi lahan mangrove dan finalisasi *roadmap* pengelolaan mangrove nasional melalui pokja pengelolaan ekosistem mangrove yang telah dibentuk; 3) Persiapan pelaksanaan *ground breaking* (peletakan batu pertama) Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2).

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain: 1) Pengembangan desa wisata dalam rangka memicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan serta berpotensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya; 2) Penyelenggaraan *Superbike World Championship 2021* (WSBK 2021) di Mandalika sukses digelar dan telah memberikan dampak perekonomian yang sangat signifikan; 3) Gerakan Bangga Buatan Indonesia mencapai 8.9 juta unit atau mengalami peningkatan sebesar 111% sejak diluncurkan; 4) Telah dilakukan peluncuran Indonesia *Spice Up The World* (ISUTW) pada *National Day* yang dihadiri oleh Presiden RI dalam Dubai Expo 2020; 5) Pengembangan industri gim nasional untuk menguasai minimal 70% dari pasar nasional dan 10% dari pasar global dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara menarik serta untuk melestarikan kearifan lokal dan 718 bahasa daerah; 6) Dukungan penyelenggaraan Presidensi G20; dan 7) Rencana Aksi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Hasil pelaksanaan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan antara lain: 1) Koordinasi kebijakan Perubahan RPP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi capaian program prioritas telah mencapai 100% dan sedang menunggu di tanda tangani oleh Presiden; 2) Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan Kemenko Marves adalah tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenko Marves, Penilaian mandiri indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *General Lecture core values* Aparatur Sipil Negara, *Updating* dan klarifikasi capaian kinerja triwulan tahun 2021, dan relokasi anggaran Kemenko Marves TA 2021.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait isu kebijakan dan program prioritas pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengkoordinasikan K/L terkait didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp314.596.417.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami 4 (empat) kali *refocusing* karena adanya kebijakan pemerintah akibat pandemi Covid 19, dimana APBN diarahkan untuk lebih fokus dalam menangani pandemi dan akibat dari pandemi Covid 19. Total anggaran Kemenko Marves yang mengalami *refocusing* sebesar Rp49.618.951.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) Sehingga, total jumlah pagu anggaran Kemenko Marves setelah dilakukan 4 kali *refocusing* menjadi sebesar Rp264.977.466.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Tingkat penyerapan anggaran Kemenko Marves tahun 2021 yaitu sebesar 99,19% dengan nilai Rp264.175.345.582,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Dua Rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengembangan Organisasi.....	2
B. Profil Pimpinan	3
BAB II RENCANA KERJA	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. Kegiatan Tahun 2021.....	8
1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) 2021-2025.....	8
2. Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman.....	9
3. Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Maritim (<i>Maritime Domain Awareness</i>).....	10
4. Koordinasi Peningkatan Peran Indonesia dalam Forum <i>High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)</i>	11
5. Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB	13
6. Koordinasi Pengambilalihan Pengendalian Kebijakan <i>Realignment Flight Information Region (FIR)</i>	14
7. Pengendalian Kebijakan <i>Archipelagic and Island States (AIS) Forum</i>	16
8. Pengendalian Penanganan Pembongkaran (<i>Decommissioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai	17
9. Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)	19
10. Pengendalian Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	20
11. Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)	21
12. Koordinasi dan Pengendalian ICRG.....	24
13. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan.....	28
14. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional	29
15. Koordinasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang .	30
16. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Integrasi Hulu Hilir Perikanan Budidaya.....	35
17. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	37
18. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	40
19. Koordinasi Kebijakan Hilirisasi Industri Penunjang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	41
20. Pengembangan Industri Pergaraman.....	44
21. Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Waduk Multipurpose dan Rekayasa Pantai Bendungan (18 Waduk Multiguna)	48
22. Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan <i>Major Project</i> pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T)	51
23. Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Infrastruktur Pasca Bencana (Semarang-Demak)	55

24. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan	56
25. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Nasional.....	57
26. Koordinasi Kebijakan Program Tol Laut	61
27. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi	64
28. Koordinasi Kebijakan Pengembangan 9 Kawasan Industri (KI Batang).....	65
29. Koordinasi Kebijakan Industri Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	66
30. Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	69
31. Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Sampah Menjadi Sumber Energi Baru..	73
32. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.....	76
33. Koordinasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon.....	77
34. Koordinasi Kebijakan <i>Food Estate</i>	79
35. Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Limbah Melalui <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> (FABA)	81
36. Pengendalian Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat PETI dan Tumpahan Minyak	82
37. Pengendalian Kebijakan Penanggulangan Kebencanaan.....	83
38. Pengendalian Kebijakan Program TORA dan Penyelesaian Konflik Agraria.	85
39. Pengendalian Kebijakan Perhutanan Sosial	87
40. Pengendalian Kebijakan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	90
41. Koordinasi Pelaksanaan <i>Ground Breaking</i> Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2).....	92
42. Koordinasi Pengembangan Desa Wisata.....	94
43. Koordinasi Percepatan Pengembangan DPSP Mandalika melalui Penyelenggaraan Event <i>World Superbike</i> (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022	97
44. Koordinasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.....	99
45. Koordinasi Pengembangan Program Indonesia <i>Spice Up The World</i> (ISUTW).....	101
46. Koordinasi Pengembangan Industri Gim Lokal	103
47. Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20	107
48. Koordinasi Rencana Aksi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual....	110
49. Koordinasi Kebijakan Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.....	113
50. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	114
51. <i>General Lecture Core Values</i> Aparatur Sipil Negara	117
52. Pengelolaan Reformasi Birokrasi	118
53. Penyusunan dan Pengelolaan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	119
54. Penilaian Mandiri Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	120
B. Alokasi dan Realisasi Anggaran	121
BAB IV BUDAYA KERJA.....	126
BAB V PENUTUP	128

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1	Rincian Capaian IKLI Tahun 2021	23
Tabel 2	Monitoring Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop.....	39
Tabel 3	Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Industri Pengeboran Minyak	46
Tabel 4	Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Farmasi dan Pabrik Garam CAP dari Rejected Brine	47
Tabel 5	Gambaran Umum Major Project 18 Waduk Multiguna	49
Tabel 6	Gambaran Umum Major Project 18 Pulau 3T	52
Tabel 7	Daftar 21 Desa Wisata di DPSP Danau Toba.....	96
Tabel 8	Daftar Desa Wisata Prioritas DPSP Danau Toba.....	96
Tabel 9	Tugas dan Fungsi Pokja Pengembangan Industri Gim Lokal.....	105
Tabel 10	Tugas dan Fungsi Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20	109
Tabel 11	Peringkat IP Index 2021	111
Tabel 12	Realisasi PNBPN atas KI yang tercatat pada Kemenkum HAM, Kementan, Kemendikbud, KemenPUPR, LIPI, dan Lapan.....	111
Tabel 13	Data Perbandingan Realisasi Anggaran per Bulan TA 2020 dan 2021	122
Tabel 14	Realisasi Belanja Tahun 2021	124

Daftar Grafik

Grafik 1	Target dan Capaian Nilai Ekspor Udang.....	31
Grafik 2	Target dan Capaian Nilai Produksi Udang.....	31
Grafik 3	Produksi Kebutuhan dan Impor Garam Tahun 2015-2021	45
Grafik 4	Progres Lahan Tol Cisumdawu Seksi 3-6.....	60
Grafik 5	Jumlah Pelabuhan Singgah Tol Laut 2016-2021	62
Grafik 6	Jumlah Trayek Tol Laut 2016-2021	62
Grafik 7	Jumlah Muatan Tol Laut 2016-2021	62
Grafik 8	Jumlah Armada Kapal Tol Laut 2016-2021.....	63
Grafik 9	Daya Tampung Sampah Lokasi 10 TPST/TPS RDF.....	74
Grafik 10	Capaian Kegiatan Tahun 2021	74
Grafik 11	Total Onboarding Nasional Melalui Gernas BBI 2020-2021	100
Grafik 12	Prediksi Perkembangan Pengeluaran untuk <i>Video Game</i> melalui HP, Konsol, ataupun PC (dalam miliar dolar AS).....	103
Grafik 13	Tren Penerimaan Negara Atas ESDM Yang Berasal Dari SDA	112
Grafik 14	Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	123
Grafik 15	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Unit Kerja Eselon I	123
Grafik 16	Realisasi Belanja Tahun 2021	125

Daftar Gambar

Gambar 1	Enam Program Prioritas Kemenko Marves	1
Gambar 2	7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves.....	2
Gambar 3	Perpres No 34/2022 ttg Renaksi KKI Tahun 2021-2025	9
Gambar 4	Penandatanganan MoU di Bidang Kemaritiman dengan Pemerintah Jerman... 9	
Gambar 5	Koordinasi Pembahasan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pertukaran data dan informasi Penegakan Hukum di Laut	11
Gambar 6	Negara Anggota <i>Sustainable Ocean Economy</i> (HLP SOE) dan <i>GloLitter Partnerships Project</i>	12
Gambar 7	Tiga Wilayah Potensi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut	13
Gambar 8	Realignment <i>Flight Information Region</i> (FIR) Indonesia.....	15
Gambar 9	Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada <i>High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum/HLM AIS Forum</i>	16

Gambar 10	Penanganan Pembongkaran (<i>Decommissioning</i>) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai	17
Gambar 11	Kerjasama antara Pemerintah Indonesia Dengan Australia Dalam Mendukung Proyek Energi Terbarukan yang Terbesar di dunia yakni Australia-Asia PowerLink (AAPowerLink)	20
Gambar 12	10 Goals Indikator Kesehatan Laut Indonesia (IKLI/ <i>Ocean Health Index</i> (OHI))	22
Gambar 13	Buku Pedoman Pengukuran IKLI.....	22
Gambar 14	Peninjauan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan ke lokasi.....	24
Gambar 15	Peletakan Media Tanam Terumbu Karang pada Program ICRG	24
Gambar 16	Lokasi Padat Karya ICRG di Prov. Bali.....	26
Gambar 17	Buku Dokumentasi Pelaksanaan PEN ICRG	27
Gambar 18	Pembagian Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPP	28
Gambar 19	Kunjungan Kerja Menko Marves Luhut B. Pandjaitan ke Proyek MLIN	30
Gambar 20	Desain Shrimp Estate	33
Gambar 21	Simplifikasi Perzinan Usaha Tambak Udang	34
Gambar 22	Koordinasi Dalam Rangka Perizinan Berusaha Tambak Udang Di Kab. Buol, Sulawesi Tengah.....	34
Gambar 23	Kunjungan Kerja Menko Marves ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual	36
Gambar 24	Skema Pengembangan Hulu Hilir Rumput Laut di Maluku Tenggara.....	37
Gambar 25	Pelabuhan Ikan di Papua Barat sebagai Salah Satu Lokasi untuk Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan	38
Gambar 26	Potensi dan Status Tingkat Pemanfaatan Tuna.....	38
Gambar 27	Menko Luhut mengikuti Rakor Virtual Perkembangan Program PLTS Rooftop.....	39
Gambar 28	Kunjungan Kerja Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dalam rangka Peningkatan Pemasaran Kelautan dan Perikanan.....	40
Gambar 29	Koordinasi Kemenko Marves Bersama Stakeholder Terkait Guna Peningkatan Pemasaran.....	41
Gambar 30	Koordinasi ke PT INKA dan Uji Coba Penggunaan Reefer Container Hasil Produk Dalam Negeri	42
Gambar 31	<i>Launching</i> Kincir Air Hasil Buatan Dalam Negeri	43
Gambar 32	Fasilitas Teknologi Monitoring Pabrik Garam Manyar Gresik.....	46
Gambar 33	Produk Garam Pro Analisa PT KDS	47
Gambar 34	Lahan Garam Indikasi Geografis Amed Salt Bali	48
Gambar 35	Menko Marves Luhut Meninjau Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi	48
Gambar 36	Presiden Joko Widodo Meresmikan Bendungan Pidekso di Jawa Tengah	50
Gambar 37	Bendungan Way Sekampung - Lampung	51
Gambar 38	Lokasi Pembanguan Jalan di Kab. Sofifi.....	51
Gambar 39	PPKT Pulau Enggano.....	53
Gambar 40	Progres Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar	53
Gambar 40	Skema Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Trans Mentawai	54
Gambar 42	Koordinasi dalam Percepatan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dan Pengamanan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah ke Setda Prov. Jawa Tengah	55
Gambar 43	Titik Pengembangan Kawasan Rebana.....	56
Gambar 44	Profil Ruas Jalan Tol Cisumdawu	57
Gambar 45	Tinjauan Lapangan ke Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-2.....	58
Gambar 46	Infografis Jalan Tol Cisumdawu	59
Gambar 47	Resume Progres Lahan dan Konstruksi Seksi 3-6.....	60
Gambar 48	Sarana Program Tol Laut	61
Gambar 49	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Pelabuhan.....	64
Gambar 50	Rencana Pengembangan Kota Baru Sofifi.....	65

Gambar 51	Kunjungan Menko Marves Luhut ke Kawasan Industri Batang – Jawa Tengah	66
Gambar 52	Ilustrasi Program Mobil Listrik.....	67
Gambar 53	Infografis Peta Jalan Kendaraan Listrik di Indonesia	69
Gambar 54	Prinsip Utama Aksi Afirmatif bagi Produk Dalam Negeri	70
Gambar 55	Sistem Pengaduan melalui laman http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/	70
Gambar 56	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	71
Gambar 57	Nota Kesepahaman antara Pertamina Hulu Energi dan <i>The Indonesian Iron and Steel Industry Association</i> (IISIA).....	71
Gambar 58	Infografis Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik	73
Gambar 59	Partisipasi Kemenko Marves Dalam Acara UN Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Inggris	77
Gambar 60	Koordinasi Dalam Rangka Tindaklanjut Paris Agreement (Gas Rumah Kaca dan Rendah Karbon)	79
Gambar 61	Kunjungan Kerja Menko Marves ke Foot Estate di Sumatera Utara	80
Gambar 62	Sebaran Lokasi Program Food Estate	81
Gambar 63	Foto Udara Lokasi Sisa Hasil Pengelola Timah di Bangka Belitung.....	83
Gambar 64	Himbauan Menko Marves ke Kepala Daerah Terkait Wilayah Rawan Gempa & Tsunami	83
Gambar 65	Infografis Reforma Agraria.....	85
Gambar 66	Ratas Bersama Presiden Joko Widodo terkait TORA	87
Gambar 67	Salah Satu Lokasi Pilot Project Perhutanan Sosial	88
Gambar 68	Distribusi Akses Perhutanan Sosial	89
Gambar 69	Peta Sebaran Perhutanan Sosial per Propinsi.....	89
Gambar 70	Beberapa Aturan dan Pedoman Tentang Perhutanan Sosial.....	90
Gambar 71	Salah Satu Lokasi Pengembangan Jasa Kehutanan dan HHBK di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	91
Gambar 72	Beberapa Koordinasi Kemenko Marves Dalam Rangka Kebijakan Jasa Lingkungan dan HHBK	92
Gambar 73	Peletakan Batu Pertama Pengembangan <i>Food Estate</i> di Sumatera Utara	93
Gambar 74	Pernyataan Menko Marves Luhut Terkait <i>Food Estate</i>	94
Gambar 75	Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Huta Siallagan Dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata	95
Gambar 76	Kepmenko No 185 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan World Superbike 2021 dan MotoGP 2022	98
Gambar 77	Panitia Nasional Pendukung Penyelenggara WSBK 2021 dan MotoGP 2022	98
Gambar 78	Gelaran WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika -Lombok	99
Gambar 79	Dukungan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dalam Gernas BBI	100
Gambar 80	Salah Satu Stand Pameran pada Gelaran Indonesia <i>Spice Up The World</i> ...	101
Gambar 81	Salah Satu Stand Pameran pada Gelaran Indonesia <i>Spice Up The World</i> ...	102
Gambar 82	Diagram Perbandingan Gim Lokal vs Gim Asing Tahun 2021	103
Gambar 83	Tujuh Kelompok Kerja Pengembangan Industri Gim Lokal	104
Gambar 84	Salah Satu Lokasi DSPP untuk Pelaksanaan G20 2022.....	108
Gambar 85	Indikator Pencapaian Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara	109
Gambar 86	Lokasi Persebaran <i>Side Events</i> G20 2022	110
Gambar 87	Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI	112
Gambar 88	Kemenko Marves Dalam Rangka Menginisiasi Terhadap Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.....	113
Gambar 89	Peta Jaringan JTTS – Ruas Sudah PPJT dan Konstruksi.....	117
Gambar 90	Penyerahan <i>Reward</i> atas Pencapaian Pelaksanaan RB Unit Kerja Terbaik Kemenko Marves.....	118
Gambar 91	Monitoring dan Evaluasi SPBE 2021	120

BAB I PENDAHULUAN

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sehingga sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Kemenko Marves mempunyai misi untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sesuai arah Presiden yang diberikan kepada Menko Marves pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, menangani hambatan-hambatan investasi, dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves fokus pada 6 program prioritas yaitu:



Gambar 1 Enam Program Prioritas Kemenko Marves

Salah satu faktor yang menguatkan dan menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah adanya mandat yang dimiliki oleh Kemenko Marves. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyampaikan visi dan misinya yang harus dikerjakan oleh Kemenko Marves, yaitu mewujudkan Indonesia poros maritim dunia dengan lima pilar yang menyangkut pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumberdaya laut untuk ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

A. Pengembangan Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan pada tahun 2019, Organisasi Kemenko Marves diperkuat menjadi terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Kementerian Koordinator dengan 4 (empat) Biro, 6 (enam) Deputi Bidang Koordinasi yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi, 4 (empat) Staf Ahli dan 1 (satu) Inspektorat.

Kemenko Marves juga mengkoordinasikan 7 K/L yaitu: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.



Gambar 2 7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves

Organisasi baru ini telah disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. Profil Pimpinan



Menteri Koordinator
Luhut B. Pandjaitan



Sekretaris Kementerian Koordinator
Ayodhia G. L. Kalake



Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
Basilio Dias Araujo



Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
Jodi Mahardi



Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
Ayodhia G. L. Kalake



Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
Nani Hendiarti



Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Odo R. M. Manuhutu



Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Septian Hario Seto



Staf Ahli Bidang Hukum Laut
Okto Irianto



Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim
Sugeng Santoso



Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas
Sahat Manor Panggabean

BAB II RENCANA KERJA

Rencana Kerja Kemenko Marves memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenko Marves selama tahun 2021. Rencana kerja merupakan wujud upaya Kemenko Marves dalam pencapaian visi dan misi yang termuat dalam Rencana Strategis. Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah:

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita, maka misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

**Misi
01**

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

**Misi
02**

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

**Misi
03**

Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

**Misi
04**

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

**Misi
05**

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Tujuan pembangunan Kemaritiman dan Investasi adalah:

-  Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;
-  Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekonomian nasional;
-  Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
-  Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kemaritiman sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka sasaran pembangunan kemaritiman dan investasi Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

- 
- Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
 - Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
 - Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
 - Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
 - Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara

Dalam mendukung sasaran pembangunan tersebut, maka Rencana Kerja Tahun 2021 yang terdiri dari program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagai berikut:

A. Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI
2. Tindak Lanjut Pembahasan Teknis *Application Programming Interface* (API) dalam Rangka Pertukaran Data dan Informasi
3. Penyempurnaan Rancangan Dokumen Submisi Landas Kontinen Indonesia (LKI) di Luar 200 NM segmen Selatan Jawa-Nusa Tenggara
4. Koordinasi Reviu Pelaksanaan Rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

5. Koordinasi Peningkatan Kondisi Keselamatan Pelayaran di Kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo

B. Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

1. Rekomendasi Kebijakan Akselesari Produksi Tambak Udang
2. Indeks Kesehatan Laut
3. Pengelolaan terpadu sumber daya pesisir dan pengembangan taman terumbu karang Indonesia atau *Indonesia Coral Reef Garden* (ICRG);
4. Koordinasi kebijakan pengembangan wilayah pengelolaan perikanan;
5. Koordinasi kebijakan pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional;
6. Koordinasi kebijakan akselerasi produksi dan revitalisasi tambak udang ;
7. Koordinasi kebijakan pengembangan integrasi hulu hilir perikanan budidaya;
8. Koordinasi kebijakan percepatan pengembangan logistik produk kelautan dan perikanan;
9. Koordinasi kebijakan peningkatan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
10. Koordinasi kebijakan hilirisasi industri penunjang logistik produk kelautan dan perikanan;
11. Pengembangan industri pergaraman;

C. Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

1. Koordinasi kebijakan infrastruktur waduk *multipurpose* dan rekayasa pantai bendungan (18 waduk multiguna);
2. Pengendalian kebijakan pelaksanaan *major project* pada 18 pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T);
3. Koordinasi kebijakan rehabilitasi infrastruktur pasca bencana (Semarang-Demak);
4. Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan;
5. Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan jalan tol nasional;
6. Koordinasi kebijakan program tol laut;
7. Koordinasi kebijakan percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi;
8. Koordinasi kebijakan pengembangan 9 Kawasan Industri (KI Batang);
9. Koordinasi kebijakan industri percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
10. Koordinasi kebijakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

D. Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

1. Koordinasi kebijakan pemanfaatan sampah menjadi sumber energi baru;
2. Koordinasi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove;
3. Koordinasi kebijakan pembangunan rendah karbon;
4. Koordinasi kebijakan *food estate*;
5. Pengendalian kebijakan pemanfaatan limbah melalui *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA);
6. Pengendalian kebijakan kerusakan lingkungan akibat PETI dan tumpahan minyak;
7. Pengendalian kebijakan penanggulangan kebencanaan;
8. Pengendalian kebijakan program TORA dan penyelesaian konflik agraria;
9. Pengendalian kebijakan perhutanan sosial;

10. Pengendalian kebijakan jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
11. Koordinasi pelaksanaan *ground breaking* Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2).

E. Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Koordinasi pengembangan desa wisata;
2. Koordinasi percepatan pengembangan DPSP Mandalika melalui penyelenggaraan event *World Superbike (WSBK) 2021* dan *MotoGP 2022*;
3. Koordinasi kebijakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia;
4. Koordinasi pengembangan program Indonesia *Spice Up The World (ISUTW)*;
5. Koordinasi pengembangan industri gim lokal;
6. Dukungan penyelenggaraan Presidensi G20;
7. Koordinasi rencana aksi nasional komersialisasi kekayaan intelektual.

F. Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

1. Koordinasi kebijakan perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
2. Koordinasi kebijakan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

G. Kesekretariatan

1. *General lecture core values* aparatur sipil negara;
2. Pengelolaan reformasi birokrasi;
3. Penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Penilaian mandiri indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Tahun 2021

1. Koordinasi Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) 2021-2025

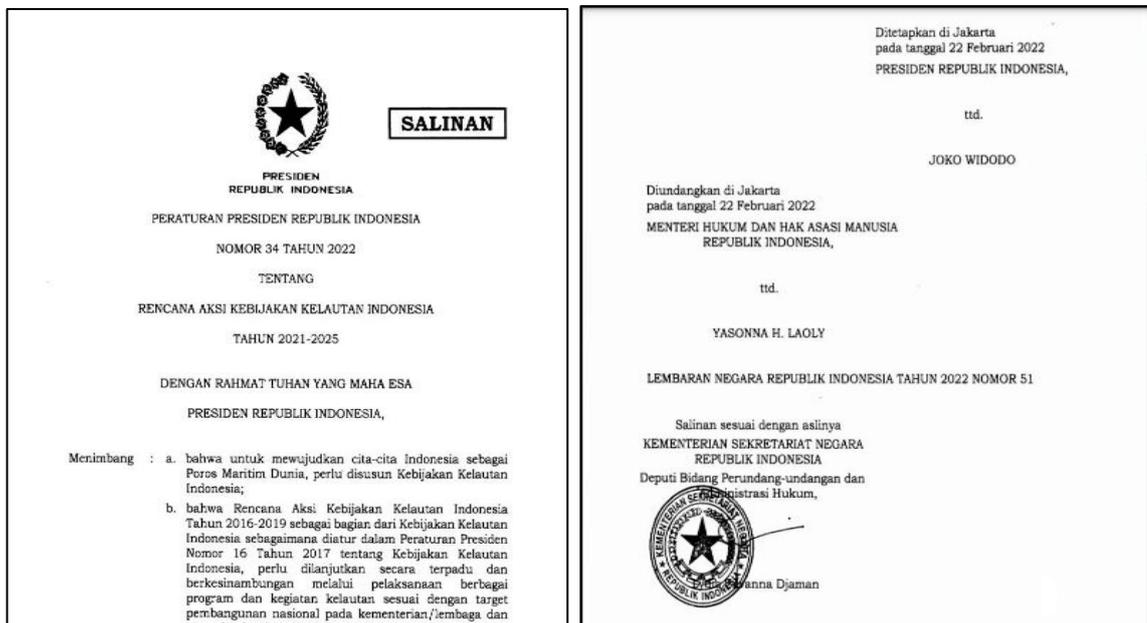
Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 dengan tujuan memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perpres tersebut juga menetapkan mengenai rencana aksi yang merupakan pedoman bagi K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kelautan. Disamping itu, rencana aksi KKI juga merupakan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagai bagian KKI, perlu dilanjutkan secara terpadu dan berkesinambungan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kelautan sesuai dengan target pembangunan nasional, maka Kemenko Marves melanjutkan proses penyusunan Rencana Aksi periode selanjutnya yang juga akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Proses penyusunan sudah berlangsung sejak tahun 2019, dimana dilakukan berbagai koordinasi dan pembahasan mengenai rancangan Rencana Aksi dan Rancangan Perpres tersebut. Pada bulan Maret 2021, Kemenko Marves mengajukan izin prakarsa melalui Surat Menko Marves Nomor B-1025/MENKO/MARVES/HK.01.02/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional KKI Tahun 2020-2024. Surat ini telah direspon oleh Menteri Sekretaris Negara Nomor B-339/MD-1/HK.03.02/05/2021 perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Dengan adanya perbedaan periode pada permohonan izin prakarsa dengan pemberian izin prakarsa, dilakukan penyesuaian dengan tetap memasukkan renaksi tahun 2020 sebagai *bridging* dari Renaksi KKI tahap sebelumnya dengan Renaksi KKI yang sedang disusun. Sampai akhir 2021, setelah melalui rangkaian harmonisasi, naskah RPerpres yang terdiri dari batang tubuh, narasi dan matriks rencana aksi telah diparaf oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan dokumen tersebut kepada Presiden

untuk ditetapkan. Pada tahun 2022 RPerpres Renaksi KKI telah ditandatangani dan diterbitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) Tahun 2021-2025.



Gambar 3 Perpres No 34/2022 ttg Renaksi KKI Tahun 2021-2025

2. Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman



Gambar 4 Penandatanganan MoU di Bidang Kemaritiman dengan Pemerintah Jerman

Indonesia dan negara-negara mitra telah melakukan beberapa kerja sama di bidang kemaritiman baik pada tingkat bilateral maupun regional dan telah melalui proses pembahasan teknis yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama kemaritiman baik *Memorandum of*

Understanding (MoU), *Minutes of Meeting* (MoM), *Plan of Action* (PoA), dan *Letter of Intent* (LoI). Untuk memastikan bahwa kerjasama dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, agar kepentingan negara melalui kerjasama tersebut dapat diwujudkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kemenko Marves melakukan pengendalian terhadap tindak lanjut kerjasama tersebut melalui koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam mendorong terlaksananya kerjasama tersebut. Beberapa kerjasama yang berhasil didorong antara lain sebagai berikut:

a. Kerjasama RI-Jerman

Penandatanganan *Joint Declaration of Intent Extending the Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Federal Republic of Germany on Maritime Cooperation* di Berlin pada 15 November 2021, berlaku untuk 3 tahun kedepan hingga 15 November 2024.

b. RI-Amerika Serikat

Penandatanganan perpanjangan *Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America* selama 5 tahun (24 Oktober 2021 – 24 Oktober 2026).

c. RI-Perancis

Penandatanganan *Letter of Intent on the Establishment of a Bilateral Maritime Dialogue Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the French Republic* pada tanggal 8 Juni 2021.

Adapun yang telah dilakukan terkait kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut:

a. Pada tanggal 2 Desember 2021 telah dilaksanakan koordinasi persiapan *4th Bilateral Maritime Forum* (BMF) RI-Belanda, Perubahan iklim, dan kerja sama energi antara Kemenko Marves dan Kedubes Belanda.

b. Pada tanggal 16 Desember 2021 telah dilaksanakan koordinasi persiapan *Bilateral Maritime Dialogue* (BMD) Indonesia-Prancis.

3. Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Maritim (*Maritime Domain Awareness*)

Perairan Indonesia menyimpan kekayaan maritim yang melimpah, sumber daya hayati dan non hayati. Karena letak geografinya, Indonesia juga merupakan negara dengan jalur lalu lintas perairan padat dikarenakan Indonesia menghubungkan jalur laut antara negara produsen dengan negara pasar. Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia. Hal ini menimbulkan daya tarik sekaligus ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia.



Gambar 5 Koordinasi Pembahasan *Standard Operating Procedure (SOP)* pertukaran data dan informasi Penegakan Hukum di Laut

Kewaspadaan maritim (*Maritime Domain Awareness*) Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan di wilayah maritim akan tetapi luasnya wilayah perairan yang harus diawasi dan dijaga belum diikuti dengan kemampuan yang memadai dari pihak-pihak berwenang di Indonesia. Kemenko Marves melihat adanya kebutuhan untuk membentuk mekanisme penanganan kasus-kasus yang sering terjadi di perairan Indonesia dalam rangka melengkapi kemampuan instansi-instansi dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan Indonesia.

Pada tahun 2019 telah dilakukan penandatanganan MoU dengan 8 (delapan) K/L tentang Berbagi Pakai Data dan Informasi dalam rangka penegakan hukum di laut yang telah ditindaklanjuti juga dengan akan dilakukan pengembangan kerja sama berbagi data dan informasi antar K/L guna menunjang penegakan hukum di laut sebagai tindak lanjut dan implementasi *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah dilakukan finalisasi pada Oktober 2021.

4. Koordinasi Peningkatan Peran Indonesia dalam Forum *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*

Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya inisiasi pembentukan HLP SOE oleh Perdana Menteri Norwegia yang mengundang Presiden RI Joko Widodo, sebagai anggota HLP SOE. Presiden RI menanggapi secara positif surat Perdana Menteri Norwegia yang menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota HLP. Dalam perkembangannya, Presiden RI menunjuk pejabat setingkat Menteri sebagai perwakilan dalam pertemuan-pertemuan *Sherpa Group*. Melalui Surat Menteri Sekretaris Negara, Nomor: B-289/M/D-1/HK.04.02/04/2021 tanggal 26 April 2021, Presiden RI menyetujui usulan perubahan perwakilan (*Sherpa*) dalam HLP SOE dari Menteri Kelautan dan

Perikanan RI diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi RI. HLP SOE sendiri merupakan forum dengan 14 negara anggota yang terdiri dari: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal. Seluruh anggota HLP SOE tersebut diperkirakan memiliki 60% wilayah laut dunia dan 30% kawasan mangrove dunia (5,4 juta ha).



Gambar 6 Negara Anggota Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) dan GloLitter Partnerships Project

Dengan adanya penunjukan ini, Kemenko Marves berkomitmen mengawal kepentingan nasional Indonesia dalam forum-forum internasional dan regional (baik multilateral maupun bilateral) seperti dalam *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)* dan *GloLitter Partnerships Project*. Peran aktif dan kontribusi signifikan Indonesia dalam forum-forum internasional untuk isu-isu terkait kemaritiman masih perlu dimaksimalkan. Sejak tahun 2018-2021 serangkaian pertemuan *Sherpa* telah dilaksanakan dengan membahas mekanisme kerja sama dalam keanggotaan *Ocean Panel* serta membahas implementasi komitmen negara anggota melalui penyampaian *update best practice ocean actions* yang sejalan dengan *Transformation SOE*.

HLP SOE sejauh ini telah menghasilkan beberapa komitmen yang tertuang dalam empat dokumen: *Blue Papers (BP)*, *Ocean Climate Report*, *Sustainable Ocean Economy Report*, dan *Transformations for a Sustainable Ocean Economy: a Vision for Protection, Production and Prosperity (Transformation SOE)*. Ruang lingkup pembahasan HLP SOE merujuk kepada Dokumen *Transformation SOE*, yang meliputi lima isu, yaitu: *Ocean Wealth*, *Ocean Health*, *Ocean Equity*, *Ocean Knowledge*, dan *Ocean Finance*.

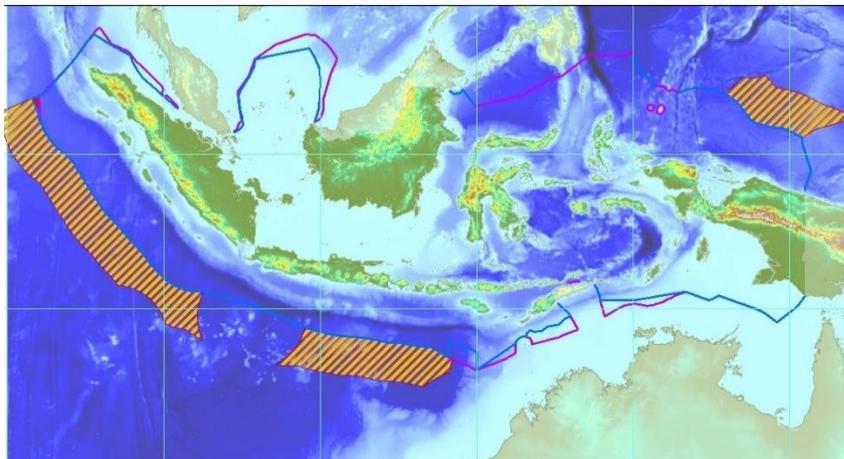
Pada tahun 2021 telah dilaksanakan *Leaders Meeting* yang dihadiri oleh kepala negara dan perwakilan negara anggota HLP SOE di sela-sela pertemuan COP-26 di Glasgow. Pertemuan tersebut menghasilkan *Statement*

by the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang di dalamnya memuat kepentingan nasional Indonesia.

Dalam *Leaders Meeting 2021*, Indonesia yang diwakili oleh Kemeko Marves mengusulkan perlunya kerja sama kolaboratif untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui kebijakan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan sebagaimana termuat dalam *Sustainable Ocean Plans* tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk melakukan transisi ke ekonomi rendah karbon melalui pendanaan untuk membangun pembangkit energi bersih serta pentingnya kerjasama dengan mitra luar negeri, pemerintah daerah dan sektor swasta termasuk upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dinilai mampu berkontribusi signifikan bagi kesehatan laut dan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

5. Pengendalian Penetapan Penambahan Luas Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB

Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian kebijakan penetapan landas kontinen Indonesia di luar 200 Mil laut pada tahun 2018 merekomendasikan pembentukan dan penetapan Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji ada tiga wilayah potensi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut.



Gambar 7 Tiga Wilayah Potensi Perluasan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut yang dikoordinasikan telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua pada tahun 2019 ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS). Keberhasilan submisi tersebut diikuti dengan penyampaian submisi parsial berikutnya pada tahun 2020 untuk segmen barat daya Sumatera sebesar 211.397,7 km² atau lebih luas dari pulau Jawa.

Setelah keberhasilan penyampaian submisi perluasan landas kontinen Indonesia untuk segmen utara Papua pada tahun 2019, dan segmen barat

daya Sumatera pada tahun 2020, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji potensi submisi di segmen selatan Jawa – Nusa Tenggara pada 2021.

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan pengendalian penetapan penambahan luas landas kontinen Indonesia di luar 200 NM pada Komisi Batas Landas Kontinen PBB disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah RI agar segera mengonfirmasi kesediaan mempresentasikan submisi segmen barat daya Sumatera kepada UN CLCS (3 Maret 2022) dan menyempurnakan persiapan yang telah dilakukan.
- b. Pemerintah RI agar segera menyiapkan posisi Indonesia dalam hal kemungkinan diadakan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Australia mengingat *area of interest* bersinggungan secara langsung dengan wilayah Australia.
- c. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil agar segera memfinalisasi dokumen untuk kemudian selambat-lambatnya disampaikan pada saat jadwal presentasi Pemerintah RI dihadapan UN-CLCS yang telah dijadwalkan pada tanggal 3 Maret 2022.
- d. Tim Teknis telah mengkaji potensi awal disegmen utara Natuna, namun mengingat potensi geopolitik yang ada maka Tim Teknis untuk sementara difokuskan hanya untuk mengeksplorasi kemungkinan survei teknis terlebih dahulu di area Laut Natuna Utara tersebut.

6. Koordinasi Pengambilalihan Pengendalian Kebijakan *Realignment Flight Information Region (FIR)*

Realignment Flight Information Region (FIR) merupakan program nasional yang diamanatkan dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mensyaratkan *realignment* tersebut selesai dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Dalam rangka melakukan percepatan terhadap amanat Undang-Undang dimaksud, Presiden memberi arahan khusus agar perundingan *realignment* FIR dapat diselesaikan untuk kemudian dapat dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia paling lambat pada tahun 2019. Hal tersebut juga merupakan usaha pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai *sky navigational master* di Asia dengan meningkatkan kapasitas pelayanan FIR di Indonesia.



Gambar 8 Realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia

Pada tahun 2021 Kemenko Marves telah melakukan serangkaian koordinasi dan perundingan untuk mempercepat penyelesaian perundingan *Realignment FIR* dan *Defence Cooperation Agreement (DCA)* dan Ekstradisi Indonesia Singapura, baik di tingkat teknis maupun di tingkat pejabat tinggi dan Menteri.

Sepanjang Tahun 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan komunikasi dengan perwakilan Pemerintah Singapura, *Senior Minister Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Republic of Singapore*, Mr. Teo Chee Hean guna menyepakati beberapa langkah strategis guna mempercepat penyelesaian perjanjian FIR, DCA, dan ekstradisi.

Pengambilalihan *Realignment Flight Information Region* melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura merekomendasikan beberapa kebijakan yakni:

- a. Tim Legal kedua Negara telah mempersiapkan sebuah dokumen yang akan memastikan semua kesepakatan politis yang telah ada selama ini terangkum di dalam sebuah kesepakatan, dan memastikan prosesnya mencapai output dokumen sebagaimana yang diharapkan, antara lain:
 - 1) Perjanjian DCA 2007 tanpa amandemen
 - 2) Perjanjian ET 2007 dengan amandemen pada pasal 2 ayat 4
 - 3) Perjanjian FIR yang berbasis perjanjian 1995 dengan penyesuaian dan merujuk pada *quid pro quo* yang diajukan oleh Indonesia
- b. Adapun dokumen yang ditargetkan untuk dapat disahkan di *Leader's Retreat* adalah:
 - 1) *Framework Cooperation Arrangement (Overarching Agreement)*, berisi elemen-elemen kesepakatan menuju penyelesaian perjanjian FIR, DCA, dan ekstradisi.

- 2) Perjanjian FIR baru, menggantikan perjanjian FIR 1995. Akan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan.
- 3) Perjanjian baru kerjasama ekstradisi yang akan ditandatangani Menteri Hukum dan HAM.

Atas rekomendasi kebijakan dimaksud, diharapkan dalam pertemuan antar pimpinan kedua negara, ketiga perjanjian dapat ditandatangani untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pengesahan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

7. Pengendalian Kebijakan *Archipelagic and Island States (AIS) Forum*

Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan/*Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum)* adalah bentuk nyata inisiatif dan kepemimpinan Pemerintah Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk membangun kerja sama dan kemitraan antara negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

AIS Forum telah melaksanakan lima kali Pertemuan Pejabat Tinggi/*Senior Officials Meeting (SOM)* dan tiga kali Pertemuan Tingkat Menteri/*Ministerial Meeting (MM)*. Kondisi penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Kepala Negara/Pemerintahan Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (*High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum/HLM AIS Forum*) pada tahun 2020.

MM ke-3 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 25 November 2020, menghasilkan kesepakatan penjadwalan ulang HLM AIS Forum ke kuartar terakhir tahun 2021. Namun, memperhatikan kondisi penyebaran penyakit menular COVID-19 dengan berbagai varian terbaru di seluruh dunia, rencana pelaksanaan HLM AIS Forum harus kembali dijadwalkan ulang. Namun, dalam rangka memanfaatkan momentum dan mempromosikan eksistensi AIS Forum sebagai platform kerjasama konkret yang dibentuk untuk memwadahi negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya pada sektor pembangunan kelautan, maka berbagai pelaksanaan agenda internasional pada tahun 2021 yang berkaitan dengan kelautan dan isu di negara pulau dan kepulauan dapat dimanfaatkan.



Gambar 9 Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada High Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum/HLM AIS Forum

Salah satu implementasi nyata yaitu pada pelaksanaan UN-Climate Change Conference (COP-26) yang dilaksanakan di Glasgow pada tanggal 1 November 2021, Presiden Indonesia mewakili kepala negara AIS telah menyampaikan dan mensirkulasikan *joint statement* negara-negara AIS Forum untuk mendukung isu seputar perubahan iklim di dunia. Mengingat pelaksanaan HLM AIS Forum masih ditunda pada tahun 2021, maka dalam rangka memanfaatkan momentum presidensi Indonesia untuk G20, Pemerintah Indonesia mengusulkan penjadwalan kembali waktu penyelenggaraan HLM AIS Forum menjadi tahun 2022 dan direncanakan untuk dilaksanakan *back-to-back* dengan KTT G20. Pada saat ini masih dalam tahap mendorong AIS Forum menjadi *Treaty Based Organization*.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mengusulkan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan HLM AIS Forum pada tahun 2022 sebagai bentuk perwujudan peran aktif dan keberlanjutan komitmen Indonesia dalam AIS Forum serta upaya pembangunan citra dan legitimasi kepemimpinan dan diplomasi maritim Indonesia pada tingkatan global demi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selanjutnya akan dibentuk panitia nasional HLM AIS Forum tahun 2022 demi memaksimalkan persiapan penyelenggaraan.

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Sekretariat AIS Forum, perlu menjaga keberlanjutan momentum kerja sama di antara negara-negara pulau dan kepulauan dengan menyelenggarakan berbagai program dan kebijakan yang mendukung.

8. Pengendalian Penanganan Pembongkaran (*Decommissioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai



Gambar 10 Penanganan Pembongkaran (*Decommissioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Lepas Pantai

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan keselamatan maritim. Agar keselamatan navigasi pelayaran tidak terganggu, keberadaan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang sudah tidak beroperasi perlu diberikan solusi. Anjungan-anjungan ini sebagian besar dibangun antara tahun 1970-1990 kemudian ditinggalkan terbengkalai di

tengah laut selama bertahun-tahun bahkan banyak dari anjungan tersebut yang sudah tidak memiliki penanda dan tidak dalam bentuk utuh sehingga sulit

terlihat. Sampai saat ini masih tersisa 100 anjungan yang masih harus diberikan solusi.

Sebagai pemilik anjungan dan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), pemerintah bertanggung jawab terhadap pembongkaran anjungan minyak dan gas yang dibangun sebelum 1994. *Grand design* pembongkaran telah disusun oleh SKK Migas namun belum ada tindak lanjutnya. Beberapa hal yang menjadi kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Tingginya biaya pembongkaran, nilai perolehan jauh lebih rendah dari pada nilai bongkar.
- b. Sampai saat ini belum ada peraturan/undang-undang mengenai lembaga yang bertanggung jawab terkait kegiatan pembongkaran anjungan migas

Terkait hal tersebut, Indonesia melakukan kerjasama dengan Pemerintah Korea terkait pembongkaran anjungan tersebut, MoU telah ditandatangani pada tahun 2021. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan implementasi kerjasama melalui kegiatan yang konkrit. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Korea Selatan membutuhkan *in-kind contribution* sebesar USD 4-5 Miliar dari Pemerintah Indonesia sebagai bentuk keseriusan dalam pengerjaan proyek ini. Disepakati total *in-kind* USD 4,275 Miliar. Kemenko Marves melaksanakan koordinasi untuk memastikan komitmen dari masing-masing K/L untuk menganggarkan komponen *in-kind* pada TA 2022.

Selain itu, untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Kemenko Marves akan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menelaah kembali dasar hukum mengenai lembaga atau institusi penanggung jawab pembongkaran anjungan migas sebagai perwakilan dari negara, karena hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan secara tertulis mengenai instansi/lembaga pemegang tanggung jawab pembongkaran anjungan migas tidak terpakai.
- b. Percepatan penyelesaian penyusunan rencana tindak lanjut penanganan 100 anjungan minyak tersisa sesuai dengan *roadmap* 5 tahun yang telah disusun, mengingat setiap tahun anjungan migas yang tidak terpakai tetap membutuhkan biaya perawatan sehingga perlu dipercepat untuk dapat memproses pembongkarannya agar tidak terus membebani keuangan negara.
- c. Membentuk pokja penyelesaian pembongkaran 100 anjungan migas yang tersisa.
- d. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen turunan MoU dengan pihak Republik Korea mengenai kerja sama di bidang industri jasa lepas pantai.
- e. Menyusun dokumen untuk menjadi dasar hukum komitmen *in-kind contribution* dari K/L.
- f. Monitoring dan evaluasi pembongkaran (*decomisioning*)

9. Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan implementasi Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dengan Pengolahan yang tepat, sampah diharapkan dapat 1) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, 2) mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, serta 3) menjadikan sampah sebagai sumber daya dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan Pasal (2) Ayat 3, pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) bisa mengurangi volume sampah secara signifikan, karenanya pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di provinsi dan kabupaten/kota tertentu.

Menurut ketentuan tersebut, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan mencakup wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado. Pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini dapat bekerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota sekitar dalam satu daerah provinsi dalam membangun instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Banyak kendala yang dihadapi daerah dalam pembangunan PSEL ini, salah satunya adalah Provinsi Bali yang mengundurkan diri. Namun demikian, sampai dengan tahun 2021 Pembangunan PSEL di beberapa kota telah mengalami banyak progres sebagai hasil koordinasi yang dilakukan Kemenko Marves. Bahkan PSEL Kota Surabaya telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2021.

Beberapa kendala lain yang dihadapi daerah adalah 1) belum ada finalisasi dokumen studi kelayakan, 2) perbedaan pandangan terkait perjanjian kerjasama, 3) skema lahan yang masih membutuhkan persetujuan, 4) perjanjian kerjasama masih perlu direviu 5) terminasi kontrak terkait eligibilitas pihak ketiga, dan 6) belum ada kesepakatan teknologi yang akan digunakan.

Terkait kendala tersebut, Kemenko Marves akan terus melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan penerapan Perpres ini.

10. Pengendalian Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat melimpah, beberapa yang sangat potensial di antaranya energi air, panas bumi, matahari, dan angin. Tentunya akan sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 11 Kerjasama antara Pemerintah Indonesia Dengan Australia Dalam Mendukung Proyek Energi Terbarukan yang Terbesar di dunia yakni Australia-Asia PowerLink (AAPowerLink)

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut diperjelas bahwa untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip:

- a. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian.
- b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru.
- d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional.

Secara kumulatif kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT terus mengalami kenaikan. Hingga tahun 2019, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 9.865,2 MW atau meningkat 16,8% per tahun dari 2015. Walaupun begitu, pada saat ini porsi EBT pada bauran energi masih sebesar

12,24% yakni masih sekitar setengah dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi (*energy mix*) adalah sebesar 23%.

Untuk mencapai target ini, diperlukan investasi peningkatan pembangkit EBT mencapai USD36,85 miliar, besaran biaya investasi tersebut terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar USD17,45 miliar, PLT Air atau Mikrohidro senilai USD14,58 miliar, PLT Surya dan PLT Bayu senilai USD1,69 miliar, PLT Sampah senilai USD1,6 miliar, PLT Bioenergi senilai USD1,37 miliar dan PLT Hybrid sebesar USD0,26 miliar. Jumlah rincian investasi PLT EBT tersebut disesuaikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 - 2025.

Diprediksi selama lima tahun ke depan, kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 11.256 MW pada 2020, 12.887 pada 2021, 14.064 MW pada 2022 dan 2023 menjadi 15.184 MW dan 17.421 MW pada 2024. Dalam rangka mendorong pencapaian target tersebut, Kemenko telah melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT PLN (Persero).
- b. Koordinasi revisi PERMEN ESDM Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero).
- c. Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Kebijakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (Pokja BJPSDA) dan Penyusunan Masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (RPP PSDA).

11. Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Ocean Health Index (OHI) yang selanjutnya di sebut Indeks Kesehatan Laut memberikan referensi yang baik untuk secara kuantitatif menilai status lingkungan laut dari perspektif sistem manusia-samudera. Selain itu, indeks ini merupakan indikator baru untuk menilai kesehatan laut melalui pelacakan status saat ini dan kemungkinan masa depan dalam 10 (sepuluh) *goals* yang mempertimbangkan dimensi fitur biologis, fisik, ekonomi, dan sosial dari laut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dinyatakan dalam Arah Kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup adalah Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut. Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim. Indonesia mengadopsi

referensi dari OHI sebagai alat ukur kesehatan laut Indonesia yang menghasilkan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI).



Gambar 12 10 Goals Indikator Kesehatan Laut Indonesia (IKLI/ Ocean Health Index (OHI))



Gambar 13 Buku Pedoman Pengukuran IKLI

Pelaksanaan IKLI pada tahun 2020 telah menghasilkan capaian yakni terlaksananya Agenda Pembangunan ke-6 dalam Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut. Sementara itu, tindak lanjut IKLI yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah Sosialisasi Pedoman Pengukuran IKLI serta penyelenggaraan beberapa Rakor dan perhitungan di lokasi *pilot project* yang mewakili 3 WPP dan 3 bagian wilayah Indonesia (Barat-Tengah-Timur) yakni Provinsi Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat/ Maluku Utara.

IKLI merupakan salah satu IKU Menko Marves didukung oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Jika dibandingkan dengan capaian IKLI Tahun 2020, capaian IKLI Tahun 2021 ini mengalami kenaikan 1,28% dari capaian nilai IKLI Tahun 2020 yang sebesar 75,79. Peningkatan nilai variabel tujuan dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah pada tujuan laut sebagai sumber pangan, laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal), laut sebagai penyimpan karbon, laut sebagai sumber mata pencaharian dan laut sebagai perairan yang bersih. Capaian IKLI pada tahun 2021 dengan nilai agregat sebesar 76,76% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKLI Tahun 2021

No.	Tipe Tujuan	Nilai Variabel
1.	Laut sebagai sumber pangan	9,03
2.	Laut sebagai penyokong perikanan tradisional (artisanal)	7,42
3.	Laut sebagai produk bahan alami	6,36
4.	Laut sebagai penyimpan karbon	8,91
5.	Laut sebagai perlindungan pesisir	5,05
6.	Laut sebagai sumber mata pencaharian	8,13
7.	Laut sebagai penyedia jasa pariwisata dan rekreasi	5,72
8.	Laut sebagai perlindungan spesies dan tempat ikonis	6,06
9.	Laut sebagai perairan yang bersih	9,12
10.	Laut sebagai penunjang keanekaragaman hayati	10

Tindak lanjut pelaksanaan IKLI antara lain akan diajukan sebagai indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) khususnya pada tujuan 14 (ekosistem lautan), dan adopsi variabel perhitungan oleh Kemendagri pada acara pemberian penghargaan Presiden kepada Gubernur terkait capaian sektor kelautan dan perikanan.

12. Koordinasi dan Pengendalian ICRG

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang - ICRG merupakan salah satu program PEN untuk mendukung program pemulihan ekosistem, pendapatan masyarakat pesisir akibat pandemi Covid-19 dan juga mendukung program eko-edukasi untuk masyarakat. K/L yang terlibat antara lain: Kemenko Marves, KKP, KLHK, Kemenparekraf, BRIN, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi.

Tujuan dari Program PEN ICRG antara lain untuk: 1) pemberdayaan masyarakat dan perbaikan ekonomi biru (menciptakan lapangan kerja dan destinasi baru wisata), dan 2) peningkatan daya saing investasi (ESG) melalui konservasi laut. Pendekatan yang dilakukan pada pelaksanaan program ICRG adalah pemberdayaan masyarakat lokal (*grass roots*) dengan pembayaran upah non tunai (*cashless*) dan ditransfer mingguan.

Pada 2020, melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program ICRG dilaksanakan di lima lokasi, yaitu Nusa Dua, Serangan, Sanur, Pantai Pandawa, dan Buleleng. Total luas area yang direstorasi adalah 74,3 Ha serta menelan biaya sebesar RP 111,32 Miliar. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 10.171 pekerja dari sektor jasa dan pelaku usaha di kawasan pesisir, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 14 Peninjauan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan ke lokasi Program ICRG di Bali



Gambar 15 Peletakan Media Tanam Terumbu Karang pada Program ICRG

Melalui fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam program PEN ICRG melaksanakan monitoring dan pemantauan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan
1	24-25 Januari 2021	Kunjungan Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Courtesy Call dan Kunjungan Lapangan di Komando Armada II
2	28-31 Januari 2021	Kunjungan Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Survei Monitoring PEN Restorasi Terumbu Karang ICRG
3	31 Maret-4 April 2021	Survei Monitoring Dan Peninjauan Lokasi Pengembangan PEN Padat Karya Restorasi Terumbu Karang di Labuan Bajo
4	20-21 Mei 2021	Audiensi Pelaksanaan ICRG 2020 dengan Gubernur Provinsi Bali dan Serah Terima Bantuan ICRG oleh KKP
5	26-29 Mei 2021	Kunjungan Kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Di Makassar, Sulawesi Selatan
6	15-17 Juni 2021	Monitoring dan Evaluasi Program Restorasi Terumbu Karang (ICRG) Bali
7	9-10 September 2021	Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pemanfaatan Faba Sebagai Media Tanam Terumbu Karang, Budidaya Udang dan Break Water di Jepara

No	Judul	Tanggal Rapat
1	Rakor Penyusunan Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022	16 Agustus 2021
2	Rakor Pembahasan Juknis PEN Padat Karya ICRG 2022	20 Agustus 2021
3	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Kep. Wakatobi	11 Oktober 2021
4	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Kep. Spermonde	25 Oktober 2021
5	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Kep. Labuan Bajo	26 Oktober 2021
6	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Lombok	26 Oktober 2021
7	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Raja Ampat	28 Oktober 2021
8	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Likupang	28 Oktober 2021
9	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Sabang	11 November 2021
10	Rakornis Rencana Restorasi Terumbu Karang di Tanjung Kelayang dan Kepulauan Seribu	15 Oktober 2021



Gambar 16 Lokasi Padat Karya ICRG di Prov. Bali

Sebagai tindak lanjut Program PEN ICRG 2020 di Bali, direncanakan 3 kegiatan utama yaitu a) program padat karya rehabilitasi terumbu karang; b) penenggelaman kapal eks KRI; dan c) pembuatan kapal riset pesisir. Program rehabilitasi terumbu karang selanjutnya direncanakan pada 3 lokasi destinasi prioritas dan 6 lokasi destinasi wisata bahari dan konservasi laut dan 1 pada lokasi PEN ICRG sebelumnya di Bali. Diharapkan dengan kegiatan tersebut optimalisasi evaluasi dan monitoring sebagai masukan program selanjutnya dapat diidentifikasi dan langkah-langkah upaya penyelesaiannya dapat segera diterapkan.

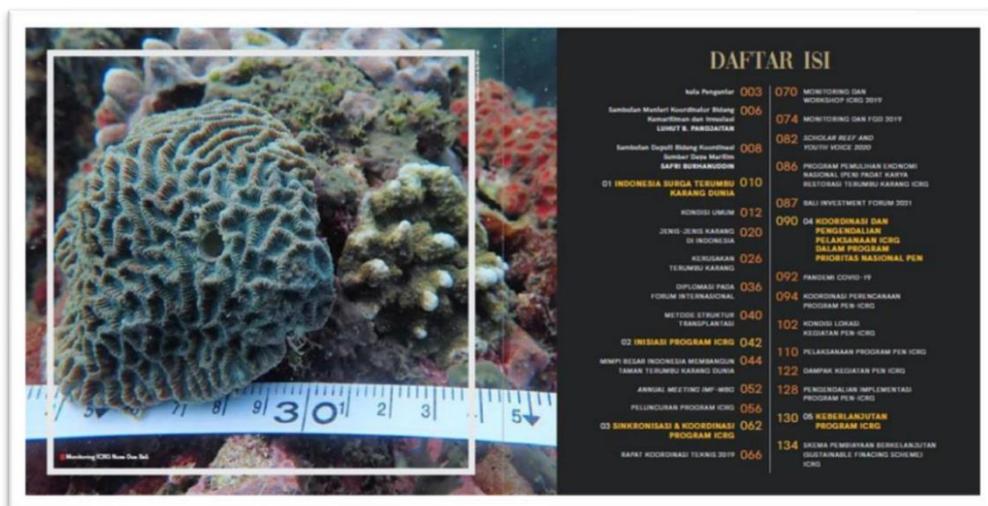
Dalam rangka mendukung Evaluasi PEN ICRG 2020 dan Persiapan Implementasi ICRG 2022 dilakukan beberapa kegiatan lapangan khususnya berkaitan dengan data dan komitmen Pemda. Beberapa kegiatan lapangan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan implementasi ICRG 2022, antara lain:

No	Tanggal	Kegiatan
1	1-5 November 2021	Monitoring dan Evaluasi Lapang PEN ICRG di Bali
2	18-19 November 2021	Kegiatan Survei Persiapan Implementasi ICRG 2022 di Kepulauan Seribu
3	22-25 November 2021	Survei Persiapan Implementasi ICRG 2022 di Lombok
4	5-9 Desember 2021	Survei Persiapan Lokasi ICRG 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara
5	6-8 Desember 2021	Survei Persiapan Lokasi ICRG 2022 di Spermonde, Sulawesi Selatan
6	7-9 Desember 2021	Survei Persiapan Lokasi ICRG 2022 di Labuan Bajo, NTT
7	23-24 Desember 2021	Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis PEN Restorasi Terumbu Karang ICRG 2022

Rekomendasi dari pelaksanaan koordinasi dan pengendalian PEN ICRG pada tahun 2021 antara lain:

- Perlunya dukungan data (Sekunder & primer) terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan ekosistem terumbu karang agar program PEN ICRG tepat sasaran.
- Perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat serta *stakeholder* terkait keberlanjutan dan pemeliharaan program PEN ICRG ini.
- PEN ICRG 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kearifan lokal dan *stakeholder* setempat sehingga hasil yang didapatkan bisa optimal dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak krisis ekonomi.

Progres pelaksanaan PEN ICRG dituangkan dalam sebuah buku yang disusun sebagai dokumentasi. Selanjutnya, Kemenko Marves melakukan penyusunan draf juknis ICRG yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 serta koordinasi untuk implementasi pelaksanaan PEN di beberapa lokasi yang sudah dibahas pada tahun 2021.



Gambar 17 Buku Dokumentasi Pelaksanaan PEN ICRG

13. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dikelompokkan sesuai karakteristik WPP yang dibagi menjadi 11 zona yang meliputi wilayah penangkapan ikan, budidaya ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. Dalam rangka peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi, pada RPJMN 2020-2024 diamanatkan melakukan implementasi kelembagaan WPP terintegrasi pada 3 lokasi percontohan. Untuk tahun 2020 ditetapkan di WPPNRI 711, 715, dan 718. Selanjutnya kelembagaan WPP pada tahun 2024 diharapkan secara bertahap dapat diselesaikan untuk 11 WPP sesuai amanat RPJMN 2020-2024.



Gambar 18 Pembagian Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPP

Hal-hal yang perlu didorong dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian program WPP antara lain:

- Menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis spasial dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*);
- Penetapan dan rekomendasi kebijakan untuk 3 WPP sebagai model percontohan penguatan tata kelola yang bersifat *Multi Stakeholder Platform*, transformasi kelembagaan dan fungsi WPP, dan meningkatkan kualitas pengelolaan WPP serta mengembangkan WPP yang mencakup keseluruhan aspek hulu-hilir secara terintegrasi;
- Menyempurnakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.33/PERMEN-KP/2019 tentang OTK LPP WPPNRI, diharapkan menjadi lembaga manajemen WPP yang ideal.

Pencapaian proses koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan yang dilakukan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan rakor Percepatan Ekspor Komoditas Hasil Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai upaya peningkatan produktivitas kapal perikanan khususnya di ZEEI dan *High Seas* serta mengkoordinasikan kesiapan pihak terkait seperti Kemenhub, KKP, Pelindo, dan Satuan Pengawasan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi WPP Percontohan;
- c. Koordinasi Pengawasan di WPP NRI untuk memberikan dorongan dan koordinasi agar tiap satuan pengawasan memiliki satu sistem yang terintegrasi dalam mengatasi masalah IUU *fishing* dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
- d. Koordinasi Penerapan Kebijakan Perikanan Terukur untuk menjaga keberlangsungan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia;
- e. Koordinasi Implementasi *Blue Halo S* dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara bisnis perikanan tangkap dan praktik konservasi yang menjamin keberlangsungan sumber daya ikan.

14. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan WPP di kawasan Timur Indonesia, Pemerintah menyusun kebijakan Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Kebijakan MLIN dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama K/L terkait lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Wilayah MLIN yang melingkupi WPP 714, 715, dan 718 memiliki potensi sumber daya ikan yang besar dan dapat dioptimalkan untuk menghasilkan nilai manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan MLIN akan dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan penangkapan terukur dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah.



Gambar 19 Kunjungan Kerja Menko Marves Luhut B. Pandjaitan ke Proyek MLIN

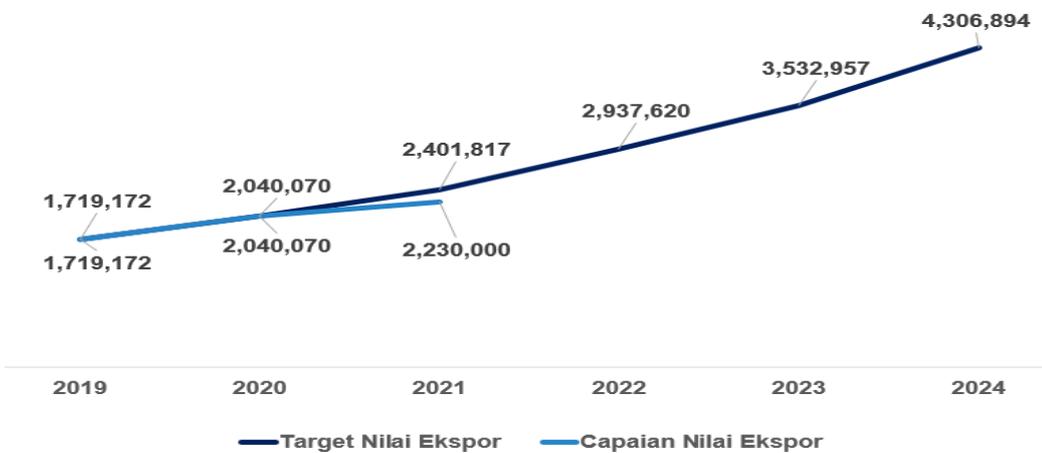
Implementasi dari MLIN adalah pengembangan kawasan industri dan pelabuhan terpadu di Kabupaten Maluku Tengah yang disebut sebagai *Ambon New Port* yang akan dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pelabuhan terpadu tersebut merupakan pelabuhan terintegrasi pelabuhan umum (terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal kapal ro-ro), pelabuhan perikanan, kawasan industri logistik, dan terminal LNG dan *power plant*. Aktivitas perikanan MLIN mencakup kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri pengolahan ikan yang kesemuanya bersinergi dengan kegiatan konservasi sehingga melalui kebijakan MLIN, diharapkan terjadi peningkatan produksi perikanan dan ekspor hasil perikanan.

15. Koordinasi Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Komoditas udang mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap kinerja ekspor komoditas perikanan Indonesia. Menurut KKP, nilai ekspor udang pada tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2020 dan 2021 diperlukan tingkat pertumbuhan rata-rata 17% per tahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini sebagai berikut:

Grafik 1 Target dan Capaian Nilai Ekspor Udang

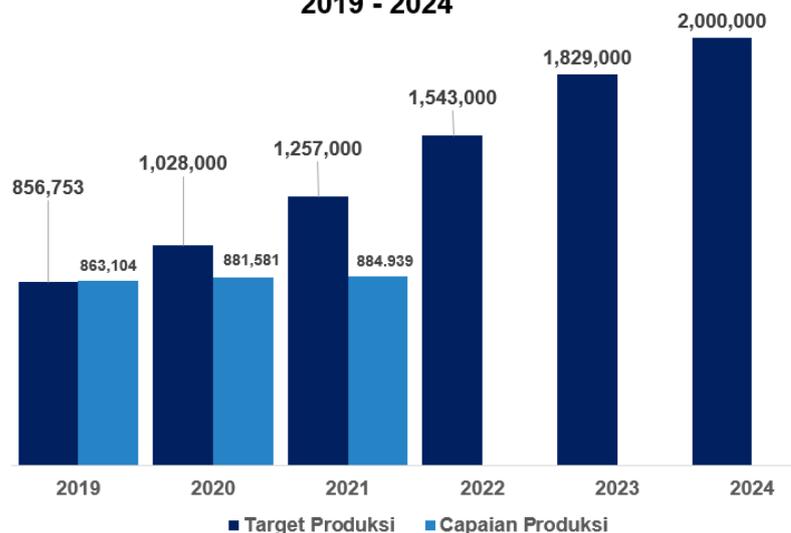
**Target dan Capaian Nilai Ekspor Udang (ribu USD)
2019 - 2024**



Pemerintah telah menargetkan produksi udang sebesar 2.000.000 ton pada tahun 2024 atau 250% dengan *baseline* 863.104 ton (2019). Hingga saat ini, capaian produksi udang tahun 2019-2021 terus meningkat namun pada tahun 2020 dan 2021 tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan dengan rata-rata produksi sebesar 875.000 ribu ton/tahun. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 20% per tahun sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2 Target dan Capaian Nilai Produksi Udang

**Target dan Capaian Produksi Udang (Ton)
2019 - 2024**



Tidak terpenuhinya capaian produksi dan nilai ekspor pada tahun 2019-2020 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Belum adanya sinergitas program kegiatan K/L;
- b. Pembangunan infrastruktur utama yang tidak merata diberbagai sentra tambak udang dan kurangnya integrasi bisnis proses dari hulu ke hilir;

- c. Perubahan Peraturan Daerah tentang RTRW yang tidak disesuaikan dengan kondisi eksisting yang berdampak pada keberlanjutan usaha tambak udang di daerah;
- d. Adanya penghematan anggaran sehingga beberapa program kegiatan pengembangan tambak udang kluster belum dapat dilaksanakan tahun 2021;
- e. Dokumen izin usaha tambak yang sangat banyak;
- f. Sumber daya manusia dan keterlibatan generasi muda untuk usaha tambak udang yang masih sangat kurang.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan yang ada, maka telah dilakukan beberapa pertemuan koordinasi dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) Strategi Peningkatan Produksi Udang dan nilai ekspor.

Target luasan tambak yang akan direvitalisasi sampai dengan tahun 2024 yakni seluas 295.501 ha yang terdiri dari luasan tambak tradisional (242.803 ha) dengan produktivitas 0,6 ton/ha/thn, tambak semi intensif (43.643 ha) dengan produktivitas 10 ton/ha/thn, dan intensif (9.055 ha) dengan produktivitas 30 ton/ha/thn. Koordinasi lintas K/L dalam rangka penguatan *multistakeholder* untuk memacu produktivitas udang dilakukan dengan penyelenggaraan beberapa kegiatan antara lain:

- Koordinasi Pokja Nasional Peningkatan Produksi Udang Nasional yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 167/DII Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional Tahun 2020 – 2024;
- Sinkronisasi Lokus Intervensi Program Tambak Udang dan Jaringan Irigasi Tambak 2020 – 2024;
- Koordinasi Penyampaian Hasil *Preliminary Design* Model Penataan Kawasan dan *Upgrading* Pertambakan Rakyat skala 100 Ha;
- Koordinasi Lokus Prioritas Revitalisasi dan Pembangunan Jaringan Irigasi Kawasan Tambak Rakyat;
- Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk pengembangan Kawasan budidaya udang yang terintegrasi (*shrimp estate*) dengan Desain Kawasan tambak.



Gambar 20 Desain *Shrimp Estate*

Pada periode 2022, Pemerintah telah menargetkan nilai ekspor udang sebesar USD 2,9 miliar dan produksi udang sebesar 1.543.000 ton. Untuk pencapaian target tahun 2022 tersebut maka tindaklanjut yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

- Finalisasi *crash program* peningkatan produksi udang nasional
- Integrasi program pengembangan irigasi dalam kawasan pertambakan rakyat di 5 provinsi *Major Project* Revitalisasi Tambak;
- Penyelesaian *master plan* pengembangan kawasan tambak 100 Ha di 4 lokasi prioritas dan Rencana pembangunan Tambak *Estate*;

2) Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Udang

Sesuai dengan Amanah UU CK yakni menciptakan kemudahan dan kenyamanan berusaha, maka dilakukan simplifikasi terhadap izin usaha tambak udang dengan cara penghapusan dan penggabungan jenis perizinan melalui beberapa pertemuan/koordinasi, antara lain:

- Pembahasan persyaratan baru usaha tambak udang sesuai Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja;
- Pengaturan persetujuan KKPR laut dan lingkungan pada usaha tambak udang; perizinan penggunaan genset pada usaha tambak udang;
- Kunjungan lapangan dan uji petik perijinan pertambakan udang di Sidoarjo; dan
- Kunjungan lapangan dan uji petik perijinan usaha tambak udang di Kab. Sumbawa.

Melalui metode ini, dari 21 jenis perizinan yang sudah ada berubah menjadi hanya 3 jenis persyaratan/persetujuan/pernyataan/konfirmasi yang dikeluarkan

oleh OSS menjadi 1 jenis perizinan atau NIB sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 21 Simplifikasi Perizinan Usaha Tambak Udang



Gambar 22 Koordinasi Dalam Rangka Perizinan Berusaha Tambak Udang Di Kab. Buol, Sulawesi Tengah

Target pemerintah di tahun 2021 sesuai dengan Amanah UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menciptakan nyaman berusaha. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun turunan UU berupa PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Laut. Beberapa hal yang masih perlu dibenahi dan ditindaklanjuti untuk tahun 2022 antara lain:

- Penyempurnaan Sistem aplikasi OSS hasil uji petik Integrasi jaringan OSS di pusat dan daerah;
- Uji petik lanjutan untuk kepastian operasional OSS RBA;
- Perpanjangan moratorium penindakan sampai OSS RBA dapat diaplikasikan dengan baik;
- Penyusunan panduan teknis hasil simplifikasi perizinan dan sosialisasi;
- Pengadaan kontak pengaduan perizinan dan investasi udang.

16. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Integrasi Hulu Hilir Perikanan Budidaya

Salah satu lokus pengembangan budidaya terintegrasi hulu hilir yang sedang difokuskan saat ini adalah di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari Program Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Beberapa isu pengembangan budidaya terintegrasi hulu hilir di Maluku Tenggara sebagai berikut:

- a. Rumput laut menjadi komoditas unggulan Wilayah Maluku dengan *share* produksi lebih dari 95%. Kontribusi produksi Wilayah Maluku sekitar 762.645 ton (8-10% nasional) Tahun 2020.
- b. Pemerintah telah menyusun rencana pengembangan dan integrasi budidaya perikanan dalam implementasi MLIN yang difokuskan pada komoditas Rumput Laut, Udang dan Kakap Putih. Untuk kawasan Kabupaten Maluku Tenggara, akan dikembangkan *seaweed estate* dan telah dilakukan *Fact Finding* ke lokasi pengembangan marikultur di Provinsi Maluku Utara dan Kab Maluku Tenggara;
- c. Dalam pengembangan terintegrasi hulu hilir, pada hulunya produktifitas dan kualitas budidaya rumput laut masih belum optimal, sedangkan pada sisi Hilir peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan masih minim dan belum adanya pengembangan hub pengolahan rumput laut di wilayah timur.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan, menjaring isu dan melakukan evaluasi adalah:

- a. Koordinasi pengembangan rumput laut terintegrasi di Indonesia Timur, dilaksanakan di Makassar, 27 Mei 2021.
- b. Kunjungan lapangan ke lokasi pengembangan rumput laut Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 22-25 Agustus 2021.
- c. Diskusi dengan pakar budidaya rumput laut dan *value chain* baik dari Universitas dan peneliti Balai Perikanan Budidaya DJPB, KKP.
- d. Koordinasi rencana revitaliasi pabrik rumput laut di Maluku Tenggara
- e. FGD pengembangan rumput laut terintegrasi hulu hilir di Maluku Tenggara.



Gambar 23 Kunjungan Kerja Menko Marves ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam Program MLIN

Pada tahun 2022, dampak yang akan dirasakan dalam pengembangan integrasi hulu hilir budidaya rumput laut di Maluku Tenggara dengan melakukan perbaikan dan pengelolaan pabrik rumput laut yang sudah ada adalah:

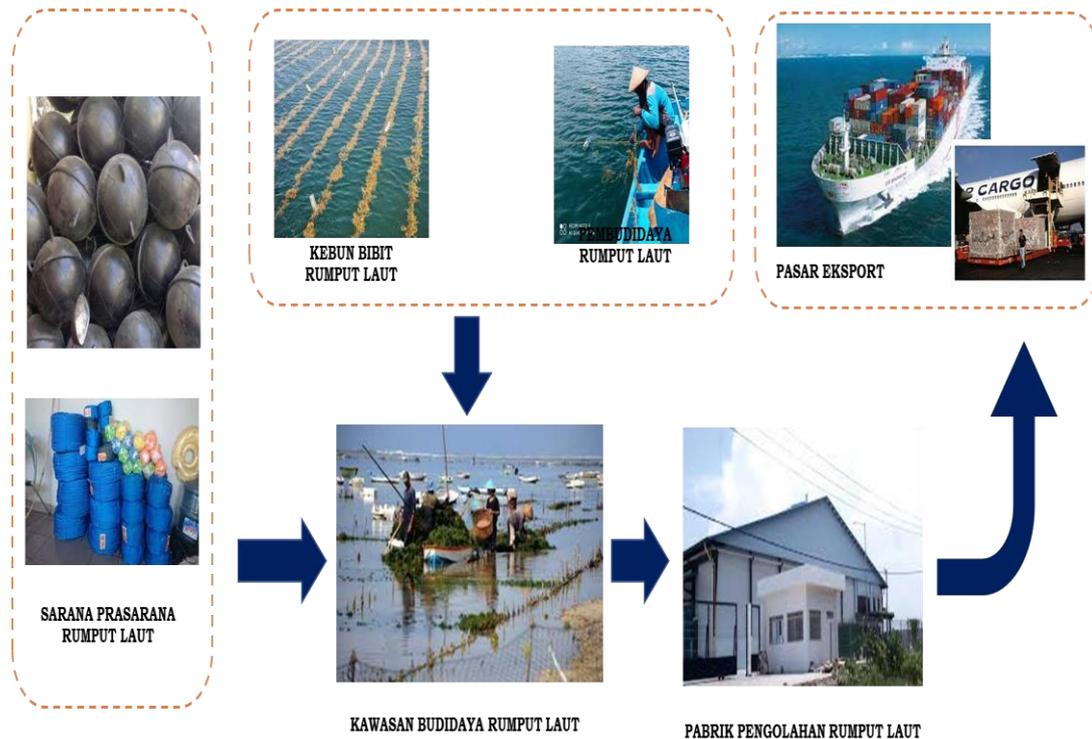
- a. Peningkatan harga penjualan rumput laut yang dipasok hingga 72%/kg, terlebih apabila dapat menghasilkan produk olahan rumput laut yang lebih bervariasi;
- b. Mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 2,06%;
- c. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk sebesar 12,16% atau bertambah sebesar Rp 4.037.000;
- d. Menyerap tenaga kerja sebanyak 2000 orang dengan asumsi pengembangan rumput laut 500 ha akan membutuhkan 4 orang per ha.

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- a. Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi oleh pemerintah daerah agar konflik pengelolaan dan pemanfaatan perairan dapat dihindari;
- b. Kolaborasi riset antara Balai Perikanan dan universitas dalam mendukung ketersediaan benih yang berkualitas;
- c. Diperlukan dukungan sarana produksi yang ramah lingkungan;
- d. Asistensi teknis dan pelatihan untuk penerapan teknologi budidaya yang lebih baik (CBIB) bagi pembudidaya;
- e. Mengoperasikan kembali pabrik rumput laut yang sudah ada dengan skala ekonomi yang memadai atau membuka investasi swasta untuk pengolahan;

- f. Menentukan model kerjasama antara Pemda dengan pihak ketiga (perusahaan, BUMD atau koperasi) untuk mendayagunaan pabrik pengolahan;
- g. Mensinergikan berbagai K/L seperti PUPR, ESDM, Kemenko, Kemendes dan instansi lain dalam mendukung pengembangan *seaweed estate*.

Model pengembangan rumput laut integrasi hulu hilir di Maluku Tenggara dapat diskemakan seperti di bawah ini:



Gambar 24 Skema Pengembangan Hulu Hilir Rumput Laut di Maluku Tenggara

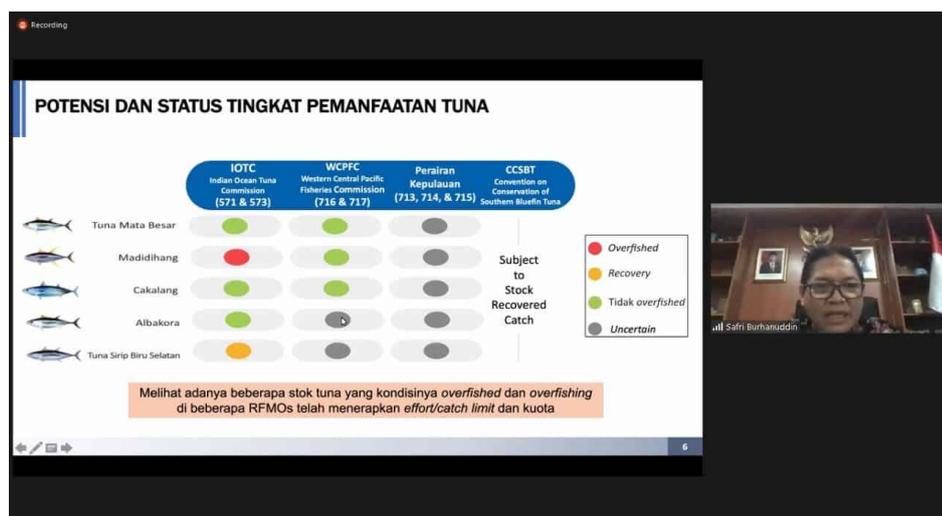
17. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan

Salah satu isu strategis dan arah kebijakan kelautan dan kemaritiman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan meningkatkan sarana prasarana. Namun salah satu permasalahan terkait sarana prasarana yakni jumlahnya yang masih minim serta informasi logistik yang belum dapat diakses secara *realtime*, sehingga mempengaruhi pengembangan dan mekanisme logistik dalam proses produksi hingga distribusi produk kelautan dan perikanan (KP).



Gambar 25 Pelabuhan Ikan di Papua Barat sebagai Salah Satu Lokasi untuk Peningkatan Produk Kelautan dan Perikanan

Perbaikan sistem pasok rantai dingin pada sisi hilir perikanan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan hulu-hilir perikanan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi *losses* produk perikanan Indonesia. Sebagai langkah untuk menjaga kualitas produk KP, dilakukan pengoptimalan pemanfaatan *cold storage* milik KKP. Namun mengingat besarnya potensi energi surya di Indonesia, maka solusi yang dilakukan adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada sentra produksi KP oleh Kementerian ESDM. Program PLTS Atap mampu menekan tarif listrik sebesar 50% di PPN Kejawatanan dan 80% di PPS Bungau.



Gambar 26 Potensi dan Status Tingkat Pemanfaatan Tuna

Kendala dari program PLTS Atap adalah belum adanya surat terima hibah untuk beberapa titik lokasi, adanya aset material atap yang mengalami

kebocoran akibat angin kencang, dan tenaga sumber daya manusia untuk operasional PLTS atap. Direncanakan akan melakukan koordinasi dan melakukan kunjungan bersama dengan Kementerian ESDM, dan KKP ke beberapa titik lokasi program PLTS Atap.

Tabel 2 Monitoring Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop

Monitoring Pekerjaan Pembangunan PLTS Rooftop (10/10)									
PLTS pada Fasilitas Cold Storage									
Paket PLTS Rooftop dan CS									
No	Provinsi	Nama Lokasi/Gedung	Alamat	Kapasitas (kWp)	Progres Pekerjaan				
					Konstruksi	ULO	Pelatihan	Eksim	
1	Sumatera Barat	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus	Jalan Batu Tabuan Bungus Barat, Desa Bungus Barat, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat	150	√	√	√		
2	Riau	Integrated Cold Storage (ICS) Desa Koto Perambahan	Jalan Raya Pekanbaru - Bangking KM 36 Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Riau	100	√	√	√		
3	Jawa Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawen	Jalan Pelabuhan Perikanan, Pegambiran, Lemahwungkuk, Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45112	120	√	√	√		
4	Jawa Timur	Integrated Cold Storage (ICS) Desa Sumberanyar (IPI Paiton)	Dusun Pesiir, Sumberanyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291	25	√	√	√		
5	Jawa Timur	Integrated Cold Storage (ICS) Dinas Perikanan Sumenep	Palegen, Longos, Gapura, Kab Sumenep, Jawa Timur	75	√	√	√		
6	Bali	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambangan	Jl. Pelabuhan No.1 Desa Pengambangan, Kabupaten Jembrana, Bali	75	√	√	√		
7	NTB	Pelabuhan Perikanan (PP) Teluk Awang	Jl. Sukaraja, Mertak, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	40	√	√	√		
8	Sulawesi Selatan	Pelabuhan Perikanan (PP) Untia	Jl. Salodong Kompleks Pelabuhan, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	100	√	√	√		
9	Maluku Utara	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai	Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara	100	√	√	√		
10	Maluku	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tuul	Jl Dumar, Kel. Lodar Ei, Pulau Dulah Sel., Kota Tuul, Maluku	120	√	√	√		
11	Papua	PPI Pomako	Kawasan Industri Perikanan, Jalan Poros Timika - Pomako, Desa Pomako, Kec. Mimika Timur, Mimika, Papua	75	√	√	√		
12	Papua	PPN Merauke	Gedung Pelabuhan Perikanan, Jalan Karang Indah, Kec. Merauke, Merauke, Papua	100	√	√	√		
Total						12	12	12	0

Tindakan lanjut berupa koordinasi yang dilakukan untuk mendorong penggunaan PLTS Atap antara lain:

- Mendorong pengadaan instalasi PLTS Atap di daerah *remote* dan kerjasama antara KKP, Pemda dan GIZ untuk pendampingan pengelolaan PLTS Atap.
- Mendorong pembangunan PLTS Atap yang berbaterai.
- Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dengan sumber energi EBT untuk nelayan di daerah 3T.



Gambar 27 Menko Luhut mengikuti Rakor Virtual Perkembangan Program PLTS Rooftop

18. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan



Gambar 28 Kunjungan Kerja Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dalam rangka Peningkatan Pemasaran Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024, diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional. Walaupun mempunyai potensi perikanan tangkap yang besar, Indonesia hanya menduduki urutan ketiga setelah Vietnam dan Thailand sebagai negara eksportir ikan di pasar global. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat pemanfaatan komoditas baik dari segi volume maupun IPTEK alat tangkap dan budidaya. Selain pesaing, terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi, antara lain:

- Hambatan tarif dan non tarif yang diterapkan oleh negara-negara tujuan ekspor khususnya Uni Eropa kepada Indonesia (biaya yang dikenakan sebesar 15%);
- Jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan yang makin ketat dari negara pembeli (terkait fasilitasi produksi KP);
- Adanya kasus penolakan komoditas ekspor di negara tujuan;
- Kelangkaan ruang muat kontainer di *mother vessel*, jadwal dan biaya logistik ekspor.

Melihat kendala tersebut, strategi pemasaran yang perlu dilakukan adalah pemetaan dan penguatan akses pasar dalam dan luar negeri, penguatan promosi dan *branding* hasil kelautan dan perikanan, negosiasi dan perundingan dagang, serta penyelesaian permasalahan kontainer dan logistik ekspor. Indikator dari keberhasilan strategi pemasaran adalah pada aspek nilai konsumsi perikanan, nilai ekspor dan nilai PDB perikanan.

Hingga saat ini, Kemenko Marves masih terus berkoordinasi dengan K/L terkait dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan penyelesaian perjanjian ekonomi dengan negara atau kawasan tujuan ekspor, memastikan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk ekspor, serta mengatasi kendala permasalahan kontainer dan ruang muat di *mother vessel*.



Gambar 29 Koordinasi Kemenko Marves Bersama Stakeholder Terkait Guna Peningkatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

19. Koordinasi Kebijakan Hilirisasi Industri Penunjang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan

a. Reefer Container

Permasalahan distribusi logistik perikanan saat ini adalah jumlah unit kontainer pendingin yang masih minim dan mahal di area pelabuhan perikanan. Terjadinya hambatan pengiriman komoditi ekspor produk perikanan diakibatkan oleh masih adanya ketergantungan terhadap jalur pengiriman melalui negara tetangga. Sebagai contoh, apabila Singapura sebagai pusat pelabuhan ekspor tidak beroperasi (masa pandemi) maka produk perikanan komoditi ekspor dari Indonesia pun harus terhenti dan perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk dilakukan pengiriman sehingga distribusi komoditi ekspor produk perikanan tidak efisien.

PT INKA (Persero) telah bersedia untuk memproduksi kontainer berpendingin kapasitas mini (1, 2 dan 5 ton) serta untuk kebutuhan ekspor yaitu kapasitas 20' dan 40'. Hingga saat ini, PT INKA telah merampungkan pengembangan prototipe kontainer 1 dan 5-ton sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha rantai dingin dan sebagai kesepakatan antara nelayan dengan ARPI sebagai pengguna. Mengacu pada isu tersebut, terdapat dua kegiatan koordinasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves dalam penanganan isu jaminan usaha industri perikanan melalui pembangunan kontainer berpendingin buatan dalam negeri guna mendukung sistem rantai dingin perikanan Indonesia, yaitu:

- Dengan telah selesainya pembangunan prototipe kontainer berpendingin kapasitas kecil yaitu 1,2 dan 5-ton oleh PT INKA maka diharapkan dapat segera menyelesaikan prototipe kontainer berpendingin kapasitas 20' dan 40' dengan dukungan dan kolaborasi bersama K/L terkait khususnya kementerian teknis yang menangani isu tersebut.
- Prototipe yang telah dibangun selanjutnya dilakukan uji coba implementasi baik pada palka kapal nelayan maupun kendaraan angkutan distribusi untuk dapat mengetahui standar kesesuaian produk dan perbaikan berkelanjutan jika terdapat ketidak sesuaian produk dengan standar kontainer berpendingin yang dibutuhkan pelaku usaha.

Dari hasil evaluasi atas permasalahan yang terjadi, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan kepemilikan kontainer berpendingin import bagi *shipping line* yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia, yang kemudian ditindak lanjuti oleh K/L terkait. Hal tersebut dapat mendukung peningkatan PDB Maritim melalui dukungan terhadap sistem logistik pada produk kelautan dan perikanan dimana kontainer berpendingin menjadi salah satu alternatif solusi peningkatan mutu dan kualitas produk perikanan dan kelautan.



Gambar 30 Koordinasi ke PT INKA dan Uji Coba Penggunaan *Reefer Container* Hasil Produk Dalam Negeri

b. Kincir Air Produksi dalam Negeri sebagai Produk Penguatan Riset Kelautan dan Perikanan

Pada dasarnya terdapat dua jenis riset dan inovasi, riset dengan saintifik dengan *output* berupa model/survei/analisis/pemetaan (sebagai dasar pengambilan kebijakan) dan riset/inovasi terapan dengan *output* berupa barang/*prototype* yang dapat dimanfaatkan secara langsung pada industri. Sepanjang 2021, isu-isu dan kegiatan yang ditangani oleh Kemenko Marves untuk mendorong hal tersebut sesuai dengan fungsi koordinasi dan pengendalian diantaranya terkait dengan:

- Penguatan Kerjasama Riset Kemaritiman antara pemerintah Republik Korea Selatan dengan Republik Indonesia melalui MTCRC (*Marine Technology Cooperation Research Center*).
- Mendorong pemanfaatan riset dan inovasi melalui kolaborasi multipihak di Indonesia.

Hasil dari koordinasi dan pengendalian terhadap isu pemanfaatan riset dan inovasi untuk menunjang hilirisasi produk kelautan dan perikanan adalah terkait dengan pengembangan kincir air buatan dalam negeri melalui kolaborasi multipihak di Indonesia, dengan kegiatannya pengembangan kincir air buatan dalam negeri (3 Fase) untuk tambak udang skala industri. Kolaborasi bersama PPNS Surabaya, PT. BBI, PT. Om Hwahaha, Kemenperin, KKP dan BSN. Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan hasil berupa MoU antara PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra (BBI), dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Perkapalan dan Industri Penunjangnya. Salah satu *output* yang diharapkan dari MOU ini adalah *prototyping* dan pengembangan kincir yang vital untuk tambak-tambak ikan dan udang, yang selama ini hampir seluruhnya masih impor. Kincir ini menggunakan listrik 3 *phase* sehingga lebih unggul untuk industri.



Gambar 31 *Launching* Kincir Air Hasil Buatan Dalam Negeri

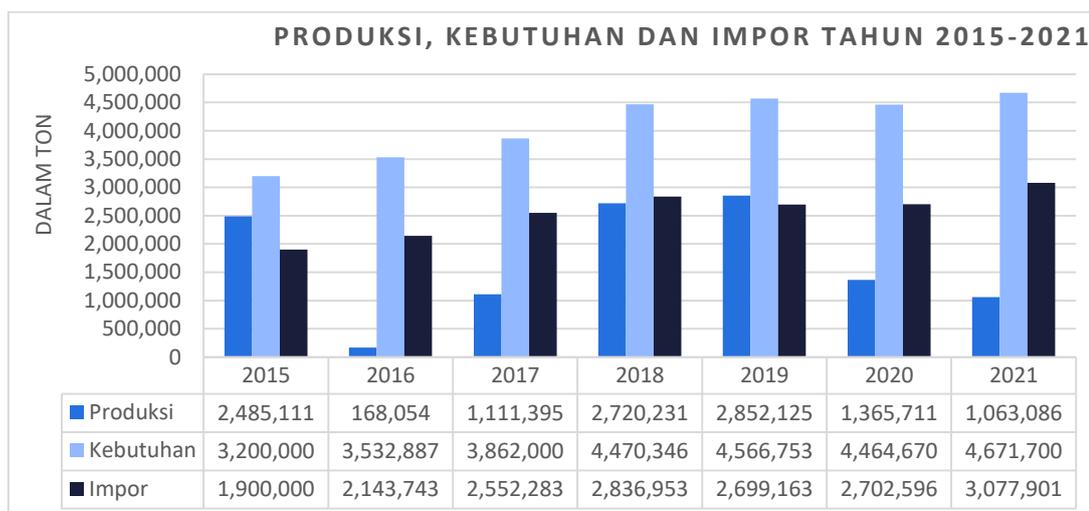
Beberapa rangkaian kegiatan lainnya yang telah dilakukan selama tahun 2021 diharapkan dapat mendorong teknologi kincir air buatan anak bangsa yang memiliki TKDN tinggi untuk tambak-tambak ikan dan udang, yang dikembangkan bersama oleh UMKM PT. Om Hwahaha, PT. BBI dan PPNS. Prototipe kincir ini telah diujicobakan di tambak Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo (BPBAP Situbondo) instalasi Pasuruan dengan hasil yang baik. Selanjutnya pada tahun 2022, ditargetkan TKDN produk ini mencapai minimal 40% dan akan dimasukkan ke dalam e-katalog LKPP.

20. Pengembangan Industri Pergaraman

Pada tahun 2021, terdapat beberapa perkembangan penyelesaian isu di bidang pergaraman nasional khususnya perbaikan mekanisme importasi dan penerapan inovasi teknologi. Adapun melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pada isu pergaraman, Kemenko Marves telah melakukan serangkaian upaya masif untuk meningkatkan iklim industri pergaraman nasional. Ketercapaian tersebut diantaranya ditunjang oleh beberapa progres penting sebagai berikut:

- a. Hingga akhir Desember 2021, total penyerapan garam lokal oleh 15 industri pengolah garam sejumlah 767.611 ton. Adapun berdasarkan monitoring yang telah dilakukan, proses penyerapan oleh industri di gudang garam nasional berlangsung dengan baik, transparan, dan akuntabel melalui dokumen MoU yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Per 13 Desember 2021, persentase realisasi impor adalah 86,53%. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, salah satu penyebab jumlah realisasi tidak mencapai 100% adalah adanya substitusi impor garam industri yang dipenuhi oleh garam lokal;
- c. Telah dilakukan serangkaian monitoring importasi dan penyerapan garam lokal garam melalui Kepmenko Marves No 99/DII Tahun 2021;
- d. Ekstentifikasi lahan di Nagekeo PT Cheetam (443 Ha) menyelesaikan pembangunan tanggul dan pengairan. Saat ini sedang membangun meja garam dalam tahap akhir;
- e. Telah dilakukan pembahasan RPerpres tentang P3N oleh Tim PAK. Saat ini proses pembahasan dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum HAM;
- f. Fasilitasi keberadaan dan peredaran garam indikasi geografis. Pada tahun 2021, Kemenko Marves telah mendorong agar peredaran garam indikasi geografis substansinya dapat masuk pada RPerpres P3N;
- g. Telah diresmikan *mini pilot plant* pabrik garam CAP dari *Rejected Brine* PLTU 750 tpy di PLTU Suralaya dan *Pilot Project* pabrik garam aneka pangan 40.000 tpy di Manyar.

Grafik 3 Produksi Kebutuhan dan Impor Garam Tahun 2015-2021



Berdasarkan neraca garam di atas, dapat dianalisa bahwa produksi garam nasional mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 dan pada tahun 2021 tidak mencapai nilai yang ditargetkan. Kebutuhan garam nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan sebagian besar terjadi pada jenis garam industri. Adanya gap antara kebutuhan dan produksi tersebut menyebabkan pemerintah melakukan importasi garam. Dalam tiga tahun terakhir, impor garam mengalami peningkatan mengikuti jumlah kebutuhan garam yang terus meningkat.

1) Perbaikan Mekanisme Importasi

Pada tahun 2022, Pemerintah mengharapkan importir tidak melakukan importasi pada saat musim panen/menjelang akhir tahun serta menyesuaikan mekanisme yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga mengharapkan adanya suatu mekanisme importasi yang menerapkan praktik berbasis informasi dan teknologi terintegrasi. Maka dari itu, melalui rakortas tingkat menteri telah ditetapkan mekanisme importasi tahun 2022 menggunakan Neraca Komoditas.

Importasi tahun 2022 juga akan mengacu pada ketentuan PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan perikanan, yakni impor garam dapat dilakukan jika sudah diperkirakan stok dan produksi tahun berjalan hanya tersisa paling banyak 25% pada gudang garam rakyat, gudang garam nasional, dan gudang garam industri. Jenis garam dimaksud adalah garam bahan baku dan garam penolong industri. Selain itu, importir garam harus memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam di gudang garam. Agar importasi berlangsung dengan persaingan usaha yang sehat dan mendukung iklim investasi, Kemenko Marves juga menetapkan importasi hanya dilakukan oleh industri pengguna langsung.

2) Penerapan Teknologi Produksi Garam Konsumsi dan Industri



Gambar 32 Fasilitas Teknologi Monitoring Pabrik Garam Manyar Gresik

Permasalahan kualitas dan kuantitas garam nasional menjadi indikator utama penyebab dari meningkatnya jumlah importasi dari tahun ke tahun. Produksi yang masih bergantung pada cuaca dan penerapan teknologi produksi yang konvensional berdampak pada kualitas garam yang belum sesuai standar. Atas dasar permasalahan tersebut, Presiden dan Menko Marves mendorong agar upaya penerapan teknologi produksi dan pengolahan dapat dilakukan secara masif.

Pabrik pengolahan garam rakyat secara signifikan mampu memberikan dampak terhadap produksi garam yang selama ini kualitasnya belum optimal sebagaimana kebutuhan industri. Total dari kapasitas masing-masing pabrik garam mampu mengolah garam hingga kurang lebih 180.000 ton per tahun. Jika pabrik garam tersebut beroperasi secara penuh dan mampu menguasai pasar garam industri, maka impor garam industri aneka pangan dengan jumlah tahun 2021 sebesar 612.000 secara perlahan dapat disubstitusi. Beberapa pabrik garam tersebut yaitu:

Tabel 3 Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Aneka Pangan dan Garam Industri Pengeboran Minyak

Pabrik	Kap. (Tpy)	Progres
Pengolah garam rakyat di Camplong (PT Garam)	60.000	Telah beroperasi
Pengolah garam rakyat di Segoromadu Gresik (PT Garam)	30.000	Telah beroperasi
Pengolah garam rakyat di Manyar Gresik (BRIN)	40.000	Kerjasama bisnis dg perusahaan yang akan mengoperasikan secara komersil
Washing Plant sebanyak 7 unit di Karawang, Indramayu, Brebes, Pati, Gresik, Pasuruan dan Sampang	7000 per unit	beroperasi

Tabel 4 Pabrik Pengolahan Kualitas Garam Rakyat untuk Garam Industri Farmasi dan Pabrik Garam CAP dari *Rejected Brine*

Jenis	Inovasi Pabrik	Kapasitas tpy	Progres
CAP	Mini pilot plant pabrik garam CAP dari rejected brine PLTU Suralaya di Banten (BRIN)	750	Telah diresmikan dan akan di <i>scale up</i> menjadi 100.000 tpy
Farmasi	Pabrik pengolah garam farmasi di Watu Dakon (PT Kimia Farma)	2000	Optimalisasi hasil akhir dan dipasrkan pada industri farmasi dalam negeri
	Pabrik pengolah garam pro Analisa di Sentul (PT KDS)	Garam PA: 3 Garam Farmasi: 74	Beroperasi

Selain fokus pada teknologi pengolahan garam rakyat untuk garam industri aneka pangan dan pengeboran minyak, Kemenko Marves juga berkomitmen mendorong pemenuhan garam CAP (*Chlor Alkali Plant*) dan farmasi dari garam lokal. Dua jenis garam ini membutuhkan spesifikasi garam kualitas tinggi dengan rata-rata NaCl di atas 97%. Untuk garam jenis CAP, pemerintah melalui BRIN telah berinovasi membuat *mini pilot plant* garam CAP dari *rejected brine* PLTU Suralaya dengan kapasitas 750 ton per tahun. Sedianya, *mini pilot plant* ini akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 100.000 ton/tahun.



Gambar 33 Produk Garam Pro Analisa PT KDS

Pada garam farmasi, PT KDS telah berhasil mengembangkan industri berskala kecil dengan menghasilkan garam jenis Pro Analisa dan farmasi yang masing-masing berkapasitas 3 ton per tahun dan 74 ton per tahun. Keberadaan industri ini dapat dijadikan sebagai *pilot project* pemerintah untuk melakukan pemenuhan garam lokal untuk industri farmasi. Kebutuhan garam jenis farmasi diprediksikan akan meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan sehubungan dengan adanya kerentanan dunia terhadap wabah virus.

3) Pembentukan Regulasi Hilirisasi Industri Pergaraman Nasional

Ketiadaan payung hukum dan regulasi yang mengikat masing-masing program menjadikan *output* masing-masing instansi tidak tersusun rapih. Oleh karena itu, pemerintah mendorong adanya regulasi tentang pergaraman yang memberikan panduan atau peta jalan terhadap pengembangan pergaraman nasional. RPerpres Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N) merupakan regulasi yang saat ini sedang didorong atas dasar lima permasalahan utama, yakni Pra produksi, Produksi, Pasca Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran.

RPerpres P3N menggunakan konsep intergasi pembangunan hulu dan hilir pergaraman yang merupakan aturan teknis turunan dari UU No 7 Tahun

2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Hingga saat ini, regulasi RPerpres P3N sudah masuk dalam tahap harmonisasi di KemenkumHAM.



Gambar 34 Lahan Garam Indikasi Geografis Amed Salt Bali

21. Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Waduk Multipurpose dan Rekayasa Pantai Bendungan (18 Waduk Multiguna)



Gambar 35 Menko Marves Luhut Meninjau Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

Kegiatan ini merupakan salah satu *Major Project* yang dikawal Kemenko Marves. Program utama *major project* ini adalah Pembangunan Waduk Multiguna dan Pemasangan dan Pengoperasian alat ukur air (*water*

accounting). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 1) berkurangnya total volume tampungan waduk secara nasional sebesar 19% akibat sedimentasi (Pulau Jawa hingga 31%), 2) sekitar 59% bendungan eksisting hanya memiliki fungsi tunggal, terutama untuk irigasi, 3) rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi, 4) semakin tingginya kompetisi air seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama Pulau Jawa. Program ini menargetkan pembangunan 18 waduk multiguna sampai dengan 2024.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya program ini adalah:

- a. Tersedianya tampungan air untuk mereduksi risiko bencana banjir sebesar Rp.12.999,41 m²/detik
- b. Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,48 m²/detik
- c. Tersedianya pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industry yang bersumber dari waduk sebesar 2,437,55 MW
- d. Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan
- e. Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI
- f. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebesar rata-rata 25% di 9 DI

Program ini memiliki indikasi pendanaan sebesar Rp92,9 Triliun, yang meliputi pendanaan dari APBN (Rp12,96 Trilyun), KPBU (Rp20 Trilyun) dan Swasta (Rp 60 Trilyun). Gambaran umum *major project* 18 Waduk Multiguna dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 Gambaran Umum Major Project 18 Waduk Multiguna

Latar Belakang	1. Berkurangnya total volume tampungan sebesar 19% akibat sedimentasi (Pulau Jawa hingga 31%) 2. Sekitar 59% bendungan eksisting hanya memiliki fungsi tunggal, terutama untuk irigasi 3. Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi (tingkat kehandalan jaringan irigasi 70%) 4. Semakin tingginya kompetisi air seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama di Pulau Jawa						
Manfaat	1. Tersedianya tampungan air untuk mereduksi risiko bencana banjir sebesar 12.999,41 m ³ /detik 2. Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,48 m ³ /detik 3. Tersedianya pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri yang bersumber dari waduk sebesar 2.437,55 MW 4. Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan 5. Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukku, DI Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komerang) 6. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebesar rata-rata 25% di 9 DI						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
• Jumlah waduk multiguna yang dibangun	• 0 unit	• 4 unit	• 3 unit	• 2 unit	• 9 unit	• 18 unit (10 APBN, 6 KPBU, 2 SWASTA/BUMN)	Rp 92,9 Triliun APBN: Rp 12,96 Triliun KPBU: Rp 20 Triliun Swasta: Rp 60 Triliun
• Alat ukur air (water accounting) yang terpasang	• 1 DI	• 2 DI	• 3 DI	• 2 DI	• 1 DI	• 9 DI	
Pelaksana	KemenPUPR dan Swasta						
Highlight Proyek	1. Pembangunan waduk multiguna 2. Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting)						

Dalam rangka mengawal program ini Kemenko Marves telah membentuk tim *Delivery Assurance Unit* (DAU) melalui Kepmenko Marves No. 68/2021. Melalui tim ini Kemenko Marves terus melaksanakan koordinasi untuk

mendorong pencapaian target. Progres dari pembangunan beberapa bendungan sebagai berikut:

a. Bendungan Pidekso, Jawa Tengah

Masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek Bendungan Pidekso ini mengalami percepatan setahun dari target sebelumnya pada tahun 202, dimana pada bulan Oktober 2021 telah dilakukan pengisian awal waduk (*impounding*).



Gambar 36 Presiden Joko Widodo Meresmikan Bendungan Pidekso di Jawa Tengah

Bendungan Pidekso yang berkapasitas 25 juta m³ akan mengairi 1.500 ha lahan pertanian di Kabupaten Wonogiri dan akan memenuhi kebutuhan air baku warga Wonogiri dengan kapasitas 300 liter/detik. Bendungan Pidekso juga akan mereduksi debit banjir sekitar 11% dan memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru. Bendungan ini telah diresmikan tanggal 28 Desember 2021.

b. Bendungan Way Sekampung Lampung

Program ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah Lampung yang terfokus pada pemerataan infrastruktur. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan air dan pangan nasional agar dapat memenuhi kebutuhan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Sumber Daya Air (SDA). Bendungan Way Sekampung diharapkan dapat menjaga kontinuitas ketersediaan air di daerah Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional agar terus berproduksi dan meningkatkan produksinya. Bendungan ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi tanggal 2/9/2021. Bendungan Way Sekampung juga terintegrasi dengan dua bendungan lainnya yaitu Bendungan Margatiga di hilir yang akan selesai akhir 2021 dan Bendungan Batutegi yang selesai 2004 silam.

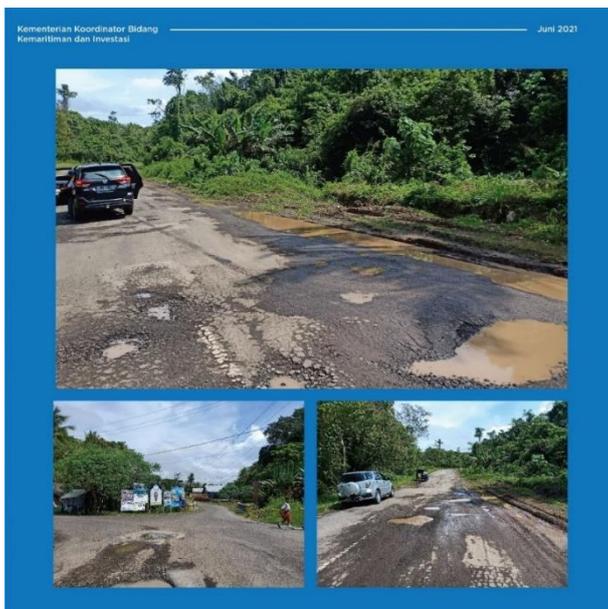
Bendungan ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Irigasi: 48.491 Ha meliputi: daerah irigasi Sekampung Sistem dan pengembangan daerah irigasi Rumbia *Extension* seluas 17.334 Ha.
- 2) Manfaat Air Baku: 0,40 m³/det, memenuhi kebutuhan Kota Bandar Lampung, Branti, Kota Metro dan Kab. Pringsewu.
- 3) Manfaat energi Listrik: 5,40 MW (2 x 2,7 MW) yakni berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM).



Gambar 37 Bendungan Way Sekampung - Lampung

22. Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan *Major Project* pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T)



Gambar 38 Lokasi Pembangunan Jalan di Kab. Sofifi

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh 1) terbatasnya sistem jaringan jalan di pulau-pulau terluar/tertinggal, 2) pulau-pulau terluar/tertinggal sebagian besar belum didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai, 3) kemandapan jalan eksisting di pulau-pulau terluar/tertinggal masih rendah. Pembangunan daerah 3T diharapkan dapat mewujudkan fungsi Pertahanan dan Keamanan (Kedaulatan), Ekonomi (Kesejahteraan), dan Ekologi (Keberlanjutan).

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap program ini, Kemenko Marves mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat untuk terus aktif dalam pencapaian target, antara lain melalui koordinasi dan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Jalan Trans. Ketiga lokasi pelaksanaan tahun 2021 adalah:

- 1) Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu
- 2) Pulau Kei Besar, Provinsi Maluku
- 3) Pulau Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

Dengan tercapainya target program ini pada tahun 2024 diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas
- 2) Meningkatnya produktivitas ekonomi wilayah
- 3) Mendukung percepatan pembangunan di daerah.

Tabel 6 Gambaran Umum Major Project 18 Pulau 3T

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sistem jaringan jalan di pulau-pulau terluar/tertinggal • Pulau-pulau terluar/tertinggal sebagian besar belum didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai • Kemantapan jalan eksisting di pulau-pulau terluar/tertinggal masih rendah 			
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas • Meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah • Mendukung percepatan pembangunan di daerah 			
Durasi	2020-2024 (5 tahun)			
Indikasi Target dan Pendanaan	INDIKASI TARGET			INDIKASI PENDANAAN
	2020-2024		Total Volume	
	Peningkatan/pembangunan jalan Lingkar/Trans Pulau: <ul style="list-style-type: none"> • Simelue • Nias • Mentawai • Enggano • Natuna • Sumba 	<ul style="list-style-type: none"> • Muna • Buton • Aru • Babar • Buru • Seram 	<ul style="list-style-type: none"> • Kei Besar • Selaru • Moa • Wetar • Morotai • Biak 	974,36 km
Pelaksana	Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah			
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan proyek dan lahan 2. Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan 			

a. Jalan Trans Pulau Enggano

Kecamatan Enggano merupakan daerah yang secara geografis sangat terisolasi dan minim infrastruktur konektivitas, sehingga memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Untuk mendorong pencapaian target program ini, pada tahun 2021 Kemenko Marves telah melaksanakan berbagai upaya terkait fungsi Sikondal, seperti melaksanakan survei ke daerah tersebut untuk mengetahui infrastruktur apa dan dimana yang akan dibangun, lebih detail koordinasi tersebut sebagai berikut:

- a) Koordinasi, sinkronisasi dan pengawalan pembangunan jalan trans di 18 Pulau 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)
- b) Webinar alternatif bahan konstruksi pembangunan jalan trans pulau 3T
- c) Koordinasi, sinkronisasi dan pengawalan pembangunan jalan trans Pulau Terluar 3T Pulau Enggano
- d) Koordinasi, sinkronisasi dan pengawalan revitalisasi dan pembangunan Pelabuhan Kahyapu di Pulau Terluar 3T P. Enggano
- e) Koordinasi peningkatan jaringan dari Edge ke 4G di Pulau Terluar 3T Pulau Enggano

Sampai tahun 2021, telah dilakukan revitalisasi dermaga dan perluasan dermaga apung Malakoni di Pulau Enggano. Untuk tahun 2022 Kemenko Marves akan mengkoordinasikan terkait penganggaran peningkatan status jalan nasional.

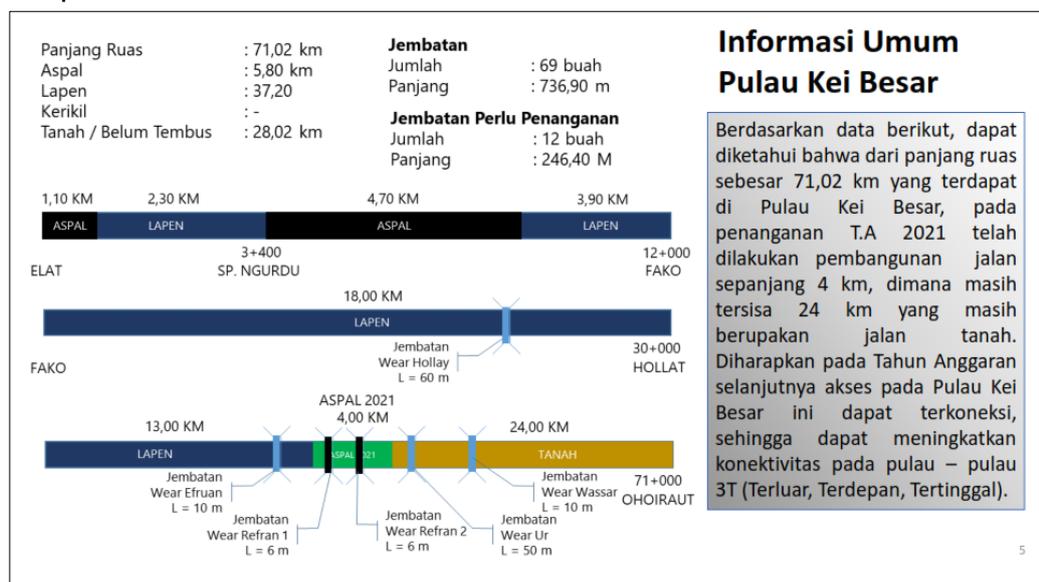


Gambar 39 PPKT Pulau Enggano

b. Jalan Trans Pulau Kei Besar

Kabupaten Maluku Tenggara telah masuk dalam prioritas pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Perpres 33 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku. Dalam hal ini, 4 Kecamatan di Pulau Kei Besar masuk dalam Lokasi Prioritas kawasan perbatasan negara untuk penanganan tahun 2020-2024.

Sampai dengan tahun 2021 pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar baru realisasi sepanjang 10,45 Km atau sebesar 10,28%. Kebutuhan akan penanganan Jalan Trans Pulau Kei Besar adalah kebutuhan riil dan mendesak guna mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, perekonomian dan pelayanan publik di wilayah perbatasan negara dan pulau kecil terluar.



Gambar 40 Progres Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar

c. Jalan Trans Pulau Mentawai

Kondisi geografis Kepulauan Mentawai didominasi oleh kawasan hutan, yakni mencapai lebih dari 80 persen luas wilayahnya. Mengacu pada kebijakan nasional, Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai daerah pulau-pulau kecil dan terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, juga sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020.

Sampai tahun 2021, 90 persen dari trase jalan di lintas Timur, yakni sejauh 188,2 kilometer telah dibuka. Sedangkan di lintas barat sedang dalam tahap pengusulan untuk dibangun jalan dari Desa Peipei ke Labuhan Bajau sepanjang 208,56 kilometer. Dari total 393,2 Km panjang jalan Trans Mentawai, hingga saat ini sudah berhasil dibuka sepanjang 354,30 Km, dengan 95,20 Km dalam kondisi sudah perkerasan. Lalu sekitar 259,10 Km belum perkerasan dan yang belum terbuka sepanjang 38,90 Km.

Kemenko Marves akan terus mengkoordinasikan pembangunan Jalan Trans Mentawai di sisi barat Pulau Siberut. Ruas jalan yang dimaksud adalah Sigapokna-Labuhan Bajau sepanjang 18,4 kilometer, Sigapokna-Simalegi sepanjang 69,92 kilometer, Simalegi-Simatalu sepanjang 21,3 kilometer, Simatalu-Sagalubek sepanjang 50,04 kilometer, dan Sagalubek-Taileleu sepanjang 48,61 kilometer.



Gambar 41 Skema Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Trans Mentawai

23. Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi Infrastruktur Pasca Bencana (Semarang-Demak)

Kegiatan Pengamanan Pesisir 5 (lima) Perkotaan Pantura Jawa merupakan *major project* RPJMN 2020-2024 (nomor 27). Program ini bertujuan untuk penanganan pesisir yang mengalami banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah. Program ini dilaksanakan di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, Demak dan Cirebon. Program ini melibatkan KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta).

Pengaman Pesisir Pantura Jakarta, ditargetkan akan dibangun sejauh 7,25 km. Program ini merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau dikenal dengan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) merupakan sebuah program yang terintegrasi dalam mengatasi permasalahan di pesisir utara Jakarta. Program ini dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Tim Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.

Jalan Tol Semarang – Demak akan dibangun sepanjang 11,5 km. Selain itu juga akan dilaksanakan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, *break water*, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pantura Jawa. Untuk pembangunan Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak diperlukan sebanyak 9-10 juta m³ material timbunan. Lokasi pengambilan material timbunan sudah ditentukan, namun masih membutuhkan kajian. Rencana lokasi pengambilan sampel pembangunan diantaranya zona U6-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Lampung; zona U6-2 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; zona U6-3 yang berada di sebagian perairan Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung; zona U6-4 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat; dan zona U6-5 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Bawean Provinsi Jawa Timur.



Gambar 42 Koordinasi dalam Percepatan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dan Pengamanan Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah ke Setda Prov. Jawa Tengah

Beberapa hal yang harus dikoordinasikan Kemenko Marves lebih lanjut adalah:

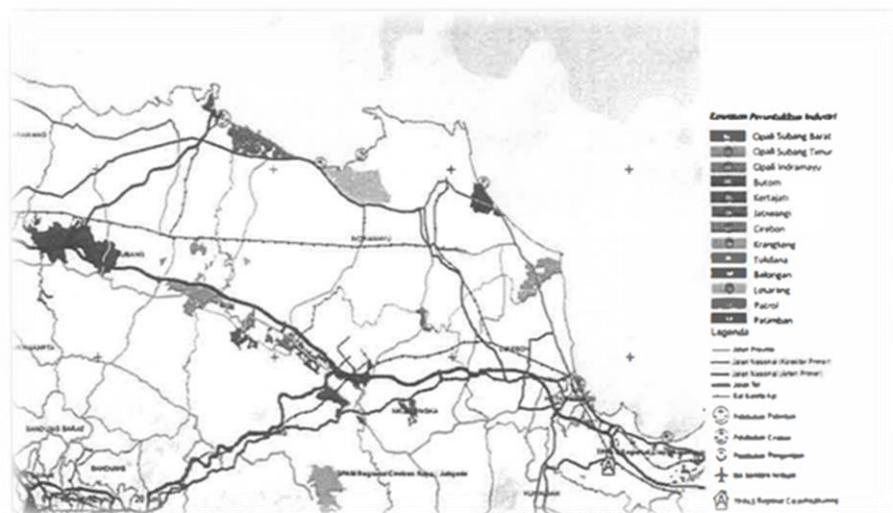
- 1) Pelaksanaan kajian kesesuaian ruang sebagai landasan alokasi pola ruang laut untuk kegiatan pertambangan

- 2) Pengusulan area lokasi kegiatan pengambilan bahan timbunan (pasir laut) yang merupakan bagian vital menunjang Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk masuk dalam daftar PSN
- 3) Mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perubahan Dan Penyesuaian Zonasi Ruang Laut.

24. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jawa Barat Selatan

Disparitas yang terjadi di Jawa Barat menjadi jurang pemisah (gap) dan kesenjangan spasial antara wilayah maju (*developed region*) dan wilayah tertinggal (*under developed region*). Angka kesenjangan (*gini ratio*) mewarnai proses pembangunan di Jawa Barat yang sedang berlangsung dan adanya indikasi bahwa pembangunan di Jawa Barat belum merata. Dimana Jawa Barat mencapai 0.398% dan selalu berada di atas angka nasional 0,385%. Jawa Barat juga mempunyai wilayah geografis yang berbeda antara barat, timur, utara dan selatan. Dengan berbagai karakteristik yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan yang terjadi terutama kesenjangan/disparitas pembangunan yang terjadi.

Pada tahun 2021, Kemenko Marves berhasil mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tanggal 10 September 2021. Selain itu Kemenko Marves juga berhasil mengkoordinasikan penyelesaian *debottlenecking* yang ada dalam pelaksanaan Perpres 87/2021 serta mendampingi daerah dalam pelaksanaan Perpres.



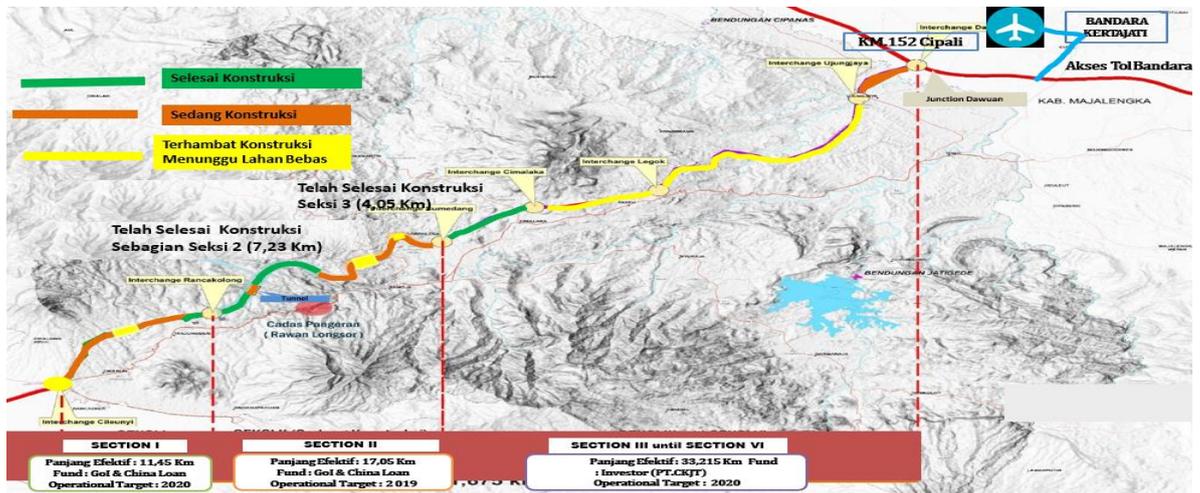
Gambar 43 Titik Pengembangan Kawasan Rebana

Beberapa hal yang harus dikoordinasikan Kemenko Marves lebih lanjut adalah :

- a. Koordinasi Rencana Aksi dan Pendampingan Tindak Lanjut Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan
- b. Koordinasi bersama semua pemangku kepentingan terhadap penyelesaian *bottlenecking* yang ada pada rencana aksi Perpres 87/2021
- c. Pendampingan tindak lanjut pada pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan yang terlampir pada rencana aksi Perpres 87/2021

25. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Nasional

Sesuai dengan penugasan khusus Presiden Joko Widodo ke Menko Marves terkait Percepatan Major Project/Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Pulau Terluar, Terdepan dan Tertinggal (Pulau 3T) dan Jalan Tol Nasional, Kemenko Marves bertugas mengawal dan mengkoordinasikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Jalan Tol Cismudawu dan Jalan Tol Trans Sumatera.



Gambar 44 Profil Ruas Jalan Tol Cismudawu

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum merupakan suatu bagian dalam proses pembangunan yang pada dasarnya merupakan pengambil alihan hak atas tanah milik seseorang atau masyarakat guna dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas dan dapat dinikmati oleh banyak orang dan memiliki fungsi sosial. Lahan merupakan modal dasar jalan tol perlu dilakukan percepatan dalam pengadaan tanah baik tanah masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol, tanah kas desa, tanah wakaf, serta berbagai terobosan yang diperluarkan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan koridor hukum yang berlaku.

Jalan Tol Cismudawu merupakan kunci aktifnya Bandara Kertajati dan sebagai sumber kemajuan di Provinsi Jawa Barat. Meskipun pemerintah di tingkat pusat telah mengeluarkan kebijakan yang positif tentang infrastruktur, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kendala di lapangan. Sedangkan jalan tol Trans Sumatera tujuannya untuk menciptakan konektivitas dan

menghubungkan sebanyak mungkin kota-kota lain di Pulau Sumatera sehingga menciptakan pertumbuhan bagi daerah-daerah baru.

a. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-2

Jalan Tol Cisumdawu yang melintasi Cileunyi-Sumedang dan Cirebon daerah Dawuan. Jalan ini, merupakan lanjutan rencana tol dari arah Selatan yang menyabungkan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Cileunyi, yang nantinya akan bertemu dengan tol dari arah Utara Cikampek-Palimanan Cirebon daerah Dawuan. Pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan dan mempercepat akses perjalanan ke wilayah-wilayah terdekat, khususnya kota Bandung dan Cirebon. Tol Cisumdawu menjadi salah satu elemen pendukung dalam rangka mendukung operasional Bandara Kertajati yang tentu akan berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah dan peningkatan nilai investasi.



Gambar 45 Tinjauan Lapangan ke Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 1-2

Pembangunan jalan tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari keenam seksi, seksi 1 dan seksi 2 merupakan tanggung jawab pemerintah dengan total ruas jalan sepanjang 28,50 Km. Sedangkan untuk seksi 3 sampai seksi 6 merupakan tanggung jawab Badan Usaha

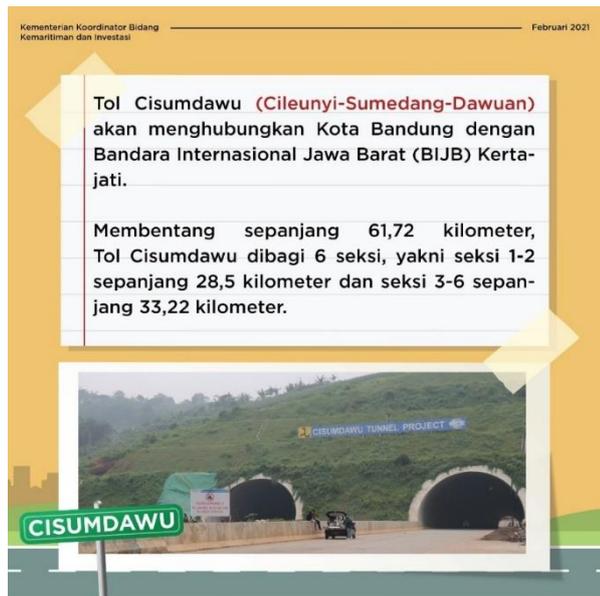
Jalan Tol (BUJT) dengan total ruas jalan sepanjang 33.21 Km.

Seksi 1 merupakan ruas jalan antara Cileunyi - Rancakalong sepanjang 11,45 Km, dengan total investasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seksi 1 sebesar Rp 2,7 Triliun. Progres pembangunan Kontruksi telah mencapai 100% sedangkan progres pembebasan lahan telah mencapai 99.29%. ruas Cileunyi - Pamulihan seksi 1 telah diresmikan dan beroperasi sejak tanggal 24 Januari 2022.

Seksi 2 merupakan ruas jalan antara Rancakalong - Sumedang sepanjang 17.05 Km, dengan total investasi sebesar Rp 5.6 Triliun. Proses pembebasan lahan pada seksi 2 telah mencapai 98,65% dengan proses konstruksi 96,45%. Ditargetkan seksi 2 akan beroperasi pada Agustus 2022.

Selama proses pembangunan Jalan Tol Cisumdawu pada Seksi 1 dan Seksi 2, beberapa kendala telah dapat diselesaikan melalui

serangkaian koordinasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenko Marves, yaitu:



Gambar 46 Infografis Jalan Tol Cisumdawu

1) Hambatan urusan administrasi terkait proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah.

2) Perbedaan nilai di SK Gubernur TKD Srimulya dan Jatihurip.

3) Sengketa Blok Kopeng *main road* di Desa Cilayung.

4) Penolakan dari Kepala Desa Jatihurip atas pembongkaran sembilan bangunan hantu di Desa Sinarmulya.

5) Permohonan appraisal ulang ke Kanwil atas TKD dan tanah wakaf dengan melakukan permohonan ulang.

6) Pengajuan komplain dari Warga Sinarmulya dan Mulyasari terkait dampak pembangunan Tol Cisumdawu.

Upaya untuk mengatasi kendala dimaksud dilakukan oleh Kemenko Marves melalui serangkaian kegiatan dan kebijakan berikut ini;

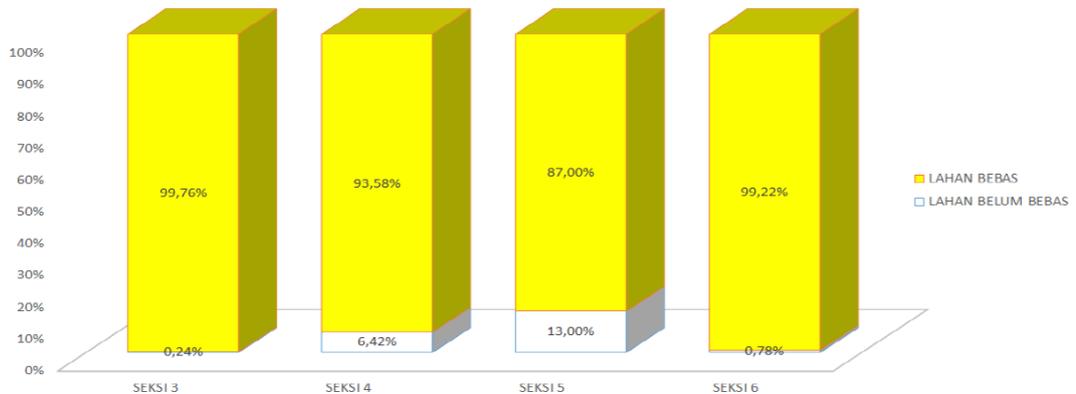
- 1) Mendorong percepatan perbaikan nilai yang tertera pada SK Gubernur.
- 2) Koordinasi dengan Polres Sumedang terkait surat permohonan pengamanan dari Kemendagri.
- 3) Fasilitasi antara pihak Wika dengan para pemilik dalam upaya persuasif dengan menawarkan kerohiman dari Wika, namun pemilik bangunan tetap menolak.
- 4) Koordinasi terkait terbitnya Surat petunjuk dari Dirjen ATR/BPN tentang penilaian ulang dan menunggu permohonan dari Kemenag dan Pemda setempat.
- 5) Mendorong P2T dan PPK untuk melakukan pembahasan terkait tanah terdampak.

b. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 3-6

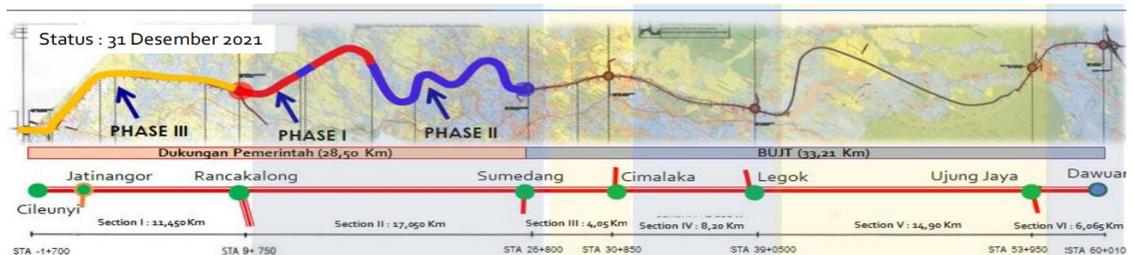
Pembangunan Tol Cisumdawu seksi 3-6 merupakan ruas jalan antara Sumedang-Dawuan dengan panjang ruas jalan 33,21 km. Pembangunan jalan tol ini menjadi tanggung jawab dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Adapun capaian hasil dari koordinasi Kemenko Marves pada seksi 3-6 sebagai berikut:

Grafik 4 Progres Lahan Tol Cisumdawu Seksi 3-6



Gambar 47 Resume Progres Lahan dan Konstruksi Seksi 3-6



Seksi	Panjang (km)	Kontraktor Pelaksana	Progres Tanah Bebas (%)	Progres Konstruksi (%)			Target Konstruksi Selesai	Ket	
				Rencana	Realisasi	Deviasi			
Konstruksi oleh BUJT									
Seksi 3: Sumedang – Cimalaka	4,05	3	PT. Girder Indonesia	99,76	100	0	selesai		
Seksi 4: Cimalaka – Legok	8,2	4A :	PT. Wijaya Karya	93,58	-	20,15	-	Agustus 2022	Masih proses penyelesaian tender untuk penyusunan kurva-s
		4B :	PT. Brantas Abipraya		-	2,53	-	Agustus 2022	
Seksi 5: Legok – Ujung Jaya	14,9	5A :	PT. Adhi Karya Persero	87	-	26,86	-	Agustus 2022	
		5B :	PT. Girder Indonesia		73,00	60,03	-12,97	Agustus 2022	
Seksi 6: Ujung Jaya – Dawuan	6,065	6A :	PT. Girder Indonesia	99,22	93,67	84,35	-9,32	Maret 2022	
		6B :	PT. Brantas Abipraya		99,10	97,16	-1,94	Maret 2022	
- Juntion Dawuan		Jc :	PT. PP		97,85	90,35	-7,50	Maret 2022	

Berdasarkan gambar di atas, Seksi 3 yakni ruas Sumedang-Cimalaka dengan panjang 4,05 km, progres pembebasan lahan telah mencapai 99,76% dengan proses konstruksi yang telah mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi dalam ruas jalan ini ialah karena adanya 3 bidang lahan yang belum bebas sehingga diperlukan perubahan penetapan lokasi (penlok) untuk pembebasan lahan tambahan Tapper Cimalaka.

Seksi 4 yang merupakan ruas jalan tol Cimalaka-Legok sepanjang 8,2 km, Progres pembebasan tanah sebesar 93,58%. Kontruksi Seksi 4 di bagi menjadi 2 Sub Seksi yang Seksi 4A dan Seksi 4B dengan realisasi fisik berturut-turut 20,15% dan 2,53%.

Seksi 5 yang merupakan ruas jalan tol Legok-Ujung Jaya sepanjang 14,9 km telah mencapai progres pembebasan lahan sebesar 87%

sedangkan realisasi proses konstruksi seksi 5A mencapai 26,86% dan pada seksi 5B 60,03%. Proses konstruksi pada seksi 4 maupun seksi 5 ditargetkan akan selesai pada Agustus 2022.

Seksi 6 yang merupakan ruas jalan tol Ujung Jaya - Dawuan sepanjang 6.065 Km telah mencapai progres pembebasan tanah sebesar 99,22% dengan realisasi konstruksi pada seksi 6A mencapai 97,16% dan pada seksi 6B sebesar 90,35%. Proses konstruksi pada seksi 6 ini ditargetkan akan selesai pada Maret 2022.

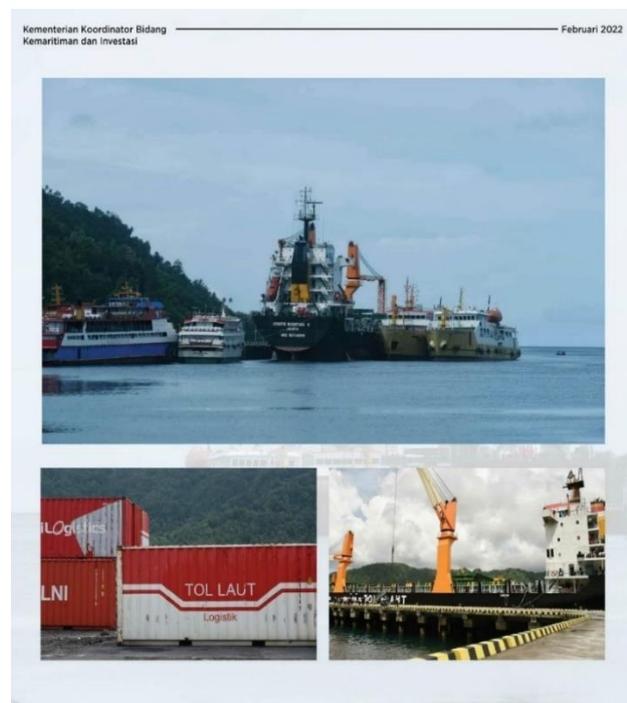
Adapun beberapa permasalahan saat pelaksanaan kegiatan sebagai permasalahan lahan, perubahan penetapan lokasi. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

26. Koordinasi Kebijakan Program Tol Laut

Program tol laut dimaksudkan untuk penurunan disparitas harga yang bertujuan menjamin ketersediaan barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah Tertinggal, Terpinggirkan, Terluar, dan Perbatasan (3T). Sebagaimana arahan Presiden, Program ini perlu diakselerasi pelaksanaannya.

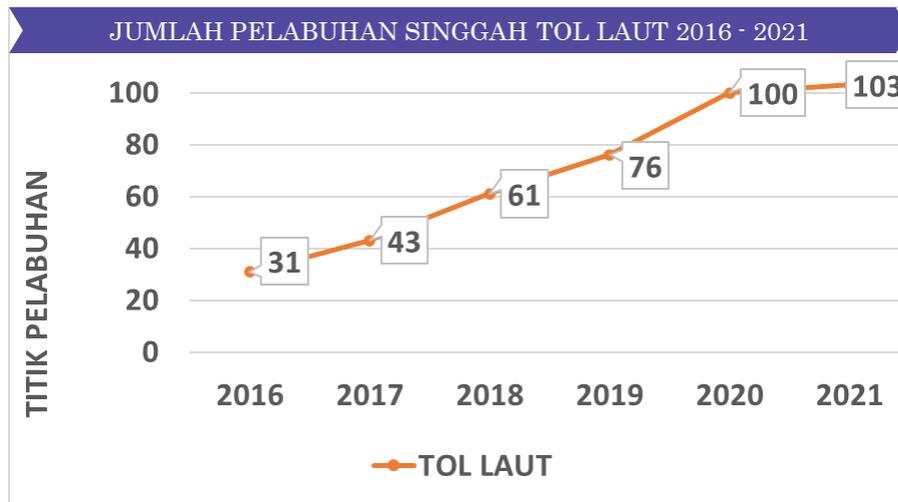
Sebagai bentuk tindak lanjut arahan akselerasi tersebut, Kemenko Marves berhasil mengkoordinasikan terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017

menjadi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpinggirkan, Terluar, dan Perbatasan. Perpres revisi ini memberikan kebijakan dalam proses satu kesatuan konektivitas antar moda yang melibatkan keseluruhan aspek dari Kementerian Perhubungan (dirjen perhubungan laut, darat dan udara) yang sebelumnya hanya terfokus pada dirjen perhubungan laut saja.

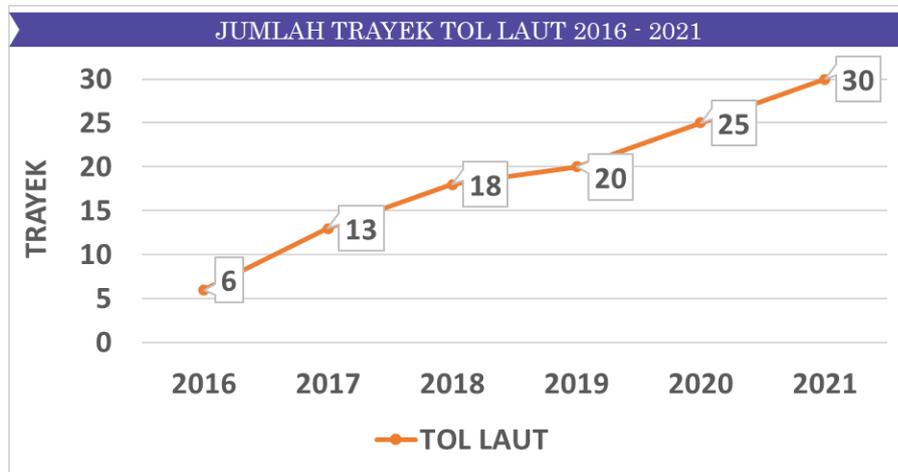


Gambar 48 Sarana Program Tol Laut

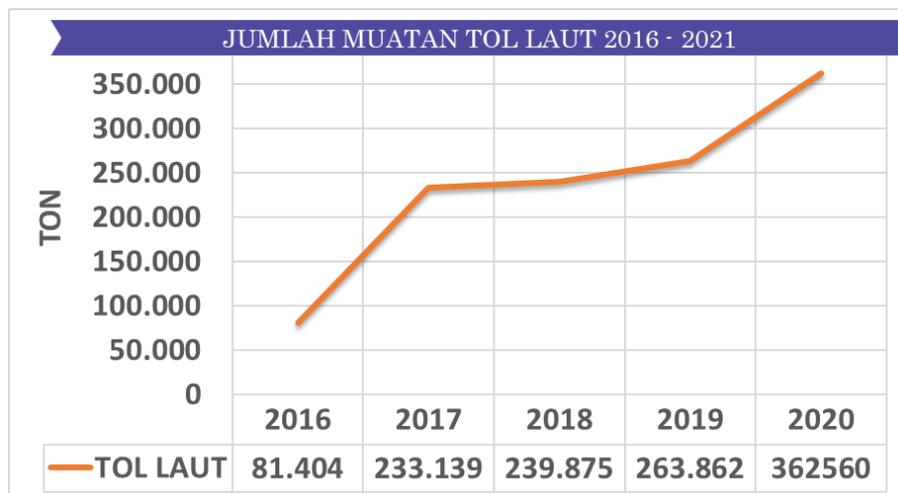
Grafik 5 Jumlah Pelabuhan Singgah Tol Laut 2016-2021



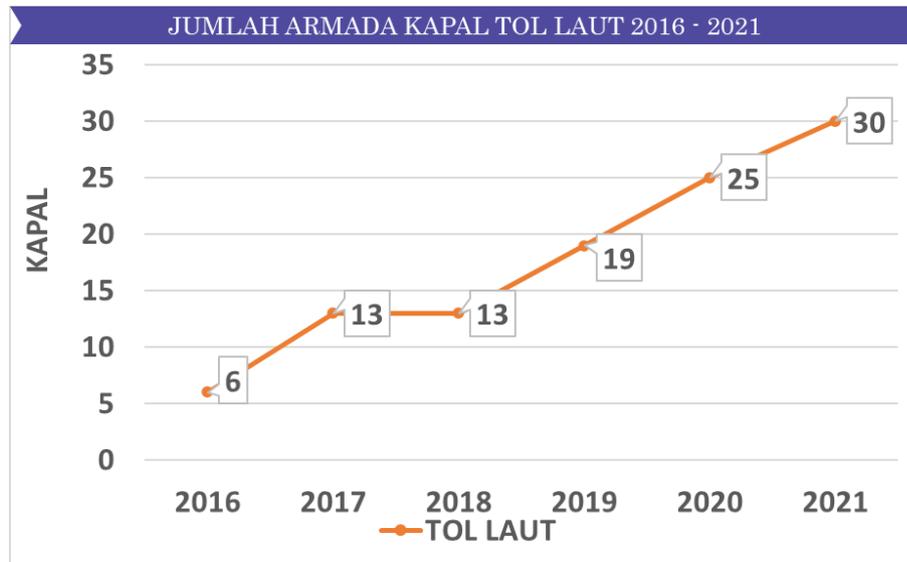
Grafik 6 Jumlah Trayek Tol Laut 2016-2021



Grafik 7 Jumlah Muatan Tol Laut 2016-2021



Grafik 8 Jumlah Armada Kapal Tol Laut 2016-2021



Tol laut mencakup 30 trayek pada tahun 2021 dan 103 pelabuhan singgah, yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah terkait konsolidasi muatan balik kapal tol laut. Hal ini masih memerlukan sinergi dan kolaborasi antara K/L terkait, dan pemerintah daerah serta memerlukan dorongan penentuan produk unggulan daerah dan efektivitas trayek tol laut, karena sampai saat durasi pengiriman barang masih terlalu lama bagi pelaku usaha di daerah.

Kebijakan yang dirumuskan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi terutama ditujukan untuk memberikan dukungan koordinasi kebijakan dan fasilitasi terkait:

- a. Penurunan disparitas harga barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistik antarmoda transportasi.
- b. Mempercepat penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar.

Sebagai upaya mendorong pencapaian target, beberapa hal yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Koordinasi lintas sektor dalam mencapai sinergi dan kolaborasi muatan balik tol laut terutama dengan K/L yang memiliki potensi produk unggulan daerah dan fasilitas Gudang.
- b. Koordinasi dengan pihak Kementerian Kominfo dalam mendukung penyediaan jaringan internet di area pelabuhan singgah tol laut dan sentra logistik daerah.
- c. Penyusunan kebijakan *multiyears* anggaran tol laut untuk menghindari permasalahan operasional kapal di awal dan akhir tahun anggaran.

- d. Pembentukan gugus tugas pengawasan tol laut dengan beranggotakan K/L terkait dengan diketuai oleh Menko Maritim dan Investasi merupakan hasil dari mandat Perpres 27 Tahun 2021
- e. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian terkait kolaborasi tol laut dan National Logistic Ecosystem (NLE) sehingga tol laut dapat membantu perdagangan antar pulau di Indonesia.



Gambar 49 Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Pelabuhan

Regulasi dan kebijakan dari setiap sektor sangat perlu untuk dikoordinasikan serta disinkronisasi guna menjamin dukungan pemerintah dan seluruh *stakeholder* terkait untuk ikut serta dalam membantu upaya pemerintah dalam rangka pengendalian program tol laut sebagai pendukung pemerataan logistik nasional.

27. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Kota Baru Sofifi

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Ditetapkan tanggal 4 Oktober 1999) dan UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohnore di Provinsi Gorontalo (Ditetapkan tanggal 25 Februari 2003). Di dalam UU tersebut sudah disebutkan secara jelas bahwa Sofifi menjadi ibukota sebagai jalan tengah diantara Ternate dan Tidore, Pengembangan Kota Sofifi juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 dan merupakan *major project*.

Setelah bertahun-tahun ibukota ini tidak segera berpindah. Pembangunan sejumlah infrastruktur oleh pemda sudah dilakukan, membangun kantor-kantor mulai kantor gubernur, pengadilan tinggi, polda, korem dan sekitar 400 perumahan, namun karena ketidaksiapan sarana prasarana secara lengkap sehingga permasalahan ini belum selesai.

Rencana pengembangan Kota Sofifi sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 50 Rencana Pengembangan Kota Baru Sofifi

Dalam konteks koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah, Kemenko Marves mempunyai kewajiban dalam mengkoordinasikan *debottlenecking* pengembangan Kota Sofifi ini. Pada tahun 2021, telah disepakati rencana pelaksanaan pembangunan Kota Sofifi yaitu:

- a. Telah dihasilkan keputusan bahwa pelaksanaan pembangunan menggunakan mekanisme pendanaan dengan komposisi 83,06 % APBN, 16,91 % APBD, dan 0,03% swasta.
- b. Kesanggupan K/ L dalam mendukung pembangunan Kota Sofifi.
- c. Komitmen Pemda terkait kesiapan lahan eksisting 243,41 ha dan kesiapan anggaran pengadaan lahan di tahun 2022 sebesar Rp15 Miliar.

Hal-hal yang perlu didorong Kemenko Marves selanjutnya adalah:

- a. Percepatan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Sofifi.
- b. Memastikan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memasukkan bantuan teknis penyusunan RDTR Kota Sofifi di tahun 2022.
- c. Percepatan Penyusunan Regulasi Draft Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kota Sofifi dengan penajaman materi antara Kemendagri, Kemenko Marves, K/L terkait, serta Pemda

28. Koordinasi Kebijakan Pengembangan 9 Kawasan Industri (KI Batang)

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan salah satu amanat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Beberapa industri yang akan didirikan di kawasan seluas 3.100 hektar tersebut, antara lain industri makanan dan minuman; industri teknologi informatika dan elektronik; industri kimia; industri tekstil dan baterai; industri riset dan pengembangan juga komersial; serta industri otomotif dan UMKM Jawa Tengah.

Kawasan industri ini perlu dilengkapi infrastruktur pendukung. Infrastruktur dimaksud adalah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), pembangunan

jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terintegrasi, serta pembuatan jaringan perpipaan air limbah.

Sampai tahun 2021, pembangunan jalan sepanjang kawasan telah mencapai 47,242 KM. Pembangunan dilanjutkan dengan pematangan lahan tahap kedua yaitu 2.650 ha serta proses pembangunan transmisi gas ruas Semarang – Batang yang telah masuk dalam APBN 2022.

Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain curah hujan yang tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir di beberapa lokasi pekerjaan, pembebasan lahan yang belum sepenuhnya tuntas, dan proses pematangan lahan. Selain itu, pembatasan angkutan barang yang melewati tol saat periode Nataru (23 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022) juga menghambat pelaksanaan pekerjaan.



Gambar 51 Kunjungan Menko Marves Luhut ke Kawasan Industri Batang – Jawa Tengah

29. Koordinasi Kebijakan Industri Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan serta komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas kaca. Landasan legal percepatan program ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

Kemenko Marves yang memiliki tugas mengkoordinasikan industri maritim dan transportasi, telah mengkoordinasikan pencapaian target program ini. Beberapa hasil yang telah dicapai antara lain:

a. Peraturan Turunan dan Kebijakan Strategis di Tingkat Pusat yang telah diterbitkan pada Tahun 2021, yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian, dan Penatausahaan Pembebasan dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia Nomor 973/2894/SJ tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

7) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3293 Tahun 2021 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sepeda Motor Konversi dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;

b. Peraturan Turunan dan kebijakan strategis di tingkat daerah yang telah diterbitkan pada Tahun 2021, yaitu:

1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;

2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagai dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

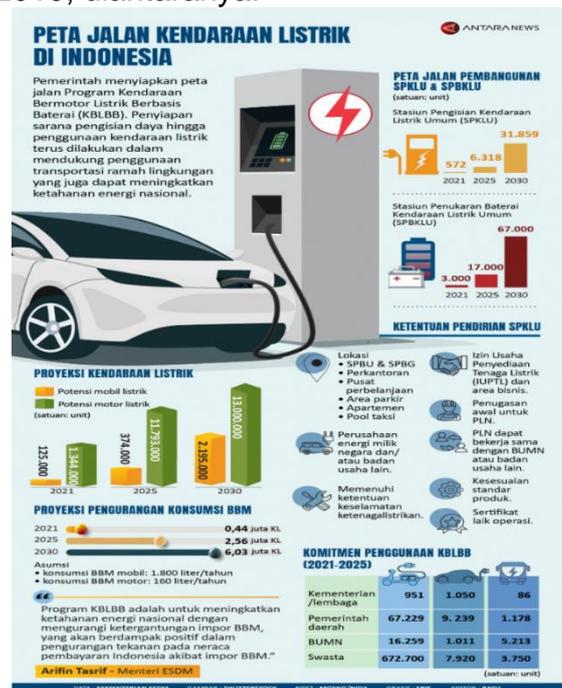


Gambar 52 Ilustrasi Program Mobil Listrik

- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Tahun 2021;
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- f. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- h. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- j. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- k. Penyusunan Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum Angkutan Jalan;
- l. Kebijakan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, meliputi:
 - 1) *Launching pilot project* konversi 100 unit KBLBB roda dua oleh Menteri ESDM, pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - 2) Penyusunan kebijakan di K/L terkait dalam rangka mendukung implementasi program konversi KBL BB roda dua, diantaranya melalui penyusunan Peraturan terkait Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sepeda Motor Konversi.

Tindak lanjut jangka panjang terkait Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Program Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai adalah sebagai berikut:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan turunan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, diantaranya:
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai penyusunan Penggunaan KBLBB di lingkup K/L/PD/BUMN/D
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sosialisasi dan perluasan program konversi sepeda motor untuk mendukung target *Grand Strategi Energi Nasional (GSEN)* sepeda motor konversi sebanyak enam juta unit pada Tahun 2025.
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai infrastruktur pengisian listrik (SPKLU dan SPBKLLU) serta pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai kesiapan dukungan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.



Gambar 53 Infografis Peta Jalan Kendaraan Listrik di Indonesia

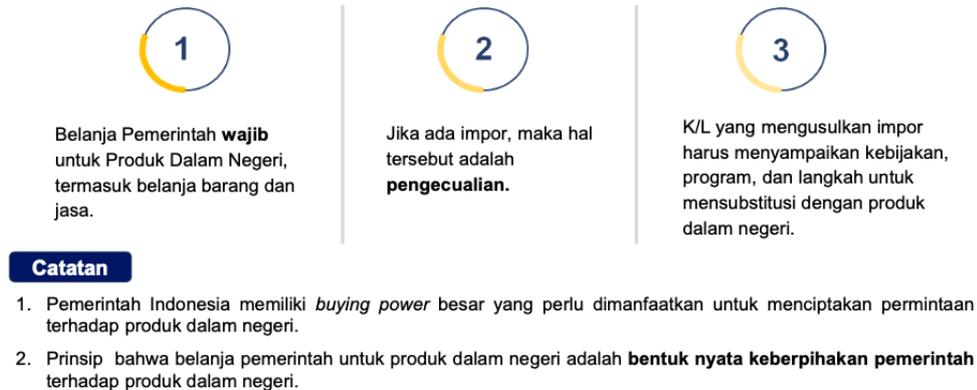
30. Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Program P3DN merupakan program yang bertujuan memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang dimaksud produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menetapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Ketua Tim Nasional P3DN.

Salah satu bagian dari program ini adalah Aksi Afirmatif Produksi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dalam aksi ini belanja pemerintah diwajibkan untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa.

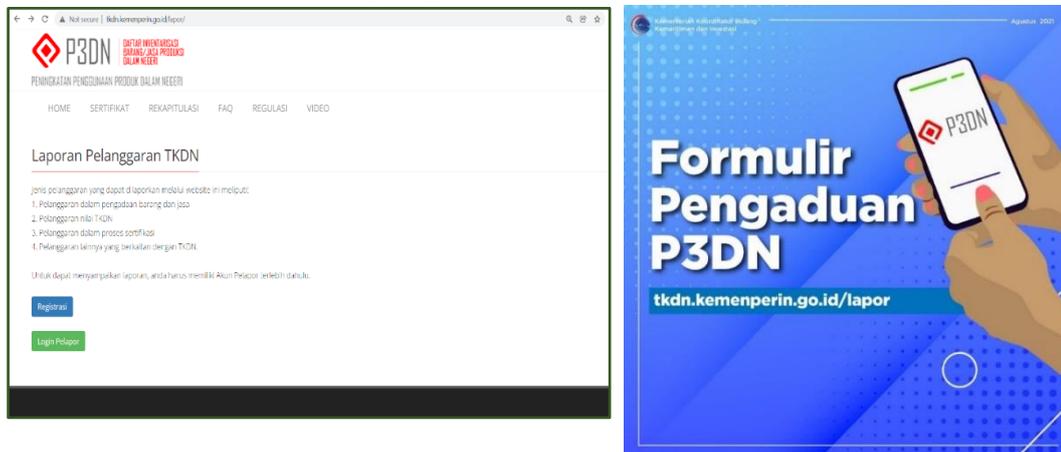
Prinsip Utama Aksi Afirmatif bagi Produk Dalam Negeri



Gambar 54 Prinsip Utama Aksi Afirmatif bagi Produk Dalam Negeri

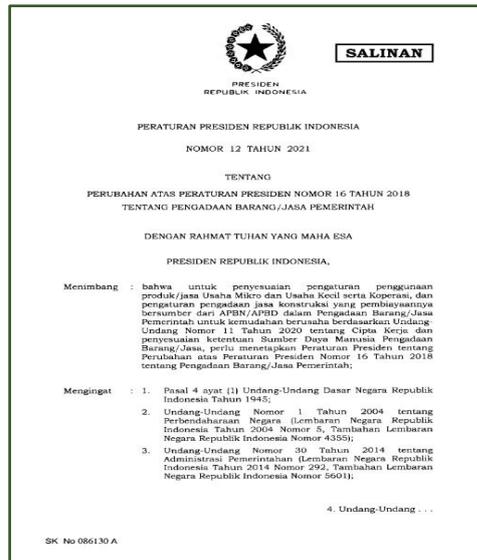
Capaian Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proyek Prioritas, pada sektor:
 - 1) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - 2) Ketenagalistrikan, melalui pemantauan pada Pembangkit Energi Baru Terbarukan PLN.
 - 3) Minyak dan gas, melalui pemantauan pada proyek RDMP Balikpapan, Lawe-Lawe dan *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban;
 - 4) Farmasi dan Alat Kesehatan, melalui pembekuan produk impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
 - 5) Permesinan.
 - 6) Infrastruktur, melalui pemantauan di proyek Pelabuhan Patimban.
- b. Integrasi Sistem P3DN, melalui pengembangan sistem pengaduan <http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/> dan integrasi awal dengan sistem LKPP agar Produk berTKDN tayang di e-katalog;



Gambar 55 Sistem Pengaduan melalui laman <http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/>

- c. Harmonisasi Kebijakan P3DN melalui penyelesaian Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Gambar 56 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- d. Program Sertifikasi TKDN Gratis, dengan dorongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah diterbitkan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA 999.08) untuk pembiayaan sertifikasi TKDN Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebanyak 10.000 sertifikat, dengan capaian sebanyak 990 sertifikat pada Tahun 2020 dan 10.417 sertifikat pada Tahun 2021, total sebanyak 11.407 sertifikat atau 114,07% dari target;
- e. Mendorong pembentukan Tim P3DN di seluruh K/L/PD/BUMN;
- f. Penandatanganan Nota Kesepahaman P3DN antara Pertamina Hulu Energi dan *The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA), pada tanggal 2 September 2021;



Gambar 57 Nota Kesepahaman antara Pertamina Hulu Energi dan *The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (IISIA)

- g. Tersusunnya Draft Revisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN dan sampai akhir tahun 2021 masih dalam proses.
- h. Draft revisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN.

Beberapa pokok permasalahan terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) saat ini, diantaranya:

- a. Daftar barang ber-TKDN belum digunakan sebagai acuan tunggal oleh seluruh K/L;
- b. K/L masih memiliki definisi dan daftar produk dalam negerinya sendiri;
- c. Tim P3DN belum terbentuk secara lengkap di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Badan Usaha lainnya;
- d. Dorongan K/L/PD/BUMN/BUMD/Badan Usaha untuk mengedukasi vendor mitra untuk mensertifikasi produknya belum optimal;
- e. Sistem informasi dalam pengajuan impor barang sudah menggunakan sistem *online* namun belum terintegrasi dengan Sistem P3DN di Kementerian Perindustrian sehingga seringkali terjadi impor barang yang masuk dalam kategori barang wajib;
- f. *E-catalogue* belum disinergikan dengan produk dalam negeri bersertifikat TKDN, masih dalam tahap Perjanjian Kerjasama (PKS). Produk impor masih mendominasi tampilan pada *e-catalogue*.

Tindaklanjut jangka panjang terkait koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan implementasi P3DN serta harmonisasi kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 pada sektor energi (PLN dan Pertamina), Alat Kesehatan, dan pengadaan TIK di Kemendikbudristek sejak tahap perencanaan;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sistem P3DN agar perencanaan, pelaporan, pemantauan dilakukan secara terintegrasi Sosialisasi sistem pengaduan dan penambahan user bagi BUMN.
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai pembinaan industri dalam negeri;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi program lanjutan sertifikasi TKDN gratis tahun 2022 untuk mendorong program substitusi impor 35%;
- e. Mendorong pembentukan Tim P3DN di seluruh K/L/PD/BUMN;
- f. Mendorong penyesuaian Regulasi K/L/BUMN yang terkait P3DN wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;
- g. Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kelompok Kerja Tim Nasional P3DN.

31. Koordinasi Kebijakan Pemanfaatan Sampah Menjadi Sumber Energi Baru



Gambar 58 Infografis Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik

Tahun 2021 timbunan sampah secara nasional sebesar 22.777.943,29 ton/tahun, sedangkan pengurangan sampah yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait mencapai 3.181.606,67 ton pertahun (13,97%) dan yang sampah yang telah ditangani sebesar 11.294.837,21 ton/tahun (45,59%). Untuk sampah yang terkelola sebesar 14.476.443,88 ton/tahun (63,55%). Sampah yang tidak terkelola sekitar 8.301.499,41 ton/tahun (36,45%). Kemenko Marves berupaya untuk terus melakukan koordinasi untuk penanganan sampah yang tidak terkelola dengan pihak terkait, baik itu

K/L teknis, pemda maupun masyarakat.

Total produksi sampah kota di Indonesia mencapai 68,8 juta per tahun. Berbagai tempat pembuangan akhir di beberapa kota/kabupaten telah penuh dan bahkan melebihi kapasitas yang ada, pemerintah telah memiliki berbagai kebijakan yang komperhensif. Dalam rangka memaksimalkan kebijakan ini, diperlukan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak.

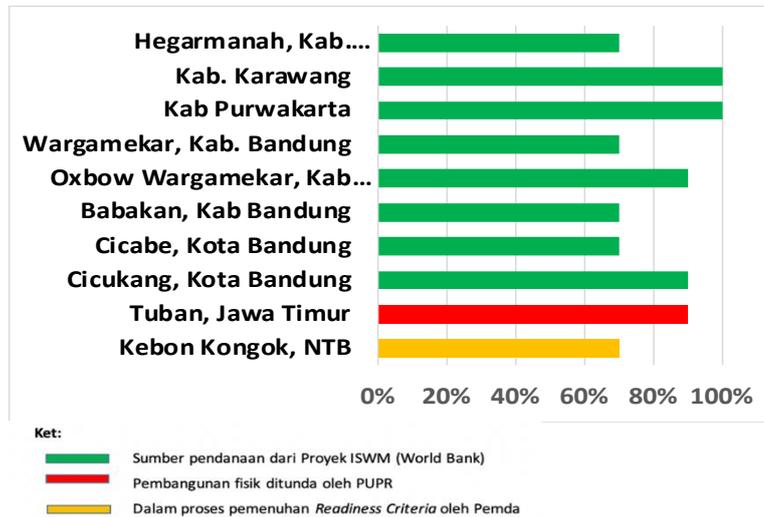
Guna mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lokasi TPA, Kemenko Marves mendorong pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah terpadu melalui pengimplementasian teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) di 10 lokasi. Teknologi RDF yang mengubah sampah menjadi substitusi bahan bakar batu bara merupakan salah satu solusi inovatif dalam mengelola sampah sesuai konsep *Zero Waste* melalui kegiatan mengubah sampah menjadi energi (*waste to energy*).

Progres capaian program prioritas pengelolaan sampah sampai dengan akhir tahun 2021 sudah mencapai 80%, berikut adalah capaian kerja Kemenko Marves dalam pengelolaan sampah sepanjang tahun 2021:

- a. Pengendalian untuk penanganan sampah di Sarbagita-Bali, Kemenko Marves mengkoordinasikan dalam penyusunan strategi sebagai antisipasi penutupan TPA Suwung.

- b. Mendorong percepatan pembangunan 10 TPST/TPS RDF yang berada di Cicukang Bandung, Wargamekar Bandung, Purwakarta, Kabupaten Karawang, Ex-TPA Cicabe Bandung, Ex-TPA Babakan Bandung, Hegarmanah, Tuban Jawa Timur, dan Kebon Kongok NTB.

Grafik 9 Daya Tampung Sampah Lokasi 10 TPST/TPS RDF



- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan Perpres 97/2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. Pengendalian atas Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Capaian tahun 2021 atas kegiatan penanganan sampah laut sebesar 60,98%* yaitu dari rencana 42 kegiatan realisasi 25 kegiatan.

Grafik 10 Capaian Kegiatan Tahun 2021



- e. Mendorong investasi swasta untuk pengelolaan sampah Kolaborasi Pemerintah-Swasta di bidang Pengolahan Sampah (e.g. Samtaku; penerapan teknologi Alfimer di TPA Terjun (Medan));
- f. Telah terbangunnya TPST SAMTAKU di Jimbaran Bali
- g. Penerbitan Kepmenko No. 143/2021 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah di Sarbagita.
- h. Penerbitan PERMEN LHK 19/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah non B3.
- i. Penerbitan Kepmenko No. 88/2021 tentang Tim Koordinasi Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan Produk Samping/Hasil Pengolahan Komoditas Tambang Timah untuk Industri Dalam Negeri.
- j. Kolaborasi Internasional di bidang Pengelolaan Sampah (Minderoo untuk *doubling recycling rate*; GIZ untuk SUPs prevention; KOICA & KOEM untuk Penanganan Sampah Laut/*Microplastic*; Jepang untuk Penanganan Sampah Laut).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program prioritas ini adalah adanya *refocussing* anggaran untuk percepatan penanganan sampah dengan teknologi RDF yang menggunakan dana APBN serta adanya arahan Menteri PUPR untuk menunda pembangunan RDF Tuban berdasarkan kebijakan tahun 2022-2023 yang akan memfokuskan pada optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi (OPOR) infrastruktur yang telah dibangun. Tindakanjuga yang akan dilakukan berkaitan dengan kegiatan ini adalah:

- a. Dilakukan percepatan empat lokasi yang mulai dibangun pada tahun 2022 dan empat lokasi yang akan selesai pada bulan Maret 2022.
- b. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait:
 - Aspek Integrasi Pengelolaan Sampah dari Hulu sampai Hilir dengan:
 - Mengoptimisasikan TPS-3R, Bank Sampah, dan Partisipasi Masyarakat;
 - Pengendalian penanganan sampah di hilir berbasis teknologi ramah lingkungan (RDF); serta
 - Aspek Penanganan Limbah, melalui;
 - Pengendalian optimalisasi pemanfaatan *Fly Ash dan Bottom Ash* (FABA) untuk mendukung pembangunan.
 - Pengendalian penanganan limbah medis COVID-19.
 - Aspek Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - Pengendalian penerapan jaring sampah di 11 DAS prioritas di Pulau Jawa.
 - Mendorong revisi Perpres No. 109/2006 Tentang Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut.
 - Optimalisasi Kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Internasional.

32. Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Pemerintah Indonesia berkomitmen sesuai dengan *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Pemerintah melakukan berbagai macam strategi untuk mencapai target, bahkan untuk mempercepat tercapainya emisi nol bersih.

Salah satu program pemerintah menurunkan emisi melalui program rehabilitasi mangrove. Keberadaan mangrove memiliki dampak positif terutama dalam mengurangi emisi yang persentasenya mencapai 30-31 persen secara tahunan dari pengelolaan lahan yang dilakukan selama ini. Pengelolaan ekosistem mangrove nasional ini akan berjalan dengan baik dan maksimal seiring dengan adanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang memiliki kewenangan serta tugas terkait secara spesifik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenko Marves memiliki program prioritas yang memiliki output adanya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 12.500 Ha berdasarkan RPJMN dan pemberdayaan masyarakat serta tersusunnya *roadmap* pengelolaan mangrove nasional. Progres capaian program prioritas ini sudah mencapai 100% karena telah tercapainya 36.406 Ha rehabilitasi lahan mangrove dan finalisasi *roadmap* pengelolaan mangrove nasional melalui Pokja Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang telah dibentuk.

Progres capaian program prioritas ini pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Nasional
 - Program rehabilitasi mangrove telah berjalan dengan APBN Reguler, PEN dan dukungan pendanaan lainnya;
 - Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Program Rehabilitasi Mangrove melalui Program TJSL/CSR Mangrove.
 - Peluncuran *update* Peta Mangrove Nasional.
 - Penyusunan kajian *Roadmap* Mangrove dan *Coastal Resilience*
- b. Internasional
 - Penandatanganan MoU Program Pengembangan Mangrove RI-UAE;
 - Penyusunan *Implementing Arrangement* Program Pengembangan Mangrove RI-UAE;
 - Review kerjasama RI-Jerman terkait *World Mangrove Center*;
 - Submisi Kajian Indonesia dalam Forum *Response Measures*;
 - *Side Event Talk Show* dan pertemuan forum *Response Measures* pada COP26;
 - *Bilateral Meeting Minister of Ocean and Fisheries* Korsel dalam rangka peninjauan kerja sama *Blue Carbon*.

No	K/L, Swasta Asosiasi, dan lainnya	Tahun 2020		Tahun 2021		Total
		Sumber Pendanaan	Luasan (Ha)	Sumber Pendanaan	Luasan (Ha)	
1.	KLHK	APBN Reguler	1.000	APBN Reguler	1.381	2.381
		PEN	17.704	-	-	17.704
2.	KKP	APBN Reguler	206,6	APBN Reguler	417,37	623,97
		PEN	248,88	PEN	959,35	1.208,23
3.	BRGM	-	-	PEN	34,982	34,982
4.	Kemendes PDTT	-	-	PEN	500	500
5.	PT. Pelindo	-	-	TJSL	125	125
6.	GAPKI	-	-	CSR	50	50
7.	APHI	-	-	CSR	5	5
8.	APROBI	-	-	CSR	25	25
9.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	757,28	757,28
10.	DBH-DR	-	506	-	-	506
	Total		19.665,48		39.202,00	58.867,48

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini antara lain: *refocussing* anggaran; Peta Mangrove Nasional yang baru diluncurkan; belum masuknya sumber pendanaan mitra strategis; dan belum maksimalnya sumber pendanaan lainnya. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut maka akan dimaksimalkan dana bantuan mitra strategis, DBH-DR, CSR Perusahaan, PEN, dan APBN. Selanjutnya akan dilakukan juga pengembangan *Blue Carbon* dan kerjasama internasional. Namun secara keseluruhan kegiatan ini telah diselesaikan dan target telah tercapai.

33. Koordinasi Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) pada Oktober 2021. Hal ini menjadikan Indonesia penggerak pertama (*first mover*) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Pengesahan peraturan ini juga disampaikan oleh Presiden RI dalam pertemuan *Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Glasgow, UK.

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* yang di dalamnya terdapat komitmen *Nationally Determined Contribution (NDC)*. Komitmen tersebut kemudian dipertegas menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020 – 2024 dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional.



Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia.

Progres capaian program prioritas ini pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional pada tanggal 29 Oktober 2021;
- b. Mendorong untuk penyiapan peraturan turunan dari Perpres No. 98/2021 oleh K/L;
- c. Pemantapan konsep narasi tunggal sebagai bahan sosialisasi dan penyusunan rencana pelaksanaan sosialisasi Perpres 98/2021;
- d. Pelaksanaan kajian penerapan *Paris Agreement* 2021 (terkait Gas Rumah Kaca);
- e. Penguatan kerjasama dalam perubahan Iklim dengan UK, US dan EU, dengan melaksanakan:
 - Dikirimkan surat dari Menko Marves kepada Mr. John Kerry atas komitmen dukungan pendanaan perubahan iklim dari AS.
 - Penguatan kerjasama dengan RI-UK dengan bantuan pendanaan teknis dan proyek pengembangan kapasitas dalam mengembangkan *carbon pricing* dan kebijakan pasar. Dukungan ini disalurkan melalui Indonesia-UK PACT (*Partnering for Accelerated Climate Transitions*).

- Pelaksanaan koordinasi lanjutan terkait *Carbon Pricing* dan *Carbon Market* dalam rangka kerjasama dalam RI-UK *Dialogue*.

Tindaklanjut dari pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan rendah karbon yaitu:

- Koordinasi pemantapan bahan narasi tunggal sosialisasi dan peraturan turunan Perpres 98/2021
- Koordinasi tingkat menteri terkait percepatan implementasi Perpres 98/2021
- Koordinasi pemantapan konsep *Global Blended Finance*



Gambar 60 Koordinasi Dalam Rangka Tindaklanjut *Paris Agreement* (Gas Rumah Kaca dan Rendah Karbon)

34. Koordinasi Kebijakan *Food Estate*

Untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia jangka panjang, pemerintah merencanakan program *food estate*. *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dalam program ini, akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap dengan potensial, untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan.

Program tersebut dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO). Dalam keterangannya, FAO telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan.

Pemerintah menetapkan lokasi *Food Estate* berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini melanjutkan dari yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi telah melaksanakan capaian atas pelaksanaan pengembangan *food estate* di Sumatera Utara sebagai berikut:

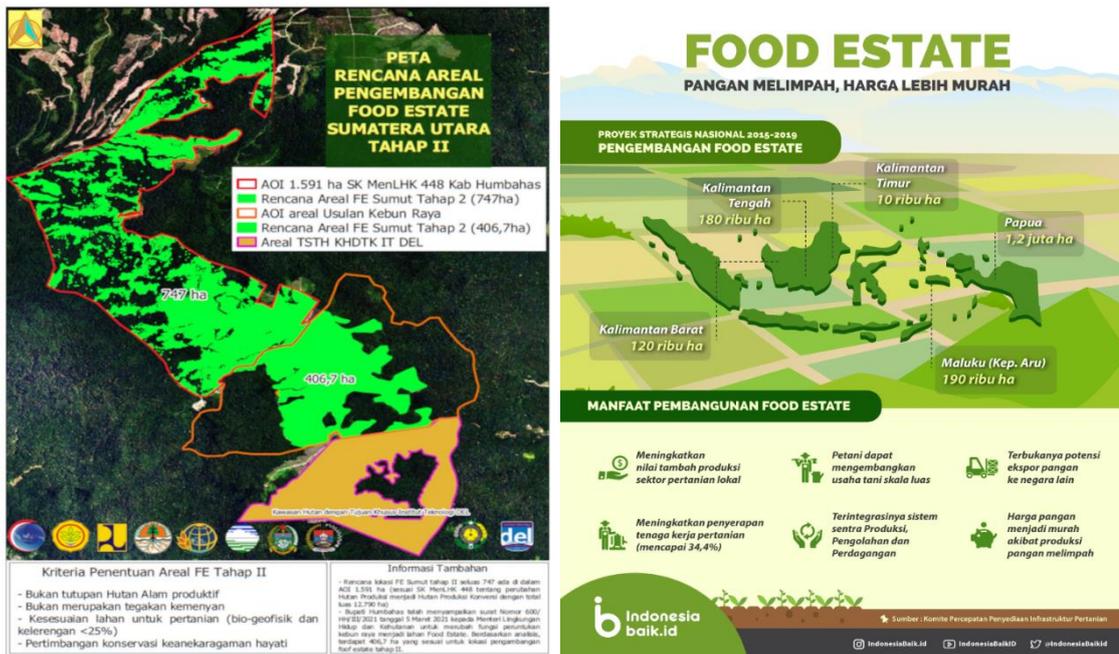
- a. Penyusunan Konsep Rancangan PerPres Badan Otorita Pengelola Kawasan *Food Estate* Sumatera Utara bersama dengan Kementerian Pertanian, selanjutnya ditelaah oleh Biro Hukum Marves.
- b. Koordinasi Penyediaan infrastruktur irigasi pertanian untuk 1000 ha, 20 ha diantaranya berupa irigasi tetes, jalan akses 19.8 km.
- c. Koordinasi Revisi PerMenPerin No. 16 Tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri khusus alsintan.
- d. Telah dilaksanakannya koordinasi terkait persetujuan KKPR;
- e. Telah dilaksanakannya koordinasi terkait persetujuan lingkungan (UKL-UPL) FE 785 ha;
- f. Telah dilaksanakannya koordinasi terkait persetujuan lingkungan pembangunan jalan 1.1 Km;
- g. Koordinasi penetapan Peta Penataan Lahan 1.000 ha;
- h. Koordinasi penetapan Peta Kesesuaian Lahan FE Sumut Tahap II
- i. Koordinasi penetapan Peta AoI FE Sumut 10.000 ha;
- j. Koordinasi terkait penyiapan dokumen FE Tahap II (Humbahas dan Pakpak Barat)

Capaian atas pelaksanaan food estate di *Kalimantan Tengah* yaitu:

- a. Telah dilaksanakan pengendalian dan identifikasi permasalahan dan rekomendasi FE Kalimantan Tengah.
- b. Koordinasi masukan terhadap *masterplan* FE Kalimantan Tengah.



Gambar 61 Kunjungan Kerja Menko Marves ke Foot Estate di Sumatera Utara



Gambar 62 Sebaran Lokasi Program Food Estate

35. Pengendalian Kebijakan Pemanfaatan Limbah Melalui *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA)

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.

Hal ini menyusul telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana didalamnya terdapat pengaturan tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 dari kegiatan pembakaran batubara (FABA).

Adapun pemanfaatan Faba adalah untuk jalan lingkungan dengan komposisi sebagai pengganti pasir dan batu pecah dengan pemakaian semen sekitar 10 %. Saat ini di PLTU Paiton dan PLTU Jepara telah membuat FABA dalam bentuk paving blok.

Program ini merupakan lanjutan dari tahun 2020, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021 telah melaksanakan capaian sebagai berikut:

- a. PLN / PLTU telah berkoordinasi dengan Kemenko Marves dalam pemanfaatan limbah FABA yaitu PLTU Paiton, PLTU Tanjung Jati B, PLTU Amurang, PLTU Bangka Belitung, PLTU Pacitan.
- b. Mendorong PT PLN melakukan MoU kerjasama dengan TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah sekitar

PLTU untuk pemanfaatan faba : dalam bentuk material lepas untuk pembangunan jalan lingkungan, batako untuk rumah dan *paving block* untuk jalan setapak.

36. Pengendalian Kebijakan Kerusakan Lingkungan Akibat PETI dan Tumpahan Minyak

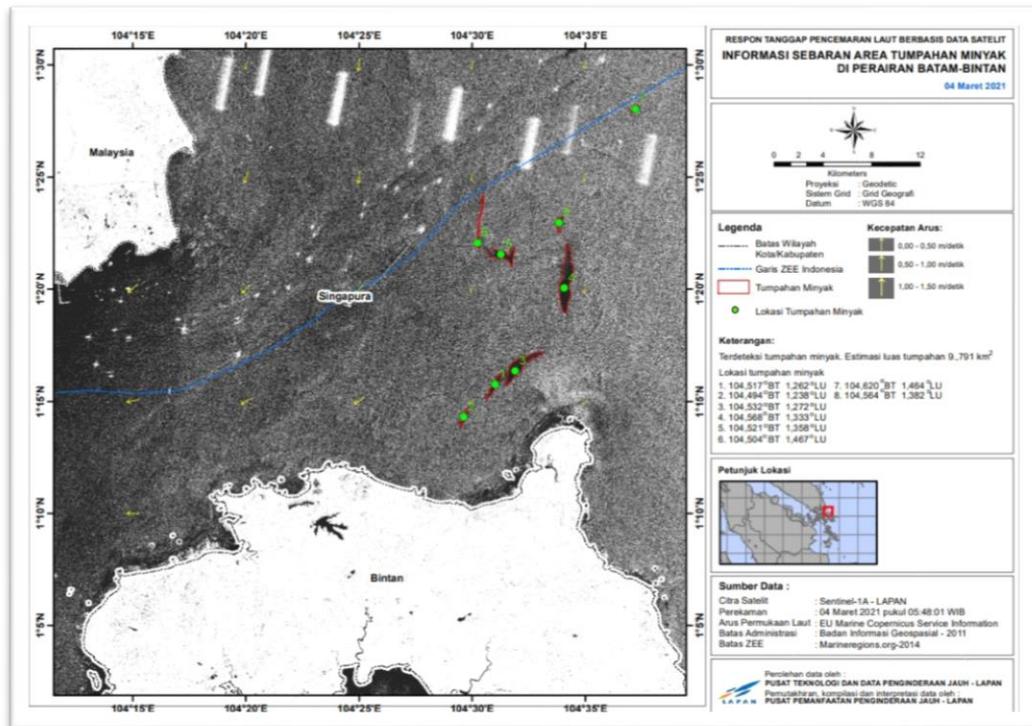
Pertambangan tanpa izin (PETI) dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.

Hingga saat ini pertumbuhan PETI semakin berkembang, bahkan dilakukan di sekitar/sekeliling wilayah-wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Perkembangan PETI sudah mencapai tahap yang cukup mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market trading*), yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sinkronisasi pengendalian koordinasi terkait kerusakan lingkungan maka Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi melaksanakan kegiatan koordinasi pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI dan tumpahan minyak. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Kemenko Marves membentuk Tim Kerja Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Sisa Hasil Pengelola Timah di Bangka Belitung;
- b. Mendorong terbitnya Permenko Marves No 88 Tahun 2021
- c. Mengadakan Rakor Tim Kerja Wasdal Gakum SPH Timah dengan Bareskrim.
- d. Pengendalian Tumpahan Minyak di Laut (*Oil Spill*) di perairan Kepulauan Riau untuk kasus *illegal oil spill*.
- e. Pengendalian tumpahan minyak di Pantai Utara Karawang untuk kasus tumpahan minyak oleh Pertamina ONWJ,
- f. Pengendalian pencemaran limbah di Pantai Selatan Lampung Selatan.

Mendorong untuk dilakukannya perubahan Perpres Nomor: 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut melalui beberapa koordinasi, FGD dan Rencana Pembentukan Tim Kecil Penyusun Naskah Akademik.



Gambar 63 Foto Udara Lokasi Sisa Hasil Pengelola Timah di Bangka Belitung

37. Pengendalian Kebijakan Penanggulangan Kebencanaan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan.

Salah satu bencana yang terjadi di Indonesia adalah *land subsidence*. *Land subsidence* adalah sebuah istilah untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena terjadinya penurunan tanah. Di Indonesia saat ini terdapat 112 kabupaten atau kota di pesisir yang berpotensi mengalami banjir rob dan perlahan-lahan akan mengalami penurunan muka tanah. Di Pulau Jawa, wilayah yang paling terdampak adalah Pantura Jawa, yaitu Demak, Semarang, dan Pekalongan serta Muara Kamal di Jakarta Utara. Tertera pada RPJMN 2020 – 2024, daerah Pantura telah menjadi prioritas dalam penanggulangan penurunan muka tanah.



Gambar 64 Himbauan Menko Marves ke Kepala Daerah Terkait Wilayah Rawan Gempa & Tsunami

Kemenko Marves berupaya untuk melakukan pengendalian kebijakan atas penurunan muka tanah. Pada tahun 2021 capaian Ke menko Marves dalam penanganan *Land Subsidence* (LS) sebagai berikut:

- a. Penerbitan SK Menko Marves Nomor 77/DIV Tahun 2021 Tentang Kelompok Kerja Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah Di Dataran Rendah Pesisir Tahun 2021.
- b. Mendorong penyusunan Program Kerja Pokja Pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Amblesan (Subsiden) Tanah di Dataran Rendah Pesisir Tahun 2021.
- c. Kunjungan lapangan Pokja terkait sistem pemantauan penurunan muka tanah di Jakarta dan Pekalongan.
- d. Koordinasi dalam menyusun konsep teknis integrasi data dan informasi *Land Subsidence* oleh BIG, Kemen ESDM dan para anggota Pokja.
- e. Mendorong untuk melakukan kajian dalam penanganan *land subsidence* dari Hulu ke Hilir di Semarang, Demak dan Pekalongan.
- f. Koordinasi dalam Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami sesuai amanat Perpres 93 Tahun 2019.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usulan anggaran kegiatan antisipasi pemasangan sirine multi - bencana hidrometeorologi dan gempabumi – tsunami 2021 bersama BMKG, Kemendagri dan BNPB.
- h. Fasilitasi koordinasi pemasangan EWS gempa bumi dan tsunami serta WRS *New Gen* di Pandeglang;
- i. Melakukan koordinasi dan pengendalian atas penentuan lokus prioritas penanganan kebakaran hutan, kebun dan lahan (Karhutbunla):
- j. Mendorong penyusunan draft kajian mengenai penentuan lokasi prioritas intervensi penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan telah selesai. hasil kajian telah dibahas secara terbatas dengan tim terkait.
- k. Koordinasi dalam rangkai pelibatan pemerintah pusat guna implementasi hasil kajian.

Adapun beberapa tindaklanjut yang dilakukan Kemenko Marves atas kendala yang ada saat pelaksanaan kegiatan tahun 2021 yaitu:

- a. Untuk kendala belum kuatnya posisi kelembagaan Pokja LS yang diharapkan dapat menjembatani gap yang ada yaitu dengan melakukan koordinasi dan merevisi SK Pokja LS 2022.
- b. Untuk kendala atas partisipasi dan dukungan K/L dalam upaya penanganan kebencanaan belum integratif dan menyeluruh yaitu dengan melakukan koordinasi untuk penguatan konsep integrasi data dan informasi LS.

- c. Untuk kendala atas Isu *land subsidence* belum mendapatkan dukungan dari sisi regulasi dengan tindak lanjut mewacanakan pemuatan isu LS dalam revisi UU 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
- d. Koordinasi dan fasilitasi untuk melanjutkan implementasi kerjasama antara Pokja LS dengan Mr. Ried Dam (*Expert* Belanda).

38. Pengendalian Kebijakan Program TORA dan Penyelesaian Konflik Agraria

Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria; pertama ketimpangan penguasaan tanah negara, kedua timbulnya konflik agraria yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, ketiga timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan, Satu mengurangi kemiskinan, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, keempat menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, kelima mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, keenam memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa semangat Reforma Agraria adalah “terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, wilayah dan sumber daya alam”. Reforma Agraria mempunyai 2 skema besar yaitu: Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Pada tahun 2024 ditargetkan luas TORA adalah 9 juta ha dan Perhutanan Sosial seluas 12.7 juta ha. Kesuksesan program reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan lahan masyarakat dari 0,89 ha menjadi 1.23 ha yang akan berkontribusi pada penurunan gini ratio dari 0.59 menjadi 0.39. Perlu strategi dan program percepatan capaian Reforma Agraria untuk mendorong pembangunan nasional dan kebutuhan investasi.



Gambar 65 Infografis Reforma Agraria

Capaian Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021 telah melaksanakan capaian sebagai berikut:

- a. Pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 103.069 ha (85%) dari target tahun 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 120.000 ha. Secara total, sampai dengan tahun 2021, telah dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 1.32 juta ha dari target 4.1 juta ha (29.32%). Dengan demikian masih ada target 2.8 juta ha lagi yang harus dilepaskan dari kawasan hutan untuk TORA sampai tahun 2024. Dari total kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut, sebanyak 269.617 ha (6.58%) telah didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat;
- b. Mendorong percepatan penyusunan Rancangan Perpres Percepatan Reforma Agraria (Revisi Perpres 88/ tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria);
- c. Mendorong terbitnya SK Kepala KSP untuk Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria. Prioritas yang dikoordinasikan oleh Tim Kerja Bersama melalui SK Kepala Kantor Staf Presiden. Dari 137 konflik agraria prioritas yang ditangani, 105 kasus diantaranya berada di dalam kawasan hutan dan 22 kasus berada di luar kawasan hutan, khususnya terkait dengan perkebunan (PTPN). Sampai akhir tahun 2021, sebanyak 8 konflik telah selesai, 78 kasus telah dilakukan kajian melalui proses uji petik lokasi, serta proses penetapan hutan adat;
- d. Melakukan percepatan terhadap penyelesaian *pilot project* pelepasan kawasan hutan yang dapat dikonversi dan non produksi (HPK-NP) sebagai TORA pada 5 kabupaten di 4 provinsi dengan total luas sekitar 53.000 ha dengan rincian Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Banyuasin - Provinsi Sumatera Selatan seluas 30.306 ha, Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 3.842 ha, Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.500 ha, dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seluas 14.310 ha. Proyek percontohan ini didorong karena sampai tahun 2021, dari alokasi 978.108 ha HPK Non Produktif pada Peta Indikatif TORA baru terealisasi sekitar 1.591 ha. Oleh karena itu, *pilot project* ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan TORA. Sampai akhir 2021, semua proposal dari 5 kabupaten telah selesai untuk kemudian disampaikan ke Menteri LHK untuk penelahaan lebih lanjut.



Gambar 66 Ratas Bersama Presiden Joko Widodo terkait TORA

39. Pengendalian Kebijakan Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Presiden Jokowi memberikan arahan terkait dengan perhutanan sosial, yaitu:

- a. Meminta diprioritaskan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, seperti Program Sertifikasi Tanah untuk Rakyat, Legalisasi Lahan Transmigrasi, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. (pada ratas: Evaluasi Program Strategis Nasional tanggal 29 Mei 2020).
- b. Perhutanan Sosial tidak hanya pada pembagian sertifikat, lakukan pendampingan lanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan masuk dalam aspek bisnis Perhutanan Sosial dan menyiapkan sarana dan prasarana produksi serta pelatihan sehingga KUPS berkembang dengan baik dan bisa dijadikan *benchmarking* bagi KUPS lain. (pada ratas: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial tanggal 03 November 2020).
- c. Akses lahan digunakan untuk kegiatan produktif sesuai potensi daerah, ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi. (pada penyerahan SK Perhutanan Sosial, TORA, Hutan Adat di Istana Merdeka pada tanggal 07 Januari 2021).

Target Perhutanan Sosial di tahun 2024 adalah distribusi akses legal kawasan hutan sosial untuk dikelola pada masyarakat 12,7 juta Ha. Akses ini akan diberikan kepada 1.668.508 KK dengan jumlah 22.600 unit SK Perizinan

dan akan didorong pembentukan KUPS sebanyak 45.200 unit. Maka dari itu diperlukan adanya percepatan dalam program Perhutanan Sosial yang akan dikerjakan bersama dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait bersama dengan Pemerintah Daerah.



Gambar 67 Salah Satu Lokasi Pilot Project Perhutanan Sosial di Kab. Lumajang-Jawa Timur

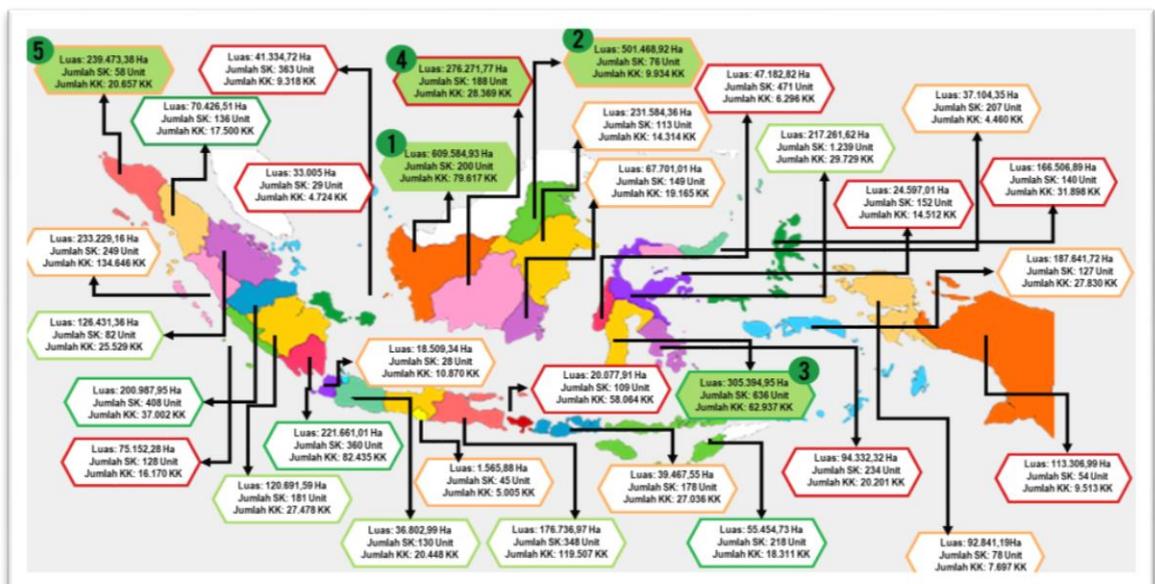
Menindaklanjuti arahan presiden dan guna percepatan program perhutanan sosial tersebut Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan Perhutanan Sosial dengan capaian sebagai:

- a. Koordinasi dan pengendalian dalam distribusi akses perhutanan sosial seluas 393.530 ha (157%) dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 seluas 250.000 ha. Secara total sampai akhir 2021, luas perhutanan sosial baru 4.9 juta ha (38.5%) dari target 12.7 juta ha tahun 2024. Dengan demikian, masih ada sekitar 7.8 juta ha lagi kawasan hutan yang harus diberikan distribusi akses ke masyarakat.
- b. Koordinasi dan inisiasi dalam penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Perpres Perencanaan Terpadu Perhutanan Sosial yang merupakan mandat dari Pasal 245 PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- c. Melakukan kajian integrasi dan mekanisme pendamping perhutanan sosial. peran pendamping PS ini sangat penting untuk kesuksesan pelaksanaan program PS, baik pra persetujuan maupun paska persetujuan. Dari sekitar 7.200 ijin PS yang telah diberikan, baru ada 1.300 pendamping dari KLHK. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pendamping dari K/L terkait (misal pendamping desa, penyuluh), Pemda maupun Perum Perhutani. Kajian yang dilakukan adalah dalam upaya melakukan integrasi dan mekanisme pendampingan tersebut.

- d. Telah dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Perhutanan Sosial melalui SK Menko Marves No.126/2021 tentang Pokjanas Perhutanan Sosial. Pokjanas PS ini merupakan forum koordinasi bersama lintas K/L, Pemda, dunia usaha, akademisi dan LSM dalam upaya percepatan Program Perhutanan Sosial.
- e. Koordinasi penyusunan *masterplan* dan pelaksanaan Pilot Project IAD di beberapa wilayah (Lumajang-Jawa Timur, Sumatera Barat, Kabupaten Belitung-Bangka Belitung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Jawa Barat);
- f. Memberikan solusi atas kendala yang ada saat ini di beberapa lokasi perhutanan sosial diantaranya terkait akses transportasi, akses permodalan, dan ada lokasi yang belum tersentuh dana desa serta peran dari kementerian dan 89 lembaga terkait serta pemda setempat.



Gambar 68 Distribusi Akses Perhutanan Sosial



Gambar 69 Peta Sebaran Perhutanan Sosial per Propinsi



Gambar 70 Beberapa Aturan dan Pedoman Tentang Perhutanan Sosial

40. Pengendalian Kebijakan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Jasa lingkungan berarti memanfaatkan potensi lingkungan tanpa harus dengan cara yang merusak lingkungan itu sendiri dan tidak mengurangi fungsi utamanya. Sedangkan pengertian dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus mengawal pengembangan Pembangunan Kawasan Terintegrasi/*Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Belitung yang berbasis perhutanan sosial. Potensi Perhutanan Sosial di Pulau Belitung cukup tinggi untuk menopang perekonomian daerah melalui pengembangan wisata

dan pertanian-pangan. Karena itu kegiatan pengembangan wilayah terintegrasi Kabupaten Belitung dapat menjadi percontohan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial. Percontohan ini akan dibangun selama 3 (tiga) tahun mulai 2021 sampai dengan 2023. Adapun tema utama pengembangan IAD Kabupaten Belitung adalah ekowisata dan agroforestry.



Gambar 71 Salah Satu Lokasi Pengembangan Jasa Kehutanan dan HHBK di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Rencana pengelolaan perhutanan sosial di Belitung ini akan dilakukan di 7 lokasi Hutan Kemasyarakatan atau HKm. Ketujuh lokasi tersebut ialah HKm Seberang Bersatu, HKm Bukit Peramun, HKm Batu Bedil, HKm Pemuda Nelayan Pecinta Alam (PNPA), HKm Mitra Tebalu Bertua, HKm Teluk Munsang, dan HKm Bukit Tebalu Simpor Laki. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2021 telah melaksanakan capaian yaitu:

- a. Koordinasi dalam upaya mengawal dan mendorong dalam finalisasi *masterplan* IAD Kabupaten Belitung,
- b. Koordinasi dalam penyusunan rencana aksi IAD Kabupaten Belitung yang telah disinkronkan

dan mengacu pada *masterplan* IAD yang telah ditetapkan disesuaikan dengan realisasi kegiatan tahun anggaran 2021. Ruang lingkup program IAD Kabupaten Belitung mencakup 4 kegiatan utama, yaitu pengembangan ekowisata, pengembangan *agroforestry* pangan, akses hutan sosial dan redistribusi lahan, pelestarian ekosistem mangrove dan pesisir, integrasi KEK dan perhutanan sosial Belitung, serta pemasaran ekowisata dan agroforestri.

Melalui program perhutanan sosial di Belitung, telah dilakukan rehabilitasi lahan bekas tambang seluas 160 ha. Selain itu, hal menarik yang terdapat di HKm Juru Seberang ialah program sedekah pohon. Dalam program ini, seseorang bisa mengadopsi atau menanam pohon dan memantau perkembangannya secara digital. Pengembangan kawasan terintegrasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Belitung sebagai upaya peningkatan skala

usaha Perhutanan Sosial untuk mendorong perekonomian daerah yang tangguh.



Gambar 72 Beberapa Koordinasi Kemenko Marves Dalam Rangka Kebijakan Jasa Lingkungan dan HHBK

41. Koordinasi Pelaksanaan *Ground Breaking* Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2)

THST2 ini merupakan program prioritas nasional dalam pengembangan lumbung pangan nasional. Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) berlokasi di Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. lokasi tersebut dirancang sebagai pusat riset dan inovasi pengembangan herbal dan hortikultura. Satu di antaranya untuk menghasilkan bibit lokal yang unggul untuk mendukung program *Food Estate* di Sumatera Utara. Di pusat herbal ini akan dilakukan penelitian pengembangan bibit hortikultura yang berkualitas tinggi. Kawasan itu juga akan menjadi pusat bibit herbal dan hortikultura yang hasilnya untuk masyarakat Indonesia.

Pusat bibit seluas 10.000 hektar ini akan mendukung program ketahanan pangan nasional. Selanjutnya akan dikembangkan juga lahan pertanian seluas 2.000 hektar untuk tanaman singkong, jagung dan ubi. Dasar hukum pembentukan TSTH adalah Perpres 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi, dengan amanat kelembagaan dan manajemen operasional, dan bentuk pengelola KST berdasarkan Penyelenggara KST: Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi dan Masyarakat. TSTH2 Pollung direncanakan dibangun pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus

(KHDTK) Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dengan lahan seluas 500 Ha. Lahan KHDTK untuk litbang kehutanan ini merupakan lahan pemerintah dengan penyerahan pengelolaan kepada IT Del.

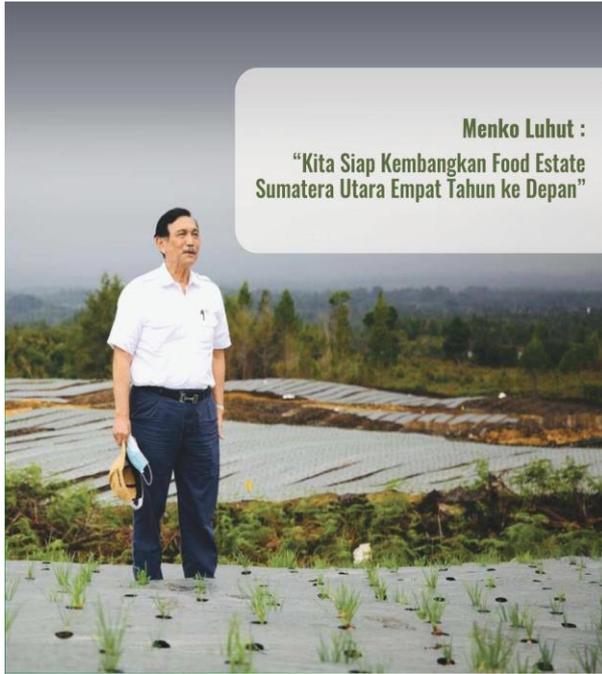


Gambar 73 Peletakan Batu Pertama Pengembangan *Food Estate* di Sumatera Utara

Guna pelaksanaan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) Kemenko Marves berkoordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan *groundbreaking* pembangunan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Desember 2021.

Setelah pelaksanaan *groundbreaking*, dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait agar pembangunan THST2 sesuai dengan yang direncanakan. Kemenko Marves melakukan koordinasi dan pengendalian atas rencana pengembangan THST kedepan dengan K/L teknis dibawah koordinasi Kemenko Marves (Kemen PUPR). Kemen PUPR akan membangun infrastruktur pendukung TSTH2 sebagai kawasan riset dan inovasi teknologi pemanfaatan dan pengembangan tanaman obat (herbal) dan hortikultura yang bertaraf internasional.

Pembangunan TSTH2 dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara Ditjen Cipta Karya secara bertahap mulai tahun 2021 hingga April 2023. Dimulai tahun 2021, Kementerian PUPR akan melaksanakan pembangunan tahap 1 selama 16 bulan berdasarkan dokumen kontrak pembangunan TSTH2 Pollung. Dokumen perencanaannya telah diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama BRIN pada bulan Agustus 2021 yang lalu.



Gambar 74 Pernyataan Menko Marves Luhut Terkait *Food Estate*

Kemenko Marves melakukan pengendalian atas pembangunan yang akan dilaksanakan di THST2 diantaranya:

- a. Koordinasi dan pengendalian *land clearing* pada lokasi TSTH2;
- b. Koordinasi dan pengendalian atas pembangunan Jalan Akses Taman Sains Teknologi Herbal (TSTH) sepanjang 9 kilometer yang dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2021 (di mana progres sampai Desember 2021 mencapai 76,77 persen);
- c. Pengendalian atas pembangunan Jembatan Akses TSTH dan Kawasan *Food Estate* sepanjang 2 x 25 meter yang dilaksanakan pada Maret-September 2021 dimana progresnya telah rampung 100 persen;
- d. Koordinasi dan pengendalian atas pembangunan sarana pendukung antara lain Gedung Riset Pertanian, Gedung Riset Herbal I, Gedung *Smart Green House*, Gedung *Screen House*, Ruang Kontrol Pertanian, Gedung Mess Karyawan, Gerbang dan Pos Satpam, Area Parkir serta pagar keliling di lahan seluas 30 hektar.

Pemenang lelang paket pembangunan fisik TSTH2 adalah PT. Brantas Abipraya sedangkan untuk manajemen konstruksi adalah PT. Yodya Karya dan telah dilakukan penandatanganan kontrak pada 20 Desember 2021.

42. Koordinasi Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, paradigma baru pembangunan kepariwisataan nasional berubah dari yang sebelumnya memiliki target utama peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi peningkatan nilai tambah pariwisata dengan fokus pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu strategi utamanya adalah melalui pengembangan desa wisata karena desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi syarat yaitu pembangunan pariwisata yang menyeimbangkan tiga aspek (ekonomi, lingkungan, dan masyarakat) serta pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas hidup, memperkuat nilai budaya dan masyarakat, dan memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong percepatan pengembangan desa wisata menjadi desa mandiri, salah satunya adalah dengan menetapkan desa wisata prioritas untuk fokus pengembangan dan *pilot project* pengembangan desa wisata pada 2021 dan 2022. Dalam hal ini, Kemenkomarves telah mengkoordinasikan berbagai pihak serta mendorong ditetapkannya 21 Desa Wisata di DPSP Danau Toba sebagai *pilot project* pengembangan desa wisata melalui koordinasi Penetapan Desa Wisata Prioritas 2021 di DPSP Danau Toba pada bulan September 2021. Pada rakor tersebut telah diputuskan penetapan 11 Desa Wisata Prioritas yang akan mendapat fokus pengembangan pada 2021-2022 melalui Surat nomor 210/DEPUTI V.1/MARVES/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Penyampaian Hasil Koordinasi Penetapan Desa Wisata Prioritas 2021 di DPSP Danau Toba.



Gambar 75 Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Huta Siallagan Dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata di Prov Sumatera Utara

Tabel 7 Daftar 21 Desa Wisata di DPSP Danau Toba

No	Kabupaten	Desa
1	Simalungun	Tigas Ras
2	Simalungun	Sigabanding
3	Samosir	Parlondut
4	Samosir	Lumbah Suhisui Toruan
5	Karo	Kutambaru
6	Karo	Dokan
7	Pakpak Bharat	Kuta Jungak
8	Pakpak Bharat	Prongil
9	Dairi	Desa Silalahi I
10	Dairi	Desa Silalahi III
11	Samosir	Huta Siallagan (Desa Ambarita)
12	Humbang Hasundutan	Sipinsur
13	Humbang Hasundutan	Tipang
14	Humbang Hasundutan	Simangulampe
15	Toba	Sigapiton
16	Toba	Meat
17	Toba	Tarabunga
18	Toba	Lintong Nihuta
19	Tapanuli Utara	Huta Ginjang
20	Tapanuli Utara	Aritonang
21	Tapanuli Utara	Baribaniaek

Tabel 8 Daftar Desa Wisata Prioritas DPSP Danau Toba

No.	Kabupaten	Nama Desa
1	Simalungun	Tigas Ras
2	Simalungun	Sigabanding
3	Samosir	Parlondut
4	Samosir	Lumbah Suhisui Toruan
5	Karo	Kutambaru
6	Karo	Dokan
7	Pakpak Bharat	Kuta Jungak
8	Pakpak Bharat	Prongil
9	Dairi	Desa Silalahi I
10	Dairi	Desa Silalahi III
11	Samosir	Huta Siallagan (Desa Ambarita)

Terdapat beberapa isu utama dalam pengembangan desa wisata, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan internet yang masih kurang memadai. Saat ini, masih banyak terdapat desa yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata. Dalam hal ini, sebagai contoh berdasarkan data yang sebanyak 16.672 dari total 83.931 desa di Indonesia belum mendapatkan akses internet yang memadai;
- b. Fokus pengembangan desa wisata salah satunya adalah *community development*. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan

keterlibatan dalam kegiatan pariwisata merupakan yang yang penting dilakukan.

Dalam rangka mendorong percepatan desa wisata, Kemenko Marves melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Mendorong penyusunan Buku Pedoman Pengembangan Pariwisata sebagai panduan pengembangan desa wisata di Lima DPSP;
- b. Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan program dukungan di desa-desa wisata di DPSP Danau Toba pada 2021 dan 2022. Namun karena adanya *refocusing* anggaran pada K/L, beberapa program dukungan sebagian besar harus dialihkan ke tahun anggaran 2022. Adapun program pengembangan yang menjadi fokus utama adalah pembangunan sarana dan prasarana dan pendampingan masyarakat desa; dan
- c. Akan dilaksanakan koordinasi lanjutan untuk menentukan desa wisata prioritas di empat DPSP lainnya dan program intervensi dukungan pengembangan desa wisata prioritas pada 2022.

43. Koordinasi Percepatan Pengembangan DPSP Mandalika melalui Penyelenggaraan Event *World Superbike (WSBK)* 2021 dan *MotoGP* 2022

Pelaksanaan WSBK, MotoGP dan kegiatan internasional lainnya yang diselenggarakan di DPSP Mandalika merupakan momentum promosi DPSP Mandalika sekaligus mengakselerasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Dalam upaya peningkatan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, Kemenko Marves telah berkoordinasi dengan kurang lebih 30 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan *World Superbike (WSBK)*. Kegiatan ini telah terlaksana pada 19-21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Sirkuit Mandalika telah terbangun dengan panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Tersedia area *grandstands* dengan kapasitas 60.000 penonton. Pada penyelenggaraan event, ITDC menyediakan 25 ribu tiket per hari dengan tingkat kedatangan penonton sebesar 40% pada hari pertama, 83% pada hari kedua, dan 95% pada hari ketiga.

Kemenko Marves berhasil mengkoordinasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk persiapan MotoGP yang diselenggarakan pada 18-20 Maret 2022 tersebut. Kemenko Marves telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 185 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan *World Superbike* tahun 2021 dan *MotoGP* tahun 2022 untuk mendukung pelaksanaan event ini.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENDUKUNG PENYELENGGARAAN *WORLD SUPERBIKE*
TAHUN 2021 DAN *MOTOGP* TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, perlu dilakukan pengembangan kawasan pariwisata melalui penyelenggaraan *World Superbike* Tahun 2021 dan *MotoGP* Tahun 2022;

Gambar 76 Kepmenko No 185 Tahun 2021 Tentang Panitia Nasional Pendukung Penyelenggaraan World Superbike 2021 dan MotoGP 2022



Gambar 77 Panitia Nasional Pendukung Penyelenggara WSBK 2021 dan MotoGP 2022

Event ini telah memberikan dampak perekonomian yang signifikan. Tingkat hunian hotel dan penginapan mencapai 100% yang sebelumnya hanya mencapai 15% di Pulau Lombok, khususnya di Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Event WSBK ini juga melibatkan 330 UMKM baik di dalam maupun di luar Kawasan yang didominasi oleh pelaku UMKM lokal dan menyumbang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 69 miliar yang diperoleh selama penyelenggaraan kegiatan WSBK. Selain itu, untuk event ini direkrut lebih dari

2.000 orang dari desa penyangga kawasan Mandalika untuk terlibat langsung dalam kegiatan WSBK. Pelibatan tenaga kerja dan UMKM lokal memastikan bahwa manfaat dari penyelenggaraan event WSBK berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama masa penyelenggaraan WSBK 2021, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam persiapan penyelenggaraan event selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengantisipasi hujan saat event.
- b. Pengendalian dan relokasi satwa liar seperti anjing untuk menghindari gangguan selama penyelenggaraan acara.
- c. Upaya *crowd control*, seperti tidak adanya jaga jarak dan ditemukannya penonton yang merokok di luar wilayah yang ditentukan; dan
- d. Penataan kawasan, mulai dari area sirkuit hingga percepatan pelebaran jalan provinsi Kuta - Kruak agar tidak menimbulkan kemacetan.



Gambar 78 Gelaran WSBK 2021 di Sirkuit Mandalika -Lombok

Penyelenggaraan WSBK dapat menjadi *best practice* menuju pelaksanaan MotoGP 2022, persiapan penyelenggaraan MotoGP 2022 akan berfokus pada penyelesaian sembilan isu utama yaitu struktur organisasi, infrastruktur, penataan kawasan, penyelesaian permasalahan lahan, kesiapan moda transportasi, akomodasi, promosi produk lokal, protokol kesehatan, dan *risk management*.

44. Koordinasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) merupakan suatu gerakan nasional untuk mendukung produksi dalam negeri dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, gerakan ini digagas langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2020. Dalam rangka percepatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada tanggal 8 September 2021 dan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sebagai ketua pada Tim Gernas BBI.



Gambar 79 Dukungan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dalam Gernas BBI

Sejak peluncuran Gernas BBI sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat peningkatan cukup pesat yaitu sebesar 9,2 juta unit UMKM/IKM/Artisan lokal *onboarding* masuk ke ekosistem digital atau mengalami peningkatan 115% lebih tinggi sejak diluncurkan. Oleh karena itu, total unit UMKM/IKM/Artisan yang *onboarding* kini menjadi 17,2 juta.

Grafik 11 Total *Onboarding* Nasional Melalui Gernas BBI 2020-2021

Total Onboarding Nasional (14 Mei 2020 - Desember 2021)



Sumber: idEA

Pada 2021 Gernas BBI mulai diaktivasi di 12 Provinsi, yaitu: Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Maluku, dan DKI Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi acara peluncuran, pameran UMKM secara luring, *virtual expo*, belanja oleh para Menteri serta pejabat eselon I dan II K/L, diskusi dengan pelaku UMKM/Artisan lokal, seminar daring, dan pelatihan.

Gernas BBI juga mendorong penyaluran modal bagi UMKM skala mikro melalui program Digital Kredit UMKM (*digiKU*) oleh HIMBARA sebesar Rp16 triliun hingga 2024. Selain itu, terdapat upaya serta peningkatan belanja pemerintah untuk UMKM melalui e-katalog dan aplikasi bela pengadaan yang dibuat oleh LKPP. Berdasarkan data LKPP per tanggal 13 Januari 2022, jumlah

transaksi pengadaan barang/jasa secara nasional melalui belia pengadaan dan toko dari adalah sebesar Rp74 miliar.

Beberapa hal yang perlu di evaluasi dari pelaksanaan BBI 2021, antara lain (a) pelaksanaan kampanye masih perlu menyeimbangkan aspek selebrasi dengan penguatan kualitas, (b) Indeks Kinerja Utama (IKU) masih terbatas pada jumlah *onboarding*, belum mencakup peningkatan jumlah transaksi, dan (c) aktivitas UMKM/IKM/Artisan yang baru *onboard* masih rendah, sehingga banyak yang menjadi *seller* tidak aktif (*churn rate* tinggi).

45. Koordinasi Pengembangan Program Indonesia *Spice Up The World* (ISUTW)

Tren positif dunia terhadap kuliner Indonesia dapat dibuktikan dari maraknya youtuber asing berbagi cerita tentang kelezatan serta keanekaragaman kuliner Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Keberadaan restoran diaspora yang saat ini berjumlah sekitar 1.000 outlet (data dari Kemenlu) masih dirasa belum maksimal mengangkat dan mempromosikan kekayaan bumbu, rempah-rempah, budaya serta pariwisata. Mencermati potensi rempah-rempah dan bumbu yang cukup besar, sekaligus mengakselerasi promosi budaya, produk ekonomi kreatif dan pariwisata Indonesia, yang bernilai ekonomi besar, maka Pemerintah menyusun sebuah program bernama “Indonesia *Spice Up The World*” (ISUTW). Program ini memacu pengembangan jaringan restoran Indonesia di luar negeri yang merupakan bagian dari diplomasi Indonesia.



Gambar 80 Salah Satu Stand Pameran pada Gelaran Indonesia *Spice Up The World*

Dalam rangka penguatan aktivasi *branding Wonderful* Indonesia sebagai rumah bersama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, program ISUTW mengutamakan identitas budaya Indonesia dengan bertumpu pada kearifan lokal, menggiatkan pembukaan restoran Indonesia di mancanegara melalui lisensi termasuk *franchise*, *co-branding* dan *brand expansion*, dan melakukan promosi melalui pemanfaatan beragam media publikasi secara digital yang inovatif dan kreatif.

ISUTW merupakan program kolaboratif semua pemangku kepentingan untuk mempromosikan kuliner Indonesia guna mencapai nilai ekspor sebesar US\$ 2 Miliar dan sebanyak 4.000 restoran di mancanegara pada 2024 serta mengangkat produk unggulan bumbu dan rempah-rempah merek lokal Indonesia. Kemenko Marves menginisiasi dan mengoordinasikan program ini

sebagai dukungan dalam mengangkat merek dan produk lokal Indonesia agar mampu berdaya saing di mancanegara serta berkontribusi dalam penguatan ekosistem yang bernilai ekonomi melalui rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyajian. Program ISUTW harus didukung oleh jaringan distribusi dan logistik melalui jalur laut, udara dan darat, seperti pengiriman produk bumbu dan rempah-rempah Indonesia ke mancanegara dengan harga yang kompetitif dan wajar.

Pada 4 November 2021, telah dilakukan peluncuran Indonesia *Spice Up The World* (ISUTW) pada *National Day* yang dihadiri oleh Presiden RI dalam Dubai Expo 2020. Pada *National Day* diperkenalkan program ISUTW melalui kompilasi video Indonesia di Al Wasl, kemudian secara paralel video peluncuran ISUTW diputar secara *looping* di *corner* ISUTW di Paviliun Indonesia.

Dalam rangka mendorong program ini diperlukan upaya menggaungkan ISUTW melalui berbagai kanal informasi nasional dan internasional. Perlu dilakukan pula pendataan supplier potensial sehingga dapat dilakukan *business matching* dengan pengusaha bumbu. Lebih lanjut, terkait rencana pembukaan restoran oleh pemilik *coffee shop* di Paviliun Indonesia di Expo Dubai, maka akan dilakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Fokus Program ISUTW di 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 81 Salah Satu Stand Pameran pada Gelaran *Indonesia Spice Up The World*

- a. Perluasan promosi program di dalam dan luar negeri.
- b. Fasilitasi kemudahan distribusi produk rempah dan kuliner ke luar negeri.
- c. Penguatan rantai pasar luar negeri melalui perwakilan Indonesia dan retail besar di luar negeri, dan
- d. Penguatan sumber daya manusia yang siap membuka usaha utamanya restoran Indonesia di luar negeri.

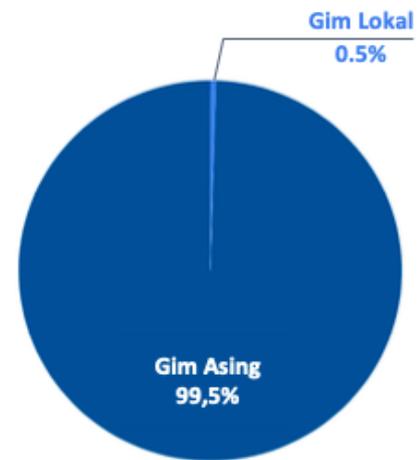
Program jangka pendek ISUTW menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin kreativitas berusaha dan upaya melindungi kepastian hukum secara wajar serta keberpihakan kepada UKM untuk terus tumbuh. Semua produk bumbu dan rempah-rempah Indonesia termasuk pengemasan dan pelabelan berkualitas standar internasional, *traceability*, ramah lingkungan, dan memiliki kelengkapan perijinan dari lembaga yang berwenang agar mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs 2030).

Program jangka panjang ISUTW menghasilkan peta jalan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait), dunia usaha, akademisi, komunitas, asosiasi, dan media agar menjadi panduan bersama dalam implementasi program ISUTW secara sinergis. Pengembangan produk bumbu dan rempah-rempah Indonesia, pengembangan jasa (restoran Indonesia di mancanegara), pengembangan

destinasi wisata, riset pemasaran terutama *market intelligent*, *product development and innovation*, peningkatan literasi teknologi digital, dan peningkatan kualitas SDM adalah bagian dari program ISUTW.

46. Koordinasi Pengembangan Industri Gim Lokal

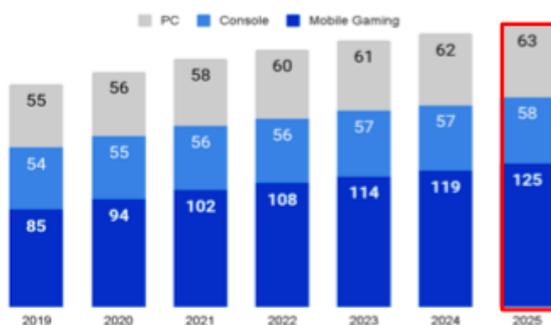
Permasalahan utama dalam pengembangan industri gim lokal adalah pangsa pasar gim nasional masih didominasi oleh gim buatan luar negeri sebesar 99,5% atau setara lebih dari 1,7 miliar dolar AS pada 2020. Diprediksi pada tahun 2025, pasar *global mobile gaming* akan meningkat hingga 125 miliar dolar AS. Untuk itu, tujuan utama kegiatan ini adalah mengembangkan rantai nilai pengembangan gim untuk (1) menguasai minimal 70% dari pasar nasional dan 10% dari pasar global, (2) menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara menarik dan kreatif, dan (3) melestarikan kearifan lokal dan 718 bahasa daerah.



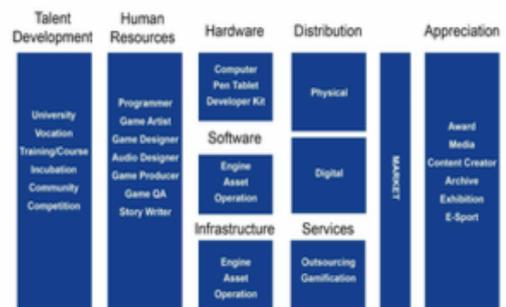
Sumber: Newzoo dan Riset Kominfo, LIPI, dan AGI, 2021

Gambar 82 Diagram Perbandingan Gim Lokal vs Gim Asing Tahun 2021

Grafik 12 Prediksi Perkembangan Pengeluaran untuk Video Game melalui HP, Konsol, ataupun PC (dalam miliar dolar AS)



Sumber: IBISWorld, 2020



Sumber: AGI, 2021, diolah

Pengembangan Industri Gim Nasional dibahas dalam ratas dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan *stakeholders* terkait dengan pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi, proteksi pasar, *captive market*, anggaran dan pendanaan, penguatan talenta dan SDM, dan pembangunan karakter dengan nilai-nilai kebangsaan. Berikut rantai nilai pengembangan gim.

Kemenkomarves menginisiasi dan mengoordinasikan pengembangan industri gim lokal, sebagai salah satu sub-sektor ekonomi kreatif. Kemenko

Marves juga mengoordinasikan K/L terkait untuk melahirkan 9 Usulan Program K/L yaitu:

- a. Penetapan industri gim sebagai industri pionir dan penambahan KBLI 62011 terkait industri gim dan KBLI 58200 terkait penerbit gim agar dimasukkan dalam ekonomi digital untuk mendapatkan *tax holiday*.
- b. Pembentukan BLU sebagai kendaraan pengembangan industri gim Indonesia
- c. Pembuatan regulasi proteksi pasar melalui peraturan *Indonesia Game Rating System*, Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan Perlindungan Data Pribadi.
- d. Pengadaan teknologi dan infrastruktur yang dapat digunakan bersama-sama oleh pengembang gim nasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- e. Pembangunan industri perangkat keras.
- f. Penciptaan *captive market* dengan memproduksi dan penggunaan gim lokal dalam berbagai kegiatan.
- g. Pengembangan SDM dan talenta, penyesuaian kurikulum, pembiayaan dan permodalan, penyediaan guru tamu, riset terapan, dan penyusunan kebijakan selaras dengan upaya pencapaian SDGs 2030.
- h. Promosi dan dukungan *showcasing* Gim Nasional pada berbagai *Side Events* G20, APEC, Tahun Kekayaan Intelektual 2022, dan Piala Presiden beserta kegiatan internasional lainnya di dalam dan luar negeri.
- i. Pengembangan literasi digital bagi masyarakat pada pengembangan Gim Nasional



Gambar 83 Tujuh Kelompok Kerja Pengembangan Industri Gim Lokal

Untuk pendukung pengembangan gim lokal, telah dibentuk tujuh kelompok kerja yang terdiri dari berbagai K/L untuk mewujudkan penanaman nilai-nilai Pancasila, penguasaan pasar, dan pelestarian bahasa lokal. Setiap Pokja mempunyai target yang harus tercapai pada 2022, 2023, dan 2024. Penentuan target berdasarkan skala prioritas 1 sampai 5 yang merupakan hasil kesepakatan antara K/L dan industri nasional, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9 Tugas dan Fungsi Pokja Pengembangan Industri Gim Lokal

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
1	Pengembangan SDM: Target 3000 talenta / tahun, 100 gim	Kemendikbud Ristek, Kemenparekraf, Kominfo, Kemenperin (BPSDM), Kemenkop UKM, AGI, CAKRA, Akademisi, BI, OJK, dan pelaku industri.	1.1	Kemendikbud Ristek, Kominfo, dan Asosiasi/Industri (mis. AGI dan CAKRA)	2	Membuat program pelatihan dan pendampingan SDM yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan	Terdapat program yang dapat melatih 3.000 SDM di bidang pengembangan video gim dan menciptakan 100 game lokal baru setiap tahun
			1.2	Kemendikbud, Kominfo, dan Asosiasi/Industri (mis. CAKRA, AGI, ILLS, dan Katapel)	2	Program peningkatan SDM di bidang Game Business, termasuk marketing, branding dan positioning	Tercipta 100 talent di bidang game business
			1.3	Kominfo, Kemenaker, dan Asosiasi/Industri (mis. AGI)	3	Menyusun SKKNI aktivitas pengembangan video gim	Terdapat SKKNI untuk aktivitas pengembangan video gim (KBLI 62011) di tahun 2022
			1.4	Kemendikbudristek	3	Menyusun kurikulum pada SMK, Vokasi, dan Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan SDM pada aktivitas pengembangan video gim	Terdapat kurikulum untuk penciptaan SDM di bidang pengembangan video gim di bidang game programming, game art, dan game design di tahun 2022
			1.5	Kemendikbudristek	4	Membuat kebijakan untuk mempermudah SDM asing berkompentensi tinggi (high skilled talent) di bidang aktivitas pengembangan video gim untuk bekerja di Indonesia	Terdapat kebijakan bagi SDM asing berkompentensi tinggi di bidang aktivitas pengembangan video gim untuk bekerja di Indonesia dengan skema yang mudah untuk mendapatkan izin di tahun 2022
			1.6	Kemendikbudristek, Kemenparekraf, dan BPS	5	Menyusun Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) industri gim di Indonesia	Terdapat KBJI industri gim di tahun 2022

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
2	Investasi: Pembayaran dan Pemodalatan 40 juta dolar AS/ tahun	OJK, KemenInves, dan HIMBARA (BNI) serta Kemenparekraf, Kemendikbud Ristek, Kemenkumham, Kemnaker, Kominfo, Kemendag, Kemenperin, KemenBUMN, BI, BPS, Asppindo (Jamkrindo), AGI, CAKRA, ASPI, AFTEC, LPEI, AMVESINDO, Mandiri Capital Indonesia, dan pelaku industri.	2.1	Kemenparekraf dan Kominfo	1	Membentuk BLU untuk mengkomersialisasikan dan mendukung pertumbuhan konten kreatif, terutama video gim	Terbentuk sebuah BLU yang berfokus pada pengembangan industri gim di dalam negeri di tahun 2022
			2.2	Kominfo, Kemendikbudristek, Kemenparekraf dan Asosiasi (mis. AGI)	1	Menyusun skema pendanaan via matching-fund, venture capital, USO, dan PEN	Terdapat skema pendanaan Indonesia Game Fund yang dapat mendanai pengembangan gim lokal sebesar 40 juta dolar AS / 600 milyar rupiah per tahun
			2.3	Kemenparekraf dan Asosiasi/Industri (mis. Katapel)	1	Membentuk badan atau lembaga yang bertugas untuk memvaluasi HKI, jual-beli HKI, mediasi konflik HKI	Terdapat sebuah badan atau lembaga yang berfokus pada memvaluasi HKI, jual-beli HKI, dan mediasi konflik HKI dan gim lokal di tahun 2022
			2.4	Himbara, OJK, dan Kemenparekraf	2	Menyusun skema penjaminan dan pembiayaan industri gim lokal kepada perbankan	Terdapat skema pembiayaan untuk usaha berbasis kekayaan intelektual dari sektor perbankan yang diatur melalui regulasi RPP Ekraf di 2022
			2.5	Kemenkeu, Kemenparekraf, Asosiasi/Industri (mis. Cakra ILLS, dan Katapel)	2	Menyusun kebijakan untuk memberikan TAX insentif bagi perusahaan lokal berinvestasi di industri gim dan IP	Meningkatkan investasi modal ventura swasta (investor) dan pemerintah ke Industry game dan IP menjadi 5% dari keseluruhan investasi yang mereka lakukan dalam satu tahun dengan insentif deductible TAX 5% dari pajak total
			2.6	Kemenkeu	3	Menyusun kebijakan yang dapat memberikan fasilitas Tax Holiday untuk pengembang gim (kode KBLI: 62011) dan penerbit gim (kode KBLI: 58200)	Memasukan aktivitas pengembangan gim (kode KBLI 62011) dan penerbitan gim (58200) sebagai industri pionir dan menambahkan KEK untuk industri gim di tahun 2022
			2.7	Kominfo dan Kemenkeu	3	Penyusunan Sistem Pembayaran secara inklusif di platform distribusi gim (Apple Store, Google Play, Steam, dll) untuk memberi akses 3rd party payment seperti di korea selatan	Terdapat regulasi yang mewajibkan platform distribusi gim untuk memberikan akses kepada sistem pembayaran elektronik lokal sebagai alternatif kanal pembayaran digital di 2022
			2.8	Kemeninvest	4	Menyusun aturan untuk menerapkan aktivitas penerbitan gim kedalam Daftar Negatif Investasi (DNI)	Terdapat aturan yang membatasi kepemilikan asing pada perusahaan penerbit gim sebesar 49% di 2022

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
3	Promosi dan Pembukaan Akses Pasar (Promosi di kawasan Asia Tenggara, sinergi dengan BBI, termasuk toko daring LKPP dan PADI, dan market intelligence)	Kemendag, Kemlu, Kemeninves, dan Kemenparekraf serta Kemendikbud Ristek, Kemenperin, Kominfo, Kemenparib, Kemenparekraf, Kemenpora, APSI, Kemenkop UKM, KemenBUMN, LKPP, iDEA, ATSI	3.1	Kemendag, Kemenparib, dan Asosiasi/Industri (mis. AGI, dan CAKRA)	2	Membuat Captive Market, untuk gim lokal berkompetisi dalam ekosistem yang less competitive	Kementerian, lembaga, dan BUMN menganggarkan penggunaan dan pemintaan produk gim lokal untuk mendukung pelaksanaan fungsinya
			3.2	Asosiasi/Industri (mis. ILS dan Katapel)	2	Substitusi impor lisensi IP yang digunakan untuk marketing campaign atau kegiatan aktifitas lainnya oleh perusahaan lokal, BUMN dan pemerintah	Terjadi penyerapan IP/gim lokal oleh K/L, BUMN dan Swasta sebesar 25% dari jumlah IP/game lokal yang digunakan untuk kegiatan aktifitas dan marketing campaign
			3.3	Asosiasi/Industri (mis. ILS dan Katapel)	2	Membangun ekosistem bisnis IP dari game-game yang sudah cukup mature untuk meningkatkan akses pasar, nilai tambah, model bisnis, revenue stream dan sustainability dari IP gim tersebut	Terjadi pengembangan IP gim sebesar 25% dari total IP game yang sudah cukup mature ke sektor lain seperti komik, film, animasi dan merchandise.
			3.4	Kemendag, Kemenparekraf, Kemenpora, Kominfo, dan Kemlu	3	Melakukan promosi gim lokal dan pembukaan akses pasar di luar negeri	Terdapat kegiatan promosi gim lokal di: a. luar negeri: mempromosikan 30 gim lokal tiap tahun b. dalam negeri: mempromosikan 100 gim lokal tiap tahun
			3.5	Kemendag	4	Melakukan sinergi promosi dengan ecommerce di Indonesia	Terdapat slot khusus untuk promosi gim lokal di dalam ecommerce/marketplace lokal (IDEA)
			3.6	Kemenperin	4	Menyusun skema Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk memasukan gim lokal ke dalam gawai yang didistribusikan di Indonesia	Terdapat gim lokal yang di-preload pada gawai yang didistribusikan di Indonesia

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
4	Riset dan Pengembangan (Pembangunan Teknologi, market intelligence)	BRIN, Kemendikbud Ristek, dan Kominfo serta Kemenparekraf, Kemenperin, Kemeninves, Kedaireka, AGI, CAKRA, Akademisi, Universitas/Institut, Perguruan Tinggi Vokasi, Pelaku Industri.	4.1	BRIN, Kominfo, dan Asosiasi/Industri (mis. AGI)	1	Menciptakan teknologi piranti keras dan piranti lunak untuk produksi gim	Terdapat teknologi (<i>multiplayer framework, market intelligence, dsb</i>) untuk pengembangan gim yang dapat digunakan bersama oleh pengembang gim di dalam negeri
			4.2	Kominfo, Kemenparekraf, dan Asosiasi/Industri (mis. AGI)	1	Melakukan pemetaan dan pendataan pasar gim lokal secara holistik	Terdapat peta gim lokal dan market gim lokal yang dilakukan setiap tahun
			4.3	BRIN dan Asosiasi/Industri (mis. AGI)	2	Pembentukan Asset Store yang berisi aset-aset gim gratis untuk dapat digunakan dalam gim hasil karya anak bangsa. Aset yang ada dalam platform ini juga akan mencerminkan budaya bangsa dan juga keanekaragaman hayati, hewani, maupun tempat yang mencerminkan kekayaan bangsa Indonesia	Terbentuknya <i>Asset Store platform</i> ini pada tahun 2022
			4.4	BRIN dan Industri	5	Menciptakan pusat pengembangan teknologi dan akselerasi pengembangan gim	Terdapat <i>center of excellence</i> yang menjadi pusat koordinasi strategi riset dan pengembangan serta manajemen teknologi yang digunakan bersama
			4.5	Kominfo dan BUMN	5	Pengembangan jaringan dalam industri gim*	[Strategi umum mengembangkan infrastruktur digital yang akan berimbas ke industri gim, seperti 5G dan pemerataan internet]

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
5	Regulasi Perlindungan pasar (Menciptakan level playing field, gim sesuai dengan karakter kebangsaan, dan penerapan PNBP)	Kominfo, BSN, dan KSP serta Kemenkeu, Kemenparekrif, Kemenperin, Kemeninves, BSN, AGI, CAKRA	5.1	BSN	1	Dukungan dan insentif bagi pelaku industri untuk menerapkan standar SNI/ISO	Terdapat dukungan bagi pelaku industri yang berkomitmen menerapkan standar terkait Tata kelola TI (SNI ISO/IEC 38500); Manajemen layanan informasi (SNI ISO/IEC 20000 series) dan Keamanan informasi (SNI ISO/IEC 27001 dan 27701) serta ISO/IEC 29110 untuk game software testing.
			5.2	Kominfo, KBLI, Kemenperin, Kemenkeu, dan Kemeninves	1	- Penguatan level playing field, termasuk Pengenaan Pajak Hasil untuk gim luar negeri - Membuat regulasi agar perusahaan gim asing yang sudah memiliki dampak ekonomi yang besar dan pengumpulan data pribadi secara masif di Indonesia agar membuat badan hukum dan data center di Indonesia	- Terdapat regulasi yang mengharuskan publisher game asing (KBLI terpisah dari publisher aplikasi) untuk membuat badan usaha di Indonesia dan/atau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk dapat mengakses pasar Indonesia di tahun 2022 - Terdapat regulasi yang mengharuskan perusahaan gim asing untuk membuat badan hukum dan data center di Indonesia jika memiliki dampak ekonomi yang besar dan mengumpulkan data pribadi secara masif di tahun 2022
			5.3	Kominfo	2	Penajaman regulasi Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang IGRS dengan memasukkan unsur cultural fit untuk semua gim asing yang akan masuk di Indonesia	Regulasi IGRS diperkuat dan diperluas untuk mencakup unsur-unsur kebangsaan pada setiap gim yang beredar di Indonesia (regulasi ini bisa dalam bentuk Permen atau Perpres) IGRS juga sebagai dasar atau acuan untuk KIL memberikan insentif, promosi, dan juga endorsement
			5.4	Kemenperin	2*	Penguatan TKDN sebagai perlindungan pasar domestik	Terdapat regulasi untuk membatasi produk gim asing masuk ke pasar Indonesia bila tidak memiliki aspek-aspek kebangsaan

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
6	Pengembangan Industri Perangkat Keras (TKDN, merchandise)	Kemenperin dan Kominfo	6.1	Kemenperin dan Kominfo	1	TKDN perangkat keras mengandung unsur aspek perangkat lunak (aplikasi dan gim) dalam perhitungannya	Tersusunnya regulasi TKDN perangkat keras yang mengandung unsur aspek perangkat lunak (aplikasi dan gim) dalam perhitungannya
			6.2	Kemenperin dan Kominfo	1	Pembuatan skema TKDN untuk perangkat lunak (aplikasi dan gim)	Tersusunnya regulasi TKDN perangkat lunak di tahun 2022
			6.3	Kemenperin	4	Kolaborasi industri manufaktur dengan industri Gim Lokal dalam rangka pengembangan bisnis berbasis IP	Terlaksananya bisnis <i>matching</i> antara Industri manufaktur dengan Industri Gim Lokal
			6.4	Kemenperin	4	Penguatan struktur Industri Pendukung	- Tumbuhnya Industri Semikonduktor di Indonesia pada tahun 2030. Inisiasi pendirian Engineering Centre untuk produk Laptop, HKT, Komputer dan perlengkapannya pada Tahun 2022. - Usulan insentif untuk industri yang memproduksi komponen, infrastruktur dan perangkat keras pendukung industri gim lokal

No	Kelompok Kerja	Entitas	PIC	Prioritas (High 1 - Low 5)	Tugas dan Fungsi	Indeks Kinerja Utama	
7	Aktivasi Gim Lokal di Kawasan Asia Tenggara (Membuat aktivasi di skala regional, AAA game)	AGI dan CAKRA serta pelaku industri	7.1	AGI dan CAKRA	2	Menciptakan skema aktivasi reguler yang profesional dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan gim lokal. Target penyelenggaraan paling lambat pada awal 2023. Meningkatkan aktivasi dan apresiasi terhadap produsen gim lokal dengan mengikutsertakan mereka pada penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional, regional, dan global.	Terdapat kompetisi pembuatan gim lokal secara berkala yang diselenggarakan oleh pelaku industri profesional sebagai insentif dan apresiasi bagi gim-gim terbaik buatan dalam negeri
			7.2	AGI, Cakra, IILS, dan Katapel	2	Melibatkan gim lokal di segala kegiatan aktivasi pada tingkat nasional.	

47. Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20

Indonesia akan memegang Presidensi G20 untuk tahun 2022, setelah sebelumnya diserahkan dari Italia pada Desember 2021. Kepercayaan ini merupakan pertama kalinya bagi Indonesia sejak dibentuknya G20 pada 1999. Permasalahan utama pada kegiatan ini adalah belum optimalnya pemanfaatan KTT G20 sebagai batu loncatan pemulihan ekonomi nasional dan sarana peningkatan investasi.

KTT G20 diharapkan menjadi sarana pemulihan ekonomi nasional, termasuk investasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan



Gambar 84 Salah Satu Lokasi DSPP untuk Pelaksanaan G20 2022

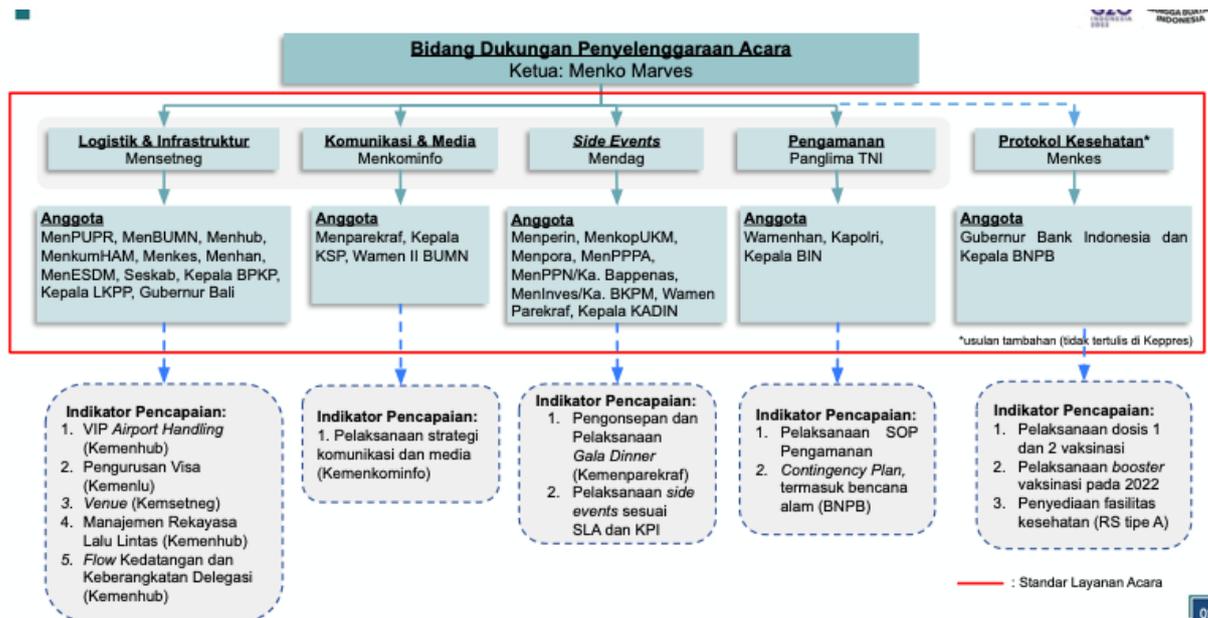
berbagai kegiatan terutama pada lima DPSP serta pembentukan dan penerapan norma dan agenda berdasarkan nilai-nilai ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pemetaan keuntungan ekonomi dan politik pasca penyelenggaraan rangkaian acara KTT G20 sehingga memberikan manfaat lebih dari

1,2 triliun Rupiah, penentuan parameter *output* dan *outcome* yang terukur, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi di lima DPSP.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. Kemenko Marves juga berperan sebagai Wakil Ketua Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara. 10 (sepuluh) langkah persiapan bidang dukungan penyelenggaraan acara adalah sebagai berikut: (1) Penetapan Standar Layanan Acara, Indikator Pencapaian, lini masa 2021-2022 pada 30 November 2021. Hal ini akan memudahkan Presiden RI untuk memantau kualitas penyelenggaraan acara; (2) Penekanan angka kasus harian Covid-19 dan peningkatan kecepatan vaksinasi di lokasi penyelenggaraan *pre-events*, *side events*, dan KTT; (3) Penerapan protokol kesehatan dan CHSE yang bersifat komprehensif; (4) Pelaksanaan simulasi pengamanan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan pembuatan rute evakuasi bencana; (5) Penempatan personil keamanan dan pembagian zonasi area berdasarkan tingkat keamanan; (6) Pembuatan sistem dokumen perjalanan yang terintegrasi dan bersifat *end-to-end* (e-Hac, Paspor Vaksin, dan Visa); (7) Penggunaan energi ramah lingkungan, seperti penggunaan mobil listrik; (8) Penggunaan produk dalam negeri; (9) Penerapan strategi komunikasi publik; dan (10) Pembuatan travel *pattern* dan paket wisata.

Dalam rangka mendukung persiapan KTT G20, pada November 2021 Menko Marves telah meninjau kondisi jalan dan *venue* yang akan dikunjungi pada kegiatan KTT G20 di Bali. Hal yang ditinjau dalam kunjungan lapangan antara lain alur kedatangan delegasi G20, kesiapan fasilitas kesehatan kawasan Nusa Dua, dan *venue* pelaksanaan KTT G20. Koordinasi dilaksanakan untuk membahas kesiapan penyelenggaraan G20 2022, khususnya pada Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

Gambar 85 Indikator Pencapaian Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara



Tabel 10 Tugas dan Fungsi Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20

Sub-Bidang Logistik dan Infrastruktur	Sub-Bidang Logistik dan Infrastruktur:
<ul style="list-style-type: none"> i. KemenPUPR agar memastikan kesiapan infrastruktur aksesibilitas dan amenitas di berbagai lokasi penyelenggaraan kegiatan G20. ii. Kemenhub agar menyiapkan moda transportasi dan MRLL pada saat penyelenggaraan kegiatan G20, termasuk (1) simulasi alur kendaraan delegasi dan (2) penyediaan lahan parkir. iii. Kemenhub agar membersihkan kapal-kapal terbengkalai yang ada di Kawasan Benoa. iv. KemenBUMN agar dapat berkoordinasi dengan PT PLN dan PT INKA dalam penyediaan bis listrik dan <i>charging station</i>. v. Kemlu bersama Kemenkeu agar memastikan alur kedatangan dan kepulangan delegasi G20 berjalan. vi. Kemensetneg agar memastikan (1) pelaksanaan <i>luncheon</i> untuk menyesuaikan arsitektur The Apurva Kempinski, (2) penyediaan produk-produk lokal sebagai cinderamata bagi para delegasi, dan (3) penyediaan produk ramah lingkungan. vii. Kemenparekraf agar mematangkan konsep <i>gala dinner</i> di GWK dengan mengangkat nilai-nilai kebudayaan Indonesia. viii. Pemprov Bali bersama PLN dan Telkom agar memastikan kesiapan infrastruktur di sekitar kawasan pelaksanaan KTT G20, termasuk penanganan sampah dan <i>ducting</i> utilitas (listrik dan jaringan telekomunikasi). ix. Kemensetneg bersama PHRI agar mengkoordinir hotel-hotel bagi delegasi untuk melakukan renovasi dan beautifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kemendag agar berkoordinasi dengan Kemenko Ekon dan Kemlu untuk memastikan seluruh usulan <i>side events</i> masuk ke dalam <i>calendar of events</i> Presidensi G20 Indonesia; ii. Kominfo agar berkoordinasi dengan Kemenko Ekon dan Kemlu untuk dapat meluncurkan <i>calendar of events</i> G20 melalui situs resmi dan media, bertepatan dengan agenda serah terima Presidensi pada 1 Desember 2021; dan KADIN, LPS, dan THK Forum agar segera berkoordinasi dengan Kemendag untuk mengajukan usulan <i>side events</i> (1) KTT AIS Forum, (2) Blomberg CEO Forum, (3) World Economic Forum, (4) B20 Seminar Pembentukan Pasar Karbon, dan (5) THK Blended Finance, termasuk rekomendasi tanggal dan lokasi penyelenggaraannya;

Sub-Bidang Komunikasi dan Media:	Sub-Bidang Pengamanan:	Sub-Bidang Protokol Kesehatan:
<p>i. Kemenkominfo agar meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi melalui penyediaan jaringan 5G pada titik pelaksanaan KTT G20.</p> <p>ii. Kemenkominfo bersama media agar memperhitungkan keuntungan pelaksanaan rangkaian G20 dan melakukan publikasi;</p>	<p>TNI bersama Polri, dan BNPB agar melakukan <i>Tabletop Exercise</i> (TTX) mitigasi bencana pada Juli atau Agustus 2022;</p>	<p>i. Kemenkes agar memastikan kesiapan fasilitas kesehatan yang memadai dan berstandar internasional di seluruh lokasi penyelenggaraan event G20.</p> <p>ii. Kemenkes bersama Pemrov Bali agar memastikan penerapan protokol kesehatan dan penggunaan PeduliLindungi di tempat-tempat umum di seluruh wilayah Bali.</p>

Selanjutnya, telah dilaksanakan pertemuan terpisah dengan masing-masing bidang di bawah Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara guna menerima perkembangan persiapan G20. Sampai dengan saat ini, telah terdapat 117 *side events* yang tersebar di 20 kota dan hasil gladi KTT G20 yang dilaksanakan pada 27 Desember 2021 lalu disampaikan kepada Presiden RI dalam bentuk video pada 10 Januari 2022.

Lokasi Persebaran Side Events G20 2022



Gambar 86 Lokasi Persebaran Side Events G20 2022

Sementara itu, SLA dan KPI sudah selesai dirancang oleh masing-masing K/L terkait dalam rangkaian *Sherpa Track*, *Finance Track*, dan *Side Events*. Ke depannya, akan dirancang SLA khusus bagi pelaksanaan KTT G20.

48. Koordinasi Rencana Aksi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual

Indonesia masih bertumpu pada sektor pemanfaatan SDA yang bersifat *material* dengan jumlah cadangan yang terbatas, dan *trend* dunia yang berfokus pada pengurangan penggunaan SDA (*net zero emission*) pada 2030. Selain itu, tercatat pendapatan negara atas sektor SDA terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Diharapkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sektor yang bertumpu pada sumber daya *immaterial* yang tidak akan

pernah habis yaitu SDM, dapat menjadi salah satu sektor penopang penerimaan negara pada 2030. Telah dilaksanakan pemetaan strategi nasional KKI, dimana langkah awal yang akan dilakukan adalah pembentukan sistem hulu-hilir KI melalui pembagian peran K/L di Indonesia.

Permasalahan utama isu ini adalah belum optimalnya komersialisasi KI di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum terciptanya ekosistem inovasi (KI), terutama dalam hal strategi komersialisasi dan alih teknologi, serta valuasi KI. Berdasarkan IP Index 2021, Indonesia menempati peringkat ke 14 di Asia dan peringkat 48 dari 53 negara di dunia.

Tabel 11 Peringkat IP Index 2021

Negara	Nilai	Peringkat Regional	Peringkat Dunia
Japan	91.12%	1	5
Singapore	84.38%	2	11
South Korea	83.73%	3	12
Australia	80.55%	4	14
New Zealand	69.10%	5	20
Taiwan	66.18%	6	21
China	54.86%	7	24
Malaysia	51.61%	8	27
Brunei	41.13%	9	36
Philippines	39.81%	10	38
India	38.40%	11	40
Vietnam	37.49%	12	41
Thailand	35.56%	13	45
Indonesia	30.16%	14	48
Pakistan	26.43%	15	52

Sumber: U.S Chamber Internasional IP Index 2021

Sebagai perbandingan, penerimaan Indonesia dari KI hanya 0,001% dari penerimaan Jepang dan 0,006% dari penerimaan Singapura. Pada 2019, Jepang menerima 47 miliar Dollar AS dan Singapura menerima 8 miliar Dollar AS atas penggunaan paten, hak cipta, hak merek, desain industri, rahasia dagang, dan waralaba.

Tujuan utama program ini adalah optimalisasi komersialisasi KI melalui pembentukan strategi nasional sebagai langkah cepat dalam memperbaiki sistem inovasi, membentuk ekosistem bisnis berbasis KI, dan memperbaiki iklim investasi dalam rangka meningkatkan komersialisasi dan monetisasi KI di Indonesia.

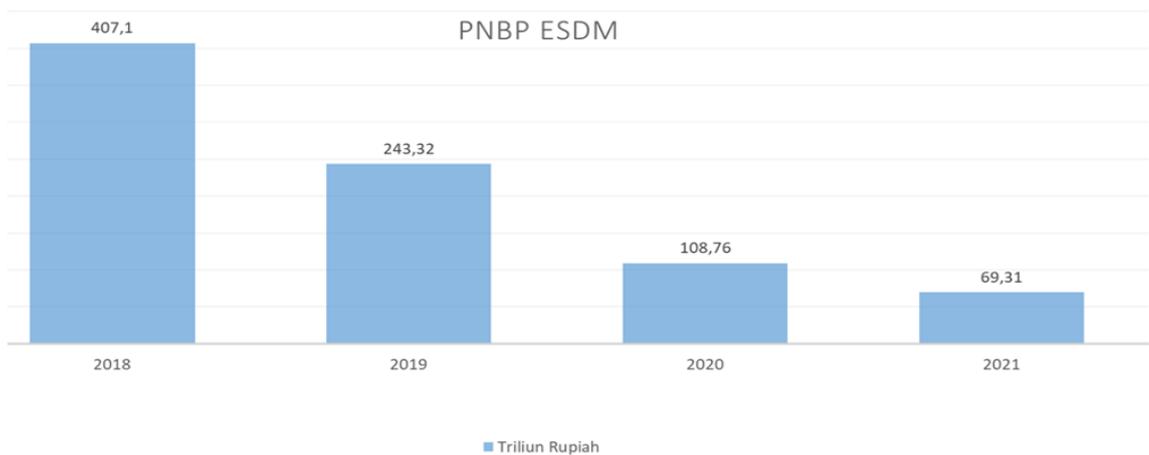
Tabel 12 Realisasi PNBPN atas KI yang tercatat pada Kemenkum HAM, Kementan, Kemendikbud, KemenPUPR, LIPI, dan Lapan

Jenis PNBPN	2018	2019	2020	2021*
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	498.269.886.505	714.606.483.255	789.869.148.564	557.333.758.102
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	5.501.225.568	9.446.517.906	4.255.683.805	3.846.029.807

Sumber: Kemenkeu, 2020

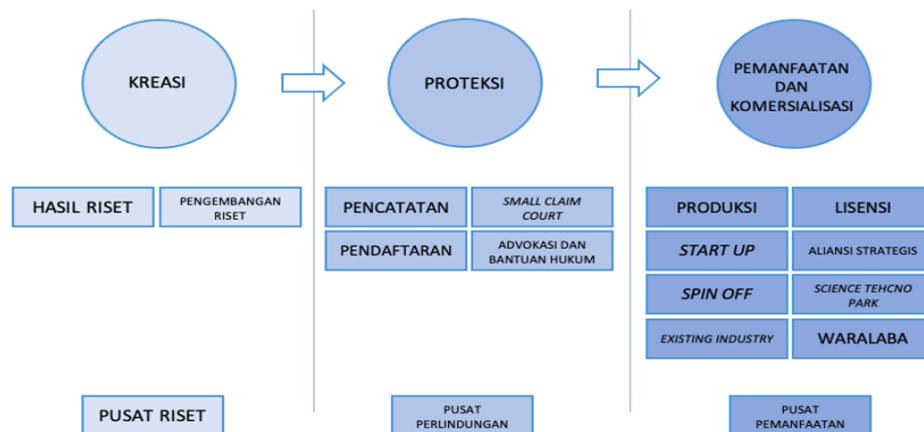
PNBP atas KI di Indonesia termasuk rendah. Pada 2020, PNBP atas pelayanan KI dan royalti tercatat masing-masing hanya sebesar 0,0054% dan 0,0039% dibandingkan sektor ESDM. Hal ini disebabkan salah satunya karena belum adanya pendataan secara terpusat. Saat ini, pendataan pendapatan negara atas KI yang masih bersifat spasial dan tersebar pada beberapa K/L. Hal ini berbeda dengan data penerimaan sektor ESDM yang terpusat dan mudah untuk diakses.

Grafik 13 Tren Penerimaan Negara Atas ESDM Yang Berasal Dari SDA



Sumber: KemenESDM

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris, yang mewajibkan untuk melakukan pengurangan secara masif terhadap energi fosil pada 2030. Penerimaan KI utamanya pada sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi salah satu sektor penopang penerimaan negara pada 2030. Kemenko Marves berperan dalam mendorong optimalisasi komersialisasi KI dengan mengoordinasikan pihak-pihak terkait melalui pembentukan strategi nasional.



Gambar 87 Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI

Sumber: Budi Agus Riswandi, UII

Diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas KI. Hal ini dilakukan melalui pembentukan pusat kreasi, penyederhanaan proses pendaftaran/perizinan atas kreasi dan penguatan perlindungan hukum, serta optimalisasi pemanfaatan kreasi yang akan tertuang dalam payung hukum berupa Perpres/Keppres.

Lima strategi dalam upaya komersialisasi KI antara lain: (i). Regulasi, melalui pembentukan konsep payung hukum strategi nasional komersialisasi KI, (ii). Lembaga Manajemen KI lembaga, Lembaga/badan yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai perantara komersialisasi antara inventor dengan investor, serta melakukan valuasi atas KI, (iii). Parameter Valuasi KI, penentuan parameter atau variabel perhitungan valuasi KI, (iv). Sistem, pembentukan sistem hulu-hilir KI dengan memuat prinsip keterbukaan informasi transaksi dan efisiensi manajemen HAKI, dan (v). Edukasi dan promosi, atas keunggulan/keuntungan pemanfaatan KI bagi masyarakat.

Tahun 2022 akan difokuskan pada pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan KI yang bersifat massal dan masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas KI. Program agar dapat dilaksanakan menjadi tiga tahap antara lain (i). penguatan pemerintah pusat, dimana melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, (ii) penguatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, (iii) penguatan masyarakat.

49. Koordinasi Kebijakan Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi



Gambar 88 Kemenko Marves Dalam Rangka Menginisiasi Terhadap Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Sehubungan hal tersebut Kemenko Marves menginisiasi Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Hal ini guna mendorong masuknya investasi strategis ke Indonesia. Perubahan ini dilakukan dalam upaya mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Kemenko Marves memiliki program prioritas terkait rekomendasi kerangka regulasi pendukung investasi strategis yaitu RPP perubahan kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Progres capaian program prioritas telah mencapai 100% dan sedang menunggu di tanda tangani oleh Presiden. PP Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi mengalami perubahan pengaturan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tarif 1,75% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha orang perseorangan dan kualifikasi usaha kecil
- b. Tarif 4% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
- c. Tarif 2,65% untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
- d. Tarif 3,5% untuk Konsultasi Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
- e. Tarif 6% untuk Konsultasi Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Capaian atas kegiatan Perubahan atas PP Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sedang menunggu proses penandatanganan oleh Presiden.

Kendala dari pelaksanaan kegiatan yaitu adanya pergantian PIC dalam pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi terhambat. Tindaklanjut dari Koordinasi Kebijakan Perubahan PP Nomor 51 Tahun 2008, yaitu:

- a. Proses harmonisasi selesai pada bulan Januari 2022 untuk selanjutnya dikirimkan ke Presiden untuk pengesahan
- b. Perlunya monitoring pelaksanaan penerapan Perubahan PP No 51 Tahun 2008 jika telah diundangkan

50. Koordinasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

Dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang kurang

lebih 2.828 km terus digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Dengan pembangunan 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, khususnya di regional Sumatera, meningkatkan konektivitas dan sistem logistik, kenyamanan masyarakat dalam berkendara, serta terjadi efisiensi waktu tempuh antar kota-kota di Pulau Sumatera.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tahapan kritikal yang menentukan capaian target pembangunan sesuai jadwal yang ditetapkan adalah tahapan pengadaan lahan/tanah. Tahapan ini juga menentukan tingkat efisiensi dan penghematan anggaran proyek, didasarkan pada fakta bahwa harga tanah terus naik dari waktu ke waktu. Isu utama dalam pengadaan lahan adalah isu percepatan dan peningkatan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian K/L terkait serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Peradilan, aparat keamanan dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyederhanaan prosedur pengadaan lahan dan memangkas jumlah hari dalam pengadaan lahan.

Kemenko Marves melaksanakan koordinasi kebijakan percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang diharapkan dapat menekan biaya capital *expenditure* (capex) atau belanja modal dalam proyek JTTS di 24 ruas. Kebutuhan untuk investasi Jalan Tol Trans Sumatera sebesar Rp476 triliun. Dari total investasi itu masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas *backbone* sampai tahun 2024.

Adapun capaian koordinasi dan pengendalian kebijakan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Dari 24 ruas JTTS yang direncanakan, saat ini telah beroperasi seluruh seksi sebanyak 9 ruas (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi 1 dan 2 A), Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Bakauheni-Terbanggi Besar, Sigli-Banda Aceh (Seksi 3 dan 4), Pekanbaru-Kandis dan Kandis-Dumai).
- b. Sebanyak 8 ruas saat ini sedang dilaksanakan konstruksi dan 1 ruas penyelesaian konstruksi, yaitu Bengkulu-Taba Penanjung (Seksi 1 Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau), Padang-Sicincin (Seksi 1 Tol Padang-Bukittinggi), Sp. Indralaya-Prabumulih (Seksi 1 Tol Sp. Indralaya-Lubuk Linggau), Binjai-Stabat (Seksi 1 Tol Binjai-Langsa), Pekanbaru-Bangkinang (Seksi 1 Tol Pekanbaru-Bukittinggi), Tebing Tinggi-Pematang Siantar (Seksi 3 dan Seksi 4 Tol Tebing Tinggi-Sibolga), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Indrapura, Indrapura-Kisaran dan penyelesaian Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 1 dan 2, 4 dan 6)
- c. Sebanyak 2 ruas telah selesai tahap persiapan dan penetapan penentuan lokasi, dan baru dimulai tahapan pengadaan tanah yaitu Betung-Tempino-Jambi dan Jambi-Rengat. Sedangkan 2 ruas lain masih pada tahap

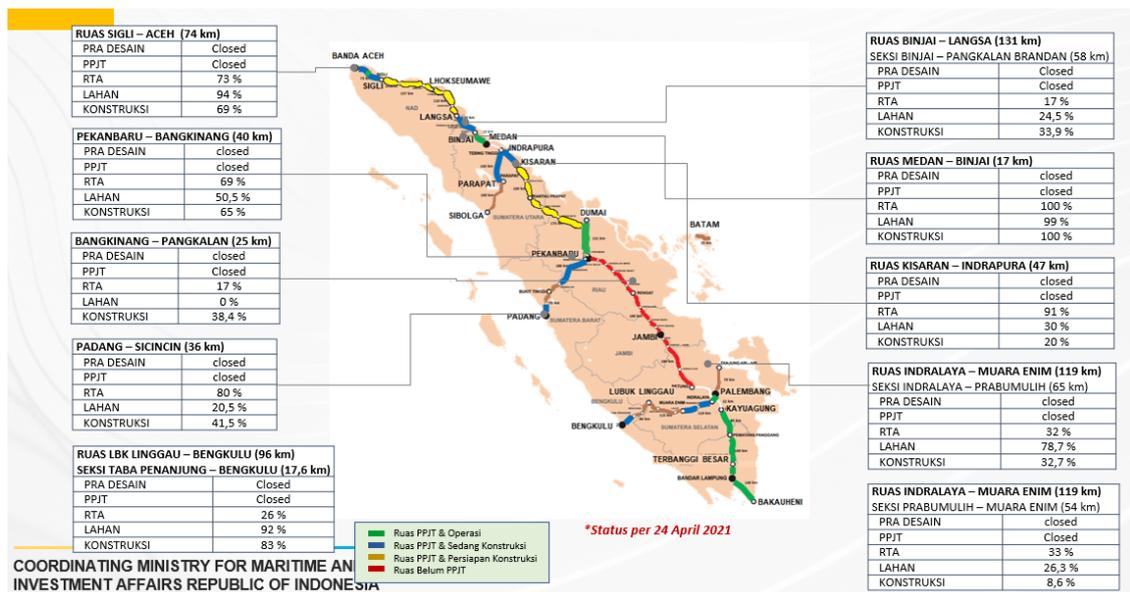
- persiapan dan penetapan penentuan lokasi, yaitu Sigli-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Langsa
- d. Sebanyak 3 ruas dilaksanakan tahap persiapan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), yaitu Pekanbaru-Rengat, Kisaran-RantauPrapat, dan Rantau Prapat-Sp. Sigambal-Dumai
 - e. Penyelesaian permasalahan *Outstanding* Pengembalian Dana Talangan Tanah (DTT) PT Utama Karya, dari Total DTT Rp. 9,6 Trilyun telah dapat dikembalikan hampir seluruhnya dengan sisa DTT yang belum kembali sebesar Rp. 22,895 Miliar (0,2%).

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sebagai berikut:

- a. Kurangnya alokasi dana pengadaan lahan dan konstruksi. Pada tahun anggaran 2021 dibutuhkan dana pengadaan tanah sebesar Rp6,66 Trilyun namun baru dipenuhi sebesar Rp956 Miliar. Sedangkan dana konstruksi yang dijanjikan dari Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT. Utama Karya baru dikucurkan sebagian. Sehingga sebagian ruas tidak lagi memiliki alokasi dana pengadaan tanah dan kesulitan pendanaan konstruksi, yang akan berimbas pada target penyelesaian JTTS pada tahun 2024
- b. Kesulitan pendanaan PT Utama Marga Waskita (PT. Hamawas) dalam penyelesaian konstruksi Tol Kualatanjung-Tebing Tinggi-Indrapura dan Tebing Tinggi-Pematang Siantar. Permasalahan ini terjadi karena pemegang saham (PT Utama Karya) belum mengucurkan kembali dana konstruksi ditengah isu mundurnya PT. Jasa Marga dan PT. Waskita Karya dalam konsorsium
- c. Kesulitan pendanaan PT Waskita Sriwijaya Tol (PT. WST) dalam penyelesaian Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (*unsolicited*). PT. WST mengalami kesulitan dalam mencari investor untuk penyelesaian Tol Kapalbetung dan menunggu pengucuran PMN yang akan diberikan pemerintah kepada induk perusahaan PT. Waskita Karya.

Tindaklanjut dari Kemenko Marves, antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi, melakukan monitoring dan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan pembahasan lahan oleh Kemenko Marves.
- b. Fasilitasi rakor tingkat Eselon I, khususnya terkait alokasi dana pengadaan tanah dan biaya konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
- c. Terkait pengembalian DTT, terus mendorong penyelesaian sertifikasi *ineligible* (khususnya di Provinsi Lampung) dan mendorong penyelesaian proses pemberkasan di PPK dan Kantah/Kanwil ATR/BPN (khususnya di Provinsi Riau). Mengadakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan di kedua provinsi tersebut dengan tujuan mendorong penuntasan masalah.
- d. Terkait permasalahan tegakan yang tidak dapat dikuasai (Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), fasilitasi Rakor Tingkat Eselon I terkait penyelesaian pengembalian DTT Utama Karya dan solusi pembayaran selain nilai lahan sendiri (tegakan) dimaksud untuk trase tol yang akan dibebaskan ke depannya
- e. Terkait kesulitan pendanaan PT. Hamawas dan PT. WST, Kemenko Marves memfasilitasi Rakor dengan mengundang PT. Hamawas dan PT. WST



Gambar 89 Peta Jaringan JTTS – Ruas Sudah PPJT dan Konstruksi

51. General Lecture Core Values Aparatur Sipil Negara

Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden kepada seluruh K/L maupun Pemerintah Daerah memiliki *core values* (nilai inti) BerAKHLAK agar menjadi fondasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang profesional. BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi kerja Aparatur Sipil Negara yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, komponen di dalamnya meliputi:

- Berorientasi pada pelayanan: Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- Akuntabel: Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan;
- Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara
- Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- Kolaboratif: Membangun kerja sama yang sinergis.

Penanaman BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dapat diaplikasikan mulai dari sendiri, melayani rekan kerja dan masyarakat, dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

52. Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Implementasi pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan melalui 8 agenda perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: a)Manajemen perubahan; b)Penataan peraturan perundang-undangan; c)Penataan dan penguatan organisasi; d)Penataan tatalaksana; e)Penataan sistem manajemen; f)Penguatan akuntabilitas; g)Penguatan pengawasan; dan h)Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program Prioritas Kemenko Marves terkait penyederhanaan birokrasi pada tahun 2021 berfokus pada pengalihan atau penyeteraan Jabatan Administrasi (Eselon III dan IV) ke dalam Jabatan Fungsional. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyusunan matriks usulan penyederhanaan birokrasi untuk Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang telah diselenggarakan;
- b. Validasi Penyeteraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional telah diselenggarakan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian PANRB;
- c. Pelantikan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.



Gambar 90 Penyerahan *Reward* atas Pencapaian Pelaksanaan RB Unit Kerja Terbaik Kemenko Marves

Pada tahun 2021, Kemenko Marves telah melaksanakan Evaluasi RB merujuk surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan - Kementerian PANRB Nomor B/201/RB.04/2021 tanggal 1 September 2021. Evaluasi dilaksanakan tanggal 14 September 2021 yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III dan Tim Evaluator Kementerian PANRB.

Pelaksanaan Evaluasi RB merupakan agenda tahunan Kementerian PANRB yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan RB di lingkungan Kemenko Marves dengan menunjuk beberapa unit kerja sebagai perwakilan untuk masing-masing memaparkan kegiatan RB pada 8 area perubahan RB (*before-after*), implementasi RB di masa pandemi Covid-19 dan inovasi-inovasi di bidang pengawasan, penataan sumber daya manusia, dan pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut, tim RB Kementerian dan RB Unit Kerja berkoordinasi untuk menyiapkan bukti dukung yang menjadi catatan Tim Evaluator sebelum dilaksanakan pleno oleh Kementerian PANRB dan diunggah pada aplikasi E-RB untuk kemudian secara informal akan disampaikan kepada Tim Evaluator Kementerian PANRB.

53. Penyusunan dan Pengelolaan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan K/L. BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Adapun kriteria penilaian opini yang mengacu pada SPKN adalah dengan menilai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dan laporan keuangan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Di tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan kembali untuk meraih hasil pemeriksaan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves yakni *entry meeting* oleh BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan K/L (LKLL) Tahun Anggaran 2020 serta menyiapkan *draft action plan* terkait rencana Kemenko Marves dalam mengatasi hasil temuan BPK tahun 2020. Untuk meraih target yang ditentukan, beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves antara lain:

- a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pengelolaan Keuangan;
- b. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;
- c. Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves dalam rangka pencapaian target opini BPK terutama terkait SPI antara lain:

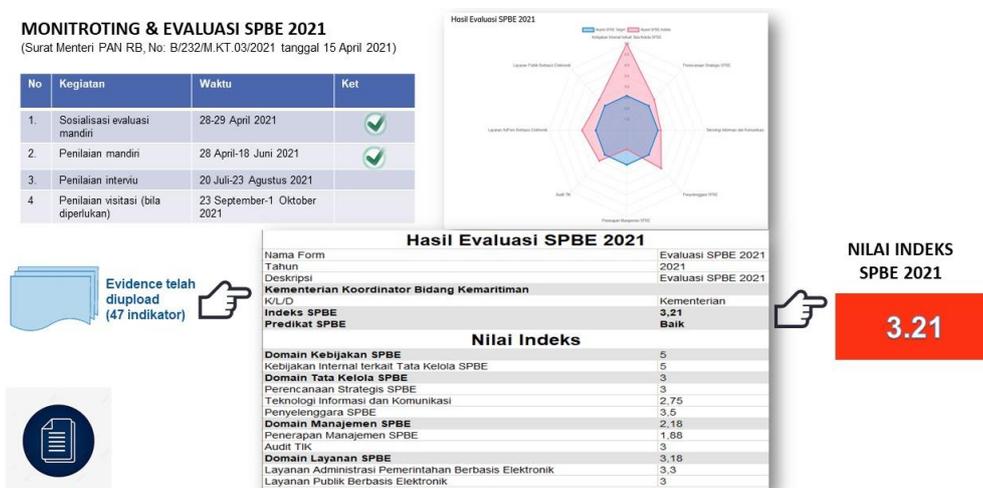
- Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Tahun 2020 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
- Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga;
- Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing unit kerja eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi;
- Meningkatkan peran aktif Inspektorat dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenko Marves.

Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 milik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh hasil WTP. Ini merupakan pencapaian WTP ke lima kali secara berturut-turut sejak tahun 2016. Kedepan, Kemenko Marves akan terus mempertahankan opini WTP dari BPK dengan melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, dan akuntabel.

54. Penilaian Mandiri Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki target Indeks SPBE Kemenko Marves sebesar 3.00 di tahun 2021. Sebagai salahsatu langkah dalam mendapatkan nilai tersebut, Bagian Data dan Sistem Informasi bersama Tim Assessor serta Tim Koordinator SPBE Kemenko Marves melakukan kolaborasi untuk melaksanakan input penilaian dan data dukung (*evidence*) melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi SPBE milik KemenPANRB.

Prosedur selanjutnya yakni seluruh tim melakukan pemutakhiran dari domain Kebijakan Internal, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan yang paling mungkin untuk dilaksanakan dari waktu yang tersisa sampai dengan tanggal 23 Juni 2021. Dengan seluruh data dukung yang terkumpul, didapati nilai indeks SPBE Kemenko Marves adalah 3,21 berdasarkan penilaian Mandiri.



Gambar 91 Monitoring dan Evaluasi SPBE 2021

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu:

a. Persiapan Interview SPBE Dengan Assessor Eksternal

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, membahas terkait penajaman data dukung yang akan disajikan dalam rangka persiapan pelaksanaan interview oleh assessor eksternal KemenPANRB kepada tim internal Pengelola SPBE di Kemenko Marves. Tim assessor internal sepakat menyiapkan berbagai data dukung termasuk diantaranya pembuatan video singkat terkait informasi penggunaan aplikasi yang ada di lingkungan Kemenko Marves serta data dukung lainnya untuk penguatan dalam interview, antara lain manfaat terhadap peningkatan kinerja pegawai.

b. Penyusunan Dokumen Peta Rencana dan Arsitektur SPBE

Penyusunan Dokumen Peta Rencana dan Arsitektur SPBE telah diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2021. Tim Data dan Sistem Informasi dibantu oleh rekanan dalam penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE tersebut. Terdapat beberapa poin yang masih harus dipertegas dalam penyusunan dokumen tersebut. Juga seluruh rencana masih memerlukan perincian yang lebih detail. Sedangkan untuk arsitektur karena secara nasional masih belum ada maka penyusunan dokumen tersebut masih merupakan kerangka untuk diterapkan pada Kemenko Marves. Masa pengerjaan telah dilakukan sesuai dengan data kontrak yang telah ada.

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp314.596.417.000,00 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami 4 (empat) kali *refocusing* karena adanya kebijakan pemerintah akibat pandemi Covid 19, dimana APBN diarahkan untuk lebih fokus dalam menangani pandemi dan akibat dari pandemi Covid 19.

Total anggaran Kemenko Marves yang mengalami *refocusing* sebesar Rp49.618.951.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan tahapan *refocusing* sebagai berikut:

1. *Refocusing* pertama sebesar Rp294.561.417.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
2. *Refocusing* kedua sebesar Rp288.295.467.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
3. *Refocusing* ketiga sebesar Rp284.452.093.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

4. *Refocusing* keempat sebesar Rp264.977.466.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

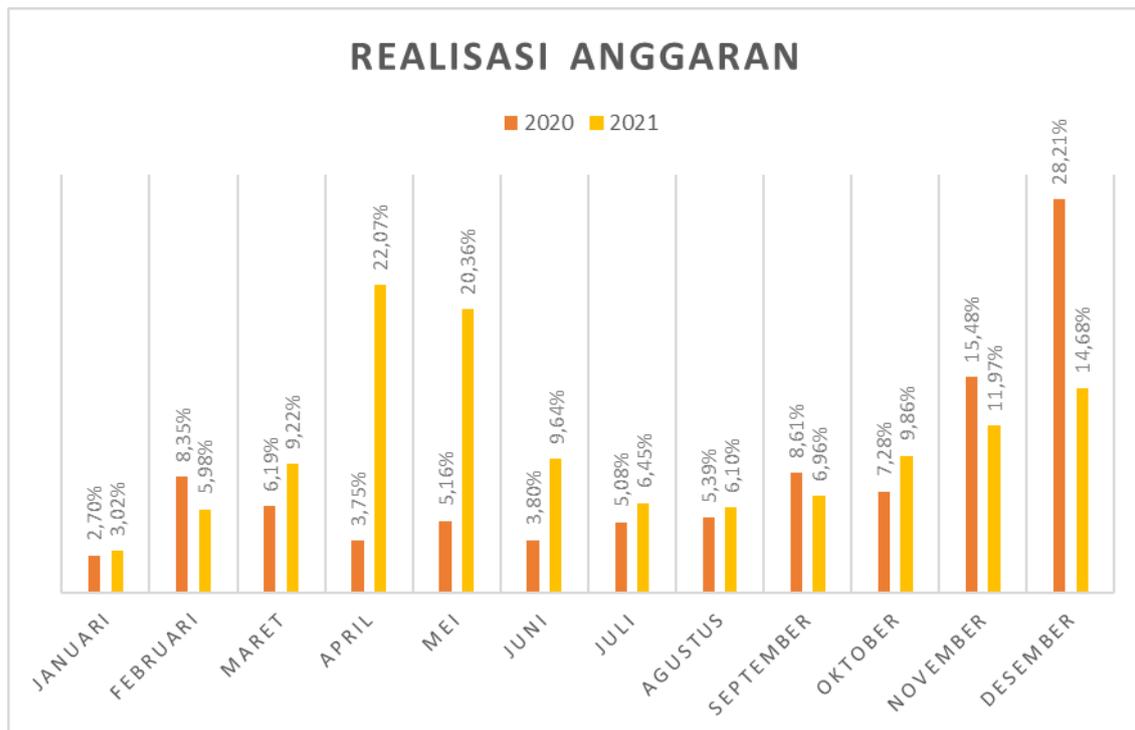
Sehingga, total Jumlah Pagu Anggaran Kemenko Marves setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp264.977.466.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), dari total pagu tersebut sampai akhir tahun 2021 realisasi anggaran belanja Kemenko Marves mencapai Rp262.836.541.935,00 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 99,19% dengan sisa pagu sebesar Rp2.140.924.065,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

Tingkat penyerapan anggaran Kemenko Marves tahun 2021 yaitu sebesar 99,19% dengan nilai Rp264.175.345.582,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Dua Rupiah). Hal ini dikarenakan tingkat konsistensi pelaksanaan kegiatan dalam mengawal pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi yang cukup tinggi pada masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja di lingkup Kemenko Marves mendapat tugas mengawal program prioritas yang menjadi fokus Presiden dan menjadi target pembangunan nasional. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada masing-masing K/L yang menjadi fungsi Kemenko Marves. Penyerapan anggaran pada tahun ini meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,15% atau senilai Rp244.408.581.366,00 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Tabel 13 Data Perbandingan Realisasi Anggaran per Bulan TA 2020 dan 2021

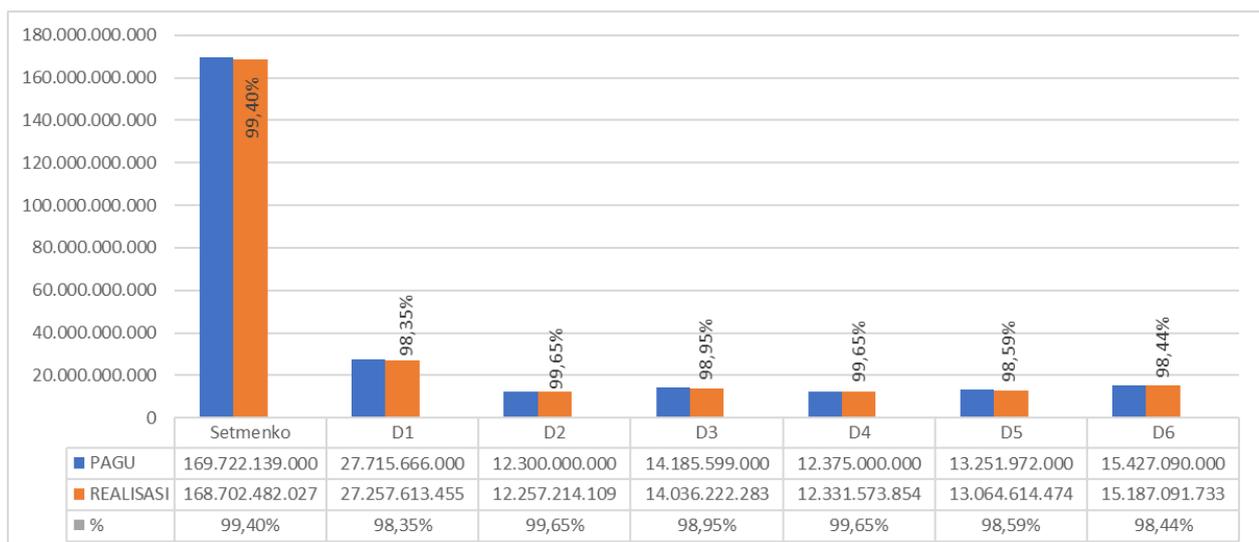
BULAN	2020	2021
JANUARI	6.594.150.126,00	7.381.421.309,00
FEBRUARI	20.413.346.422,00	14.615.492.066,00
MARET	15.138.228.455,00	22.529.998.909,00
APRIL	9.172.356.707,00	53.930.436.440,00
MEI	12.601.181.158,00	49.755.653.341,00
JUNI	9.285.257.247,00	23.564.708.490,00
JULI	12.421.997.336,00	15.755.398.121,00
AGUSTUS	13.162.166.153,00	14.911.424.219,00
SEPTEMBER	21.035.312.627,00	17.007.311.601,00
OKTOBER	17.790.743.230,00	24.095.044.925,00
NOVEMBER	37.837.098.015,00	29.264.770.100,00
DESEMBER	68.956.744.890,00	35.890.598.345,00

Grafik 14 Realisasi Anggaran Tahun 2021



Dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan ditargetkan, setiap unit kerja memiliki target kinerja triwulan dan tahunan pada 2021. Pada tahun 2021 anggaran setiap unit kerja Kemenko Marves disajikan pagu anggaran dan realisasi pada grafik berikut ini:

Grafik 15 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Unit Kerja Eselon I



Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase dari pagu anggaran pada masing-masing unit kerja tidak terlalu jauh perbedaannya, unit kerja Eselon I dengan nilai persentase realisasi keuangan tertinggi adalah Deputy Bidang Koordinasi Sumber

Daya Maritim (D2) sebesar 99,65% dan unit dengan nilai persentase terendah adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (D1) sebesar 98,35%.

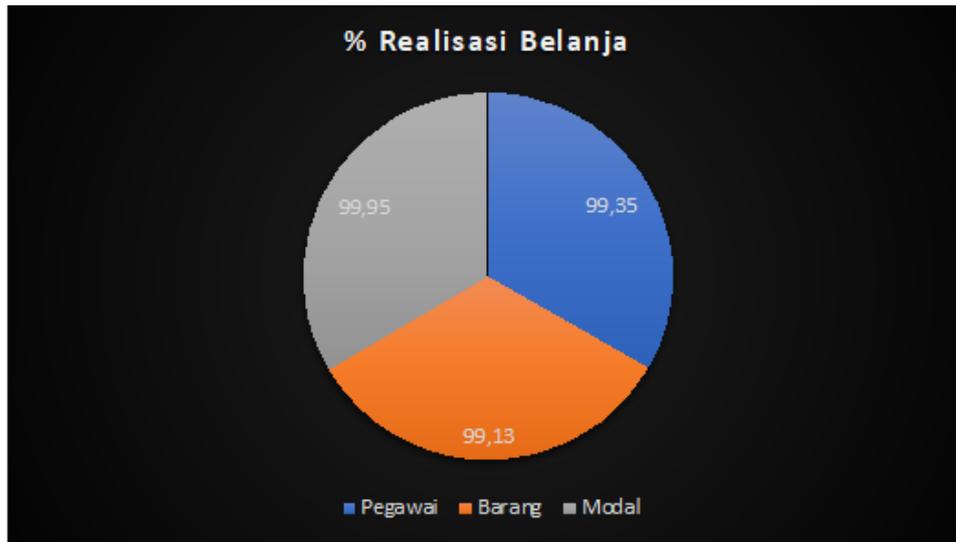
Dari total pagu anggaran tahun 2021 secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis belanja, namun Kemenko Marves hanya melaksanakan 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dengan rincian realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar Rp62.329.751.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp61.922.780.014,00 (Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Belas Rupiah) atau 99,35%, sisa pagu anggaran Rp406.970.986.00 (Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
2. Belanja barang sebesar Rp198.357.846.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp196.626.091.977,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 99,13%, sisa pagu anggaran Rp1.731.754.023,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah);
3. Belanja modal sebesar Rp4.289.869.000,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp4.287.669.944,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 99,95%, sisa pagu anggaran sebesar Rp2.199.056,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Enam Rupiah). Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14 Realisasi Belanja Tahun 2021

ANGGRAN PER JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
PEGAWAI	62.329.751.000,00	61.922.780.014,00	99,35
BARANG	198.357.846.000,00	196.626.091.977,00	99,13
MODAL	9.289.869.000,00	9.287.669.944,00	99,95
TOTAL	264.977.466.000,00	262.836.541.935,00	99,19

Grafik 16 Realisasi Belanja Tahun 2021



Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi adalah belanja modal dengan realisasi 99,95% atau Rp4.287.669.944,00 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 99,13% % atau Rp196.626.091.977,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

BAB IV BUDAYA KERJA

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik perilaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Sehubungan hal tersebut Kemenko Marves berinisiasi untuk melakukan akselerasi internalisasi *core values* ASN sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK yaitu sebagai berikut:

1. **Berorientasi Pelayanan**

Komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

2. **Akuntabel**

Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan

3. **Kompeten**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

4. **Harmonis**

Saling peduli dan menghargai perbedaan

5. **Loyal**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

6. **Adaptif**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

7. **Kolaboratif**

Membangun kerjasama yang sinergi

Kode Etik BerAKHLAK MARVES

Berorientasi Pelayanan	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ramah, cekatan, solutid, dan dapat diandalkan	Melakukan perbaikan tiada henti
Akuntabel	Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan	Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab	Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten
Kompeten	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Membantu orang lain belajar	Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

<i>Harmonis</i>	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	Suka menolong orang lain	Membangun lingkungan kerja yang kondusif
<i>Loyal</i>	Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah	Menjaga nama baik sesame SSN, pimpinan, instansi, dan negara	Menjaga rahasia jabatan dan negara
<i>Adaptif</i>	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Bertindak proaktif
<i>Kolaboratif</i>	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah	Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BAB V PENUTUP

Laporan Kegiatan Tahun 2021 ini disusun berdasarkan realisasi kegiatan program prioritas tahun anggaran 2021 yang telah disusun oleh Kemenko Marves. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Kemenko Marves selama Tahun 2021 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktivitas Kemenko Marves, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi dengan berbagai pihak.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan kegiatan di Kemenko Marves selama tahun 2021 adalah:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari pencapaian target masing-masing kegiatan, namun demikian, capaian perlu didorong untuk sampai kepada level *outcome* sehingga manfaat pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
2. Beberapa kegiatan masih perlu dikuatkan dalam perencanaannya agar intervensi yang dilakukan Kemenko Marves benar-benar dapat menciptakan akselerasi pencapaian target pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi.
3. Walaupun tahun 2021 masih dihadapkan pada kondisi pandemi covid 19, realisasi anggaran Kemenko Marves pada TA. 2021 mencapai 99,19%, beberapa pelaksanaan kegiatan program prioritas sebagian besar dilaksanakan secara *virtual meeting* namun hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Kemenko Marves.

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka langkah-langkah yang dapat kedepan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan pemahaman terkait *outcome* dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, terkait hal ini, Sekretariat Kemenko hendaknya terus melakukan peningkatan kapasitas pemahaman *outcome*.
2. Memperkuat koordinasi awal dengan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves untuk menajamkan identifikasi terhadap isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi yang akan dikoordinasikan, sehingga perencanaan kegiatan dapat dikuatkan dan intervensi yang dilakukan dapat berjalan maksimal.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami bahwa setiap pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kegiatan merupakan proses penyusunan kebijakan, terkait hal ini, Sekretariat Kemenko agar melaksanakan peningkatan kapasitas terkait kebijakan.
4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dukungan kesekretariatan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, terkait ini integrasi sistem aplikasi sangat penting dilakukan.
5. Penguatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk terus memberikan solusi secara cepat terhadap kendala yang dihadapi.

Melalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja dapat berjalan dengan baik. Melalui laporan kegiatan yang baik, diharapkan Kemenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kebijakan program prioritas yang sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Sehingga tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves.